SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan harus segera diatasi melalui penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh guna memenuhi hak-hak dasar manusia secara layak untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2027, dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 5);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan sosial dan ekonomi seseorang atau sekelompok orang untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
6. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
7. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Salatiga yang selanjutnya disebut TKPK Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kota.
11. Penduduk Miskin adalah orang yang tinggal di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai landasan Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan secara sistematis, terencana antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah Penduduk Miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini ditujukan untuk:
a. memberikan pedoman atau panduan dalam perencanaan penanggulangan Kemiskinan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh di tingkat Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. menjabarkan strategi dasar penanggulangan Kemiskinan ke dalam konteks penyelesaian permasalahan Kemiskinan di Daerah;
c. meningkatkan kinerja antar lembaga serta instansi penanggulangan Kemiskinan serta membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan Kemiskinan di Daerah menuju profesionalisme dan pencapaian yang terukur dan terarah; dan
d. meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

BAB II
RPKD

Pasal 4

(1) Dokumen RPKD terdiri atas:
    a. Bab I berisi pendahuluan;
    b. Bab II berisi kondisi umum Daerah;
    c. Bab III berisi profil kemiskinan Daerah;
    d. Bab IV berisi prioritas program dan anggaran;
    e. Bab V berisi lokasi prioritas;
    f. Bab VI berisi sistem monitoring dan evaluasi; dan
    g. Bab VII berisi penutup.
(2) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) TKPK Kota melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
(2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan instansi terkait dari setiap program dan kegiatan penanggulangan Kemiskinan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Wali Kota melalukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPKD.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RPKD bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber pendanaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 9 Desember 2025

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 9 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 46

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

PETRUS MAS SENTOT, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19690113 199603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan sebagai kondisi ketika masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber penghidupan. Kemiskinan merupakan permasalahan multi dimensi, yang meliputi permasalahan kesejahteraan ekonomi, kapasitas maupun inklusi sosial (Wagle, 2008). Kemiskinan terdiri dari segala bentuk ketidakadilan, yang merupakan sumber pengucilan sosial, dalam distribusi kondisi kehidupan yang esensial bagi martabat manusia (Asselin, 2009). Adapun kebutuhan dasar manusia tercermin dalam dimensi antara lain pendapatan, pendidikan, kesehatan, nutrisi/makanan, sanitasi/air bersih, pekerjaan, rumah, akses terhadap aset produktif, akses terhadap pasar dan partisipasi dalam komunitas (Asselin, 2009).

Kemiskinan pada tingkat global menjadi masalah yang cukup kompleks dan mendalam yang mempengaruhi hidup miliaran orang di seluruh dunia. Banyak organisasi internasional, pemerintah, dan LSM telah berusaha mengatasi kemiskinan global melalui program-program bantuan, pembangunan ekonomi, pelatihan keterampilan, pendidikan, dan upaya-upaya lainnya. Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menargetkan penghapusan kemiskinan dalam bentuk apapun pada tahun 2030. Kemiskinan masih menjadi tantangan besar di masa kini dan masa depan, mengingat berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi di seluruh dunia. Perubahan iklim, krisis kesehatan global, dan perubahan teknologi juga akan memengaruhi dinamika kemiskinan pada tingkat global.

Upaya penanggulangan kemiskinan yang merupakan bagian dari perencanaan wilayah tentunya membutuhkan dasar studi ilmiah dengan menggunakan analisis yang tepat untuk dapat kemudian merencanakan tindakan maupun aksi penanggulangan kemiskinan yang nyata. Upaya penanggulangan kemiskinan daerah merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Adapun payung hukum untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan yakni Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015. Pada tahun 2020 keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Amanat yang tertuang dalam kebijakan ini perlu dilanjutkan pada level kabupaten/kota, dalam hal ini Kota Salatiga untuk mewujudkan upaya penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang ada.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan selaras dengan prinsip dalam Tujuan pembangunan Berkelanjutan perlu dilakukan dengan berbagai langkah dan emerlukan kerja kolaborasi, baik lintas aktor maupun lintas sektor. Dalam kaitan tersebut, percepatan penanggulangan kemiskinan, menjadi salah satu prioritas dalam Perencanaan Pembangunan Kota Salatiga sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2025-2045 maupun Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029, dan sejalan dengan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu di Kota

Memperkuat landasan yuridis kebijakan penanggulangan kemiskinan, serta sebagai bentuk operasionalisasi upaya penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dalam Rencana Pembangunan Kota Salatiga, pada tahun 2022 telah dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Salatiga Tahun 2023-2027, yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Salatiga tahun 2023-2027.

Penanggulangan Kemiskinan kembali menjadi prioritas nasional baik yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045 maupun Rancangan RPJMN Tahun 2025-2029. Terkait dengan hal tersebut Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pembangunan Daerah) dalam berbagai forum Rakor TKPK menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) perlu segera menyusun RPKD Tahun 2025-2029 agar dapat disesuaikan dan selaras dengan dokumen perencanaan jangka menegah baik nasional maupun daerah. Sedangkan bagi pemerintah daerah yang sudah memiliki RPKD agar melakukan evaluasi dan review terhadap dokumen RPKD yang dimiliki dengan penyesuaian terhadap jangka waktu dari dokumen tersebut.

Memperhatikan hal-hal tersebut, maka perlu untuk segera melakukan review/revisi atas Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Salatiga Tahun 2023-2027 dengan perubahan dan penyesuaian jangka waktu menjadi RPKD Kota Salatiga 2025-2029 agar sesuai dengan tahapan perencanaan jangka menengah baik di pusat maupun daerah, maupun isu strategis pengentasan kemiskinan, dan sekaligus sebagai pedoman dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga.

Dalam menentukan kebijakan penanggulangan kemiskinan penting untuk melihat bagaimana tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Setelah garis kemiskinan ditentukan, maka profil kemiskinan dapat dianalisis yang kemudian memberikan perkiraan kemiskinan secara keseluruhan, distribusi kemiskinan di seluruh sektor, wilayah, kelompok sosial ekonomi maupun perbandingan antara penduduk miskin dan tidak miskin (Son & Kakwani, 2004).

Di Indonesia, pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh BPS misalnya menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Hal ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang disampaikan oleh Worldbank (https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11985) (Haughton & Khandker, 2009). Melalui konsep ini, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Seseorang dapat dikelaskan sebagai penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Sebagaimana disampaikan oleh Ravaillion (1998) dalam Haughton & Khandker (2009), terdapat tiga langkah untuk menganalisis kemiskinan: (i) Mendefinisikan indikator kesejahteraan, (ii) Menetapkan standar minimum yang dapat diterima dari indikator tersebut untuk memisahkan yang miskin dari yang tidak miskin (garis kemiskinan), (iii) Membuat ringkasan statistik untuk mengumpulkan informasi dari distribusi indikator kesejahteraan ini relatif terhadap garis kemiskinan. Beberapa pertanyaan penting dalam mendalami kemiskinan di suatu wilayah antara lain: Bagaimana karakteristik rumah tangga miskin? Bagaimana kondisi kemiskinan yang ada apakah sementara atau tetap? Bagaimana pola dan perubahan kemiskinan? Selain itu, perlu diperhatikan pula aspek longitudinal/panel yang lebih luas dari profil kemiskinan - aliran pendapatan seumur hidup, posisi anak-anak, orang sakit dan lanjut usia, kecukupan tabungan, jenis kelamin; dll. Selain itu, penting menggunakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

sumber data gabungan untuk penilaian kemiskinan - menggabungkan survei rumah tangga dan sensus penduduk untuk menyusun peta kemiskinan agar profil, karakteristik dan permasalahan kemiskinan dapat dijabarkan secara jelas untuk kemudian dicari upaya-upaya (kebijakan) penanggulangan kemiskinan yang sesuai.

Penyusunan RPKD Kota Salatiga didahului dengan analisis terhadap kondisi wilayah yang dilanjutkan dengan analisis profil kemiskinan wilayah. Hasil kajian profil kemiskinan daerah melalui analisis karakteristik makro maupun mikro kemudian dipergunakan untuk menganalisis akar masalah kemiskinan, keterkaitan dengan kondisi fiskal serta analisis faktor pendorong dan penghambat intervensi penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, analisis wilayah dilakukan untuk menentukan lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan. Dalam RPKD ini termuat rekomendasi penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga dan terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan (RPKD) Kota Salatiga yaitu :

1. Memberikan pedoman atau panduan dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah yang sistematis, terpadu dan menyeluruh di tingkat Kota Salatiga.
2. Menjabarkan strategi dasar penanggulangan kemiskinan ke dalam konteks penyelesaian permasalahan kemiskinan di Kota Salatiga.
3. Meningkatkan kinerja antar lembaga serta instansi penanggulangan kemiskinan serta membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga menuju profesionalisme dan pencapaian yang terukur dan terarah.
4. Meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Salatiga.

1.3 Landasan Hukum

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029 sebagai upaya review dan penyesuaian atas Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Salatiga Tahun 2023-2027 terhadap perencanaan jangka menengah daerah maupun jangka menengah nasional tahun 2025-2029 disusun berdasarkan landasan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan
5. Instruksi Presiden nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2025-2045
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029
10. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 45 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Terpadu di Kota Salatiga

1.4 Metode dan Tahapan Penyusunan

Penyusunan dokumen RPKD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota serta memperhatikan hasil Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Salatiga dan dokumen/kertas hasil diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPKD dilakukan untuk dengan metode/pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan substansi RPJMD, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah terkait penanggulangan kemiskinan. Fokus utamanya adalah bagaimana RPKD dapat mengisi, mempertajam dan memperkaya substansi dari setiap dokumen perencanaan dan penganggaran reguler daerah dengan cara memastikan seluruh substansi dari setiap bagian dalam RPKD dapat mengisi dan mempertajam substansi terkait isu percepatan penanggulangan kemiskinan dalam dokumen RPJMD, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
2. Pendekatan substansi terhadap tahapan dan tata cara penyusunan dokumen RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah. Fokus utamanya bagaimana substansi dari setiap bagian dalam RPKD dapat mengisi, memperkaya dan mempertajam tahapan dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan dan reguler daerah (RKPD dan Renja Perangkat Daerah).
3. Pendekatan Prioritas Wilayah. Fokus utamanya adalah bagaimana RPKD dapat memetakan sasaran prioritas wilayah dan bentuk intervensi berdasarkan analisis indikator utama dan indikator pendukung.

1.5 Sistematika RPKD

RPKD Kota Salatiga tahun 2025-2029 sebagai hasil revisi/review atas RPKD Kota Salatiga Tahun 2023-2027 disusun dengan bab-bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Menjelaskan latar belakang, tujuan, landasan hukum, metode dan tahapan penyusunan RPKD, dan sistematika RPKD.

Bab II Kondisi Umum Daerah: Menjelaskan tentang kondisi geografis, perekonomian, demografis dan sosial budaya, yang dikaitkan dengan karakteristik kemiskinan di Kota Salatiga.

Bab III Profil Kemiskinan Kota Salatiga: Membahas tentang konsep kemiskinan, analisis kondisi kemiskinan daerah baik makro dan mikro, analisis karakteristik permasalahan dari berbagai bidang yakni konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar dan ketahanan pangan, sosial, ekonomi, dan kewilayahan. Pada bagian ini, dibahas juga mengenai target kemiskinan daerah, tinjauan kebijakan penanggulangan kemiskinan, dan tinjauan kelembagaan penanggulangan kemiskinan daerah.

Bab IV Prioritas Program dan Anggaran: Menjelaskan tentang analisis APBD untuk penanggulangan kemiskinan, isu strategis, strategi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

penanggulangan kemiskinan, serta Rencana Aksi Daerah penanggulangan kemiskinan masing-masing bidang.

Bab V Lokasi Prioritas: Membahas penentuan wilayah prioritas bidang kemiskinan konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, sosial, ekonomi, kewilayahan serta wilayah prioritas komposit.

Bab VI Sistem Monitoring dan Evaluasi: Menjelaskan tentang bagaimana upaya monitoring dan evaluasi dilakukan.

Bab VII Penutup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB II
KONDISI UMUM DAERAH

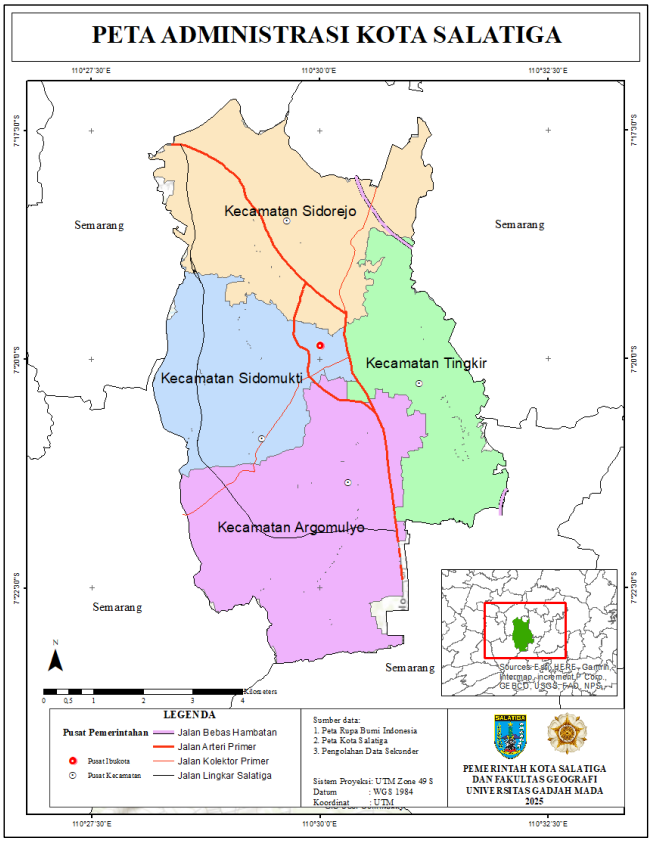
2.1 Geografis

2.1.1. Karakteristik Lokasi Wilayah

Secara geografis Kota Salatiga terletak di antara 007°17’ dan 007°17’.23” Lintang Selatan dan di antara 110°27’56,81” dan 110°32’4,64” Bujur Timur. Kota Salatiga merupakan kota yang strategis karena berada pada jalur regional Jawa Tengah yang menghubungkan Kota Semarang dan Kota Surakarta. Kota Salatiga dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Semarang dengan batas wilayahnya yaitu

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pabelan (Desa Pabelan, Desa Kauman Lor dan Pejaten) dan Kecamatan Tuntang (Desa Kesongo dan Watu Agung),
b. Sebelah timur Kecamatan Pabelan (Desa Ujung-Ujung, Sukoharjo dan Glawan) dan Kecamatan Tengaran (Desa Bener, Tegal Waton dan Nyamat),
c. Sebelah Selatan Kecamatan Getasan (Desa Sumogawe, Samirono, Jetak) dan Kecamatan Tengaran (Desa Patemon dan Karang Duren), serta
d. Sebelah barat Kecamatan Tuntang Desa Candirejo, Jombor, Sraten dan Gedangan) dan Kecamatan Getasan (Desa Polobogo).

Pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045, secara administratif Kota Salatiga memiliki luas wilayah sebesar ± 5.678,110 ha atau ± 56,78 km² yang terbagi dalam 4 (empat) kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) kelurahan. Berikut menunjukkan wilayah administratif Kota Salatiga pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kota Salatiga

Sumber: Tim Penyusun RPKD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Secara keseluruhan, pada tahun 2024 Kota Salatiga yang tediri atas 4 kecamatan dan 23 kelurahan secara administratuf terbagi atas 1148 Rukun Tetangga (RT) dan 210 Rukun Warga (RW). Berikut ini secara lebih rinci karakteristik lokasi dan wilayah Kota Salatiga berdasarkan luas wilayah dan kondisi administrasi ada pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Data Jumlah RT/RW dan Luas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Salatiga

No	Kecamatan/Kelurahan	Luas Wilayah(±km²)	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	**KECAMATAN SIDOREJO**	**15,61**	**320**	**62**
	1. Kelurahan Salatiga	2,05	83	12
	2. Kelurahan Bugel	2,54	23	7
	3. Kelurahan Sidorejo Lor	2,60	95	16
	4. Kelurahan Blotongan	4,20	74	15
	5. Kelurahan Pulutan	2,13	20	5
	6. Kelurahan Kauman Kidul	2,09	25	7
2.	**KECAMATAN SIDOMUKTI**	**18,14**	**237**	**40**
	1. Kelurahan Mangunsari	2,96	96	16
	2. Kelurahan Dukuh	3,64	75	10
	3. Kelurahan Kecandran	3,48	27	7
	4. Kelurahan Kalicacing	0,72	39	7
3.	**KECAMATAN TINGKIR**	**10,43**	**305**	**49**
	1. Kelurahan Kalibening	0,97	9	3
	2. Kelurahan Sidorejo Kidul	2,75	40	9
	3. Kelurahan Kutowinangun Lor	1,98	91	6
	4. Kelurahan Kutowinangun Kidul	1,04	70	8
	5. Kelurahan Gendongan	0,58	38	5
	6. Kelurahan Tingkir Tengah	1,38	32	10
	7. Kelurahan Tingkir Lor	1,73	25	8
4.	**KECAMATAN ARGOMULYO**	**18,14**	**286**	**59**
	1. Kelurahan Ledok	1,93	72	14
	2. Kelurahan Cebongan	1,50	25	6
	3. Kelurahan Tegalrejo	1,96	63	9
	4. Kelurahan Randuacir	3,93	44	10
	5. Kelurahan Kumpulrejo	5,63	44	10
	6. Kelurahan Noborejo	3,19	38	10
	Kota Salatiga		**1.148**	**210**

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Salatga, 2024

2.1.2. Kondisi Kawasan dan Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Salatiga merupakan bagian dari Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur (yang meliputi Kabupaten/Kota Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi). Kawasan ini selain didukung oleh potensi sumber daya alam dan prasarana juga memiliki letak yang strategis yang dapat mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata, tanaman pangan dan perikanan. Untuk mendukung hal tersebut maka melalui Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang, strategi pengembangan untuk kawasan ini adalah secara intra regional sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura dan secara inter regional dan nasional merupakan tempat transit perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Pulau Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Pulau Kalimantan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.1.3. Topografi

Kondisi topografi di Kota Salatiga memiliki topografi yang beragam, yang terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

a. Daerah Bergelombang ± 65%, terdiri dari Kelurahan Dukuh, Ledok, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Salatiga, Sidorejo Lor, Bugel, Kumpulrejo dan Kauman Kidul.
b. Daerah Miring ± 25%, terdiri dari Kelurahan Tegalrejo, Mangunsari, Sidorejo Lor, Sidorejo Kidul, Tingkir Lor, Pulutan, Kecandran, Randuacir, Tingkir Tengah dan Cebongan.
c. Daerah Datar ± 10%, terdiri dari Kelurahan Kalicacing, Noborejo, Kalibening dan Blotongan.

Sedangkan ditinjau dari kelerengan tanahnya, kelerengan tanah terbagi menjadi 6 (enam) kategori, yaitu:

a. Kelerengan tanah sebesar 2% - 5%, luas keseluruhan 1.847,26 ha sebagian besar terdapat di Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Randuacir, Kelurahan Noborejo, Kelurahan Kalibening dan Kelurahan Tingkir Tengah, Kelurahan Pulutan.
b. Kelerengan tanah sebesar 5% - 8%, luas keseluruhan 2.393,10 ha sebagian besar terdapat di Kelurahan Kalicacing, Kelurahan Gendongan, Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Kumpulrejo, Kelurahan Kecandran, Kelurahan Tingkir Lor, Kelurahan Blotongan, Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan Kalibening.
c. Kelerengan tanah sebesar 8% - 15%, luas keseluruhan 1.098,64 ha sebagian besar terdapat di Kelurahan Ledok, Kelurahan Salatiga, Kelurahan Kutowinangun, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Sidorejo Lor, Kelurahan Kumpulrejo, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Kauman Kidul, Kelurahan Blotongan.
d. Kelerengan tanah sebesar 15% - 25%, luas keseluruhan 216,31 ha sebagian besar di Kelurahan Bugel dan Kelurahan Blotongan.
e. Kelerengan tanah sebesar 25% - 40%, luas keseluruhan 213,37 ha sebagian besar di Kelurahan Kutowinangun, Kelurahan Bugel, Kelurahan Blotongan, Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan Sidorejo Kidul.
f. Kelerengan tanah sebesar > 40%, luas keseluruhan 131,30 ha sebagian besar di Kelurahan Bugel dan sebagian kecil di Kelurahan Sidorejo Kidul, Blotongan dan keseluruhan Kutowinangun.

Berdasarkan data diatas terkait kondisi topografi dapat diketahui bahwa Kota Salatiga didominasi oleh daerah bergelombang. Terdapat wilayah dengan kelerengan yang cukup curam di beberapa tempat, seperti Kutowinangun Lor dan Kutowinangun Kidul, Bugel, Kauman Kidul, Blotongan, dan Sidorejo Kidul. Kondisi ini mengakibatkan adanya bahaya terjadinya tanah longsor di wilayah tersebut. Kondisi ancaman tanah longsor semakin meningkat terutama pada musim hujan. Selain menimbulkan bencana tanah longsor, lereng yang curam dapat menyebabkan kekeringan hal ini karena daya tampung terhadap air hujan semakin sedikit, sehingga lebih sensitif terhadap kekeringan.

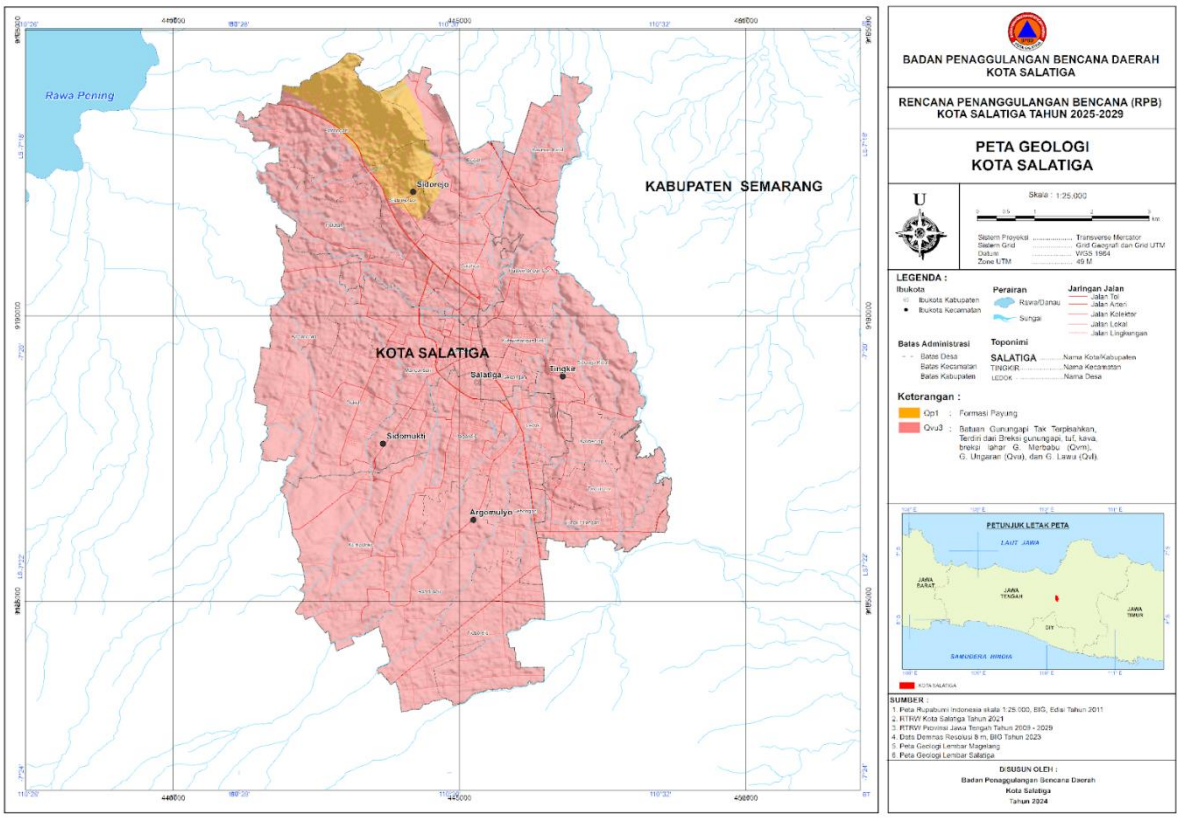
2.1.4. Geologi

Karakteristik geologis di Kota Salatiga berada pada satuan morfologi gunung api, berupa puncak Gunung Merbabu dan Gunung Telomoyo dengan ketinggian lebih dari 1.400 mdpl. Sementara itu, satuan morfologi tubuh gunung api yaitu berada pada ketinggian antara 400-1.400 mdpl dan kemiringan lereng antara 100 – 500 yang menempati dari tenggara ke barat laut sepanjang lereng Gunung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Merbabu dan Gunung Telomoyo dan menempati bagian kecil di barat laut sebagai lereng Gunung Ungaran. Sedangkan pada kondisi morfologi kaki gunungapi menunjukkan bahwa ketinggiannya kurang dari 500 mdpl dan kemiringan lereng antara 50 – 300.

Secara jenis geologi, Kota Salatiga terdiri dari 3 jenis geologi yaitu Endapan Gunung Muda Gunung Merapi/Batuan Gunung Api Merbabu, Formasi Kaligetas dan Formasi Payung. Dilihat dari umur batuan geologi yang ada masuk ke dalam Pleistosen dan Holosen. Untuk yang paling mendominasi jenis geologi di Kota Salatiga yaitu Endapan Gunung Muda Gunung Merapi/Batuan Gunung Api Merbabu karena hampir meliputi wilayah Kota Salatiga.



Gambar 2. 2. Peta Geologi Kota Salatiga

Sumber: BPBD Kota Salatiga, 2024

Sebagai catatan, material penyusun Kota Salatiga cenderung bersifat lepas (material piroklastik, *fractured lava flows*, dan lahar dari Gunung Merbabu dan Telomoyo) dan terletak pada wilayah dengan tingkat kemiringan yang relatif tinggi. Oleh karena itu, ketika kondisi material sudah melewati batas kestabilan dan/atau memiliki kandungan air yang cukup jenuh, longsor akan terjadi, dan kemudian menutup berbagai akses jalan dan/atau dapat berdampak ke infrastruktur. Kondisi material penyusun Kota Salatiga yang didominasi oleh material vulkanik menjadikan tanah di Kota Salatiga kaya akan kation-kation yang dapat menyuburkan tanah (seperti Ca, Mg, Na, K, Al) sehingga menjadikan wilayah ini subur dan ditumbuhi oleh banyak vegetasi. Akan tetapi, karena setiap jenis vegetasi didominasi oleh unsur karbon (C), dan karbon dapat terbakar, kehadiran vegetasi yang rapat cenderung meningkatkan potensi kebakaran, baik yang terjadi akibat ulah manusia atau alami. Kemudian, kondisi Kota Salatiga yang terletak diantara Gunung Merbabu-Telomoyo dan Bukit Payung menjadikan kota ini sebagai wadah tampungan air alamiah dan tempat pertukaran udara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

panas-dingin secara intens sehingga memungkinkan terjadinya banjir dan cuaca ekstrim.

2.1.5. Hidrologi

Wilayah Kota Salatiga memiliki 4 buah mata air yang mengalir di beberapa kecamatan dan kelurahan yang ada. Keempat mata air tersebut sedikit banyak menjadi sumber air yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. Mata air-mata air tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mata air Kalitaman yang mengalir ke Utara dengan kapasitas 150 liter per detik, yang berfungsi sebagai irigasi persawahan di pemandian dan rekreasi.
b. Mata air Kalisombo yang mengalir ke arah Utara dengan kapasitas 50 liter per detik, yang dimanfaatkan sebagai sumber air minum dan mengairi areal persawahan di wilayah Semarang dan Kota Salatiga.
c. Mata air Benoyo yang mengalir ke arah barat dengan kapasitas 50 liter per detik yang berfungsi sebagai irigasi persawahan di wilayah Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga serta sebagai penggelontoran drainase Kota. Mata air ini dianggap tidak sehat.
d. Mata air Senjoyo yang mengalir ke arah Utara dengan kapasitas ±1.000 liter per detik, terletak di wilayah Kota Salatiga yang dimanfaatkan untuk air minum Utama Kota Salatiga

Jumlah sumber air yang cukup banyak di Kota Salatiga akan dapat meningkatkan konservasi tata air, sehingga kondisi ini akan menjadi kendala dalam pengembangan wilayah Permukiman selain juga dapat sebagai potensi. Adapun kali-kali yang mengalir di wilayah Kota Salatiga yaitu: Kali Ngaglik, Kali Banjaran, Kali Kalisombo, yang kesemuanya bermuara pada Kali Tuntang. Air tanah di wilayah Kota Salatiga rata-rata pada ketinggian 10 – 20 meter. Kota Salatiga termasuk dalam area "G*round Reservoi*r" atau daerah pengumpulan air tanah, dimana asal air tanah yang mengalir dari daerah tangkapan air Gunung Merbabu di sebelah Selatan dan Gunung Ungaran di sebelah Barat.

Keberadaan empat mata air dan beberapa sungai yang mengalir di Kota Salatiga memberikan manfaat besar bagi pemenuhan kebutuhan air bersih. Persediaan air tanah dirasa sudah cukup termasuk air permukaan yang dapat diperoleh dari sungai yang mengalir di wilayah Kota Salatiga dan sekitarnya, selain dipergunakan untuk kepentingan irigasi, sebagian dapat diolah untuk air minum Kota Salatiga di masa mendatang. Disisi lain, sebagai "Ground Reservoir" atau daerah penampungan air tanah, penurunan curah hujan atau pengurangan pasokan dari daerah tangkapan air Gunung Merbabu dan Gunung Ungaran dapat mengurangi kapasitas air tanah, yang berdampak pada ketersediaan air bersih. Kondisi ini membuat wilayah tersebut rentan terhadap kekeringan apabila tidak ada pengelolaan dan konservasi yang baik.

2.1.6. Wilayah Rawan Bencana

Penentuan wilayah rawan bencana dilakukan berdasarkan hasil kajian risiko bencana, yang merujuk pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional. Analisis dalam kajian risiko bencana meliputi analisis potensi bahaya, kerentanan, kapasitas daerah, hingga mengarahkan pada kesimpulan tingkat risiko bencana di Kota Salatiga.

Kajian risiko bencana dapat pula digunakan untuk mengetahui mekanisme perlindungan dan strategi dalam menghadapi bencana. Keseluruhan analisis pada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

rangkaian kajian risiko bencana juga digunakan dalam penyusunan rencana tindak tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Hasil pengkajian tingkat risiko bencana di Kota Salatiga dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 2 Luasan Risiko Bencana Kota Salatiga

No.	Jenis Bencana	Rentan (ha)			Luas (ha)	Kategori
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjir	3.780,01	131,13	65,19	3.976,33	Rendah
2	Cuaca Ekstrem	390,71	313,57	4.790,03	5.494,31	Sedang
3	Gempa Bumi	1.186,39	1.613	2.694,92	5.494,31	Sedang
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	285,18	163,66	0	448,84	Rendah
5	Kekeringan	0	245,7	5.248,56	5.494,26	Sedang
6	Gunung Api	27,61	0	0	27,61	Rendah
7	Tanah Longsor	253,53	73,61	110,96	438,10	Rendah

Sumber: BPBD Kota Salatiga Tahun 2023, 2025 (Data Diolah)

Tingkat risiko bencana di Kota Salatiga pada tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Salatiga berada pada tingkat sedang untuk 3 (tiga) jenis bencana berpotensi, yaitu cuaca ekstrim, gempabumi, dan kekeringan. Untuk tingkat risiko rendah ada pada ancaman banjir, kebakaran hutan, gunungapi, dan tanah longsor. Risiko tersebut diperoleh dari penggabungan tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana di Kota Salatiga. Parameter untuk mengkaji potensi bencana dilakukan dengan analisis multibahaya, yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa potensi bencana yang terjadi di Kota Salatiga. Penggabungan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai maksimum dari setiap bencana yang terjadi sehingga gambaran bencana yang tampak pada analisis multibahaya adalah bencana yang memberikan pengaruh terbesar terhadap suatu wilayah. Analisis multibahaya juga dilakukan perhitungan pada luas multibahaya, kerentanan, kapasitas dan risiko multibahaya. Hasil perhitungan nilai potensi luas bahaya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 3 Potensi Luas Multibahaya per Kelurahan di Kota Salatiga

No	Kecamatan/ Kelurahan	Risiko (ha)		Luas (ha)
		Rendah	Sedang	
	Kec. Argomulyo			
1	Cebongan	55,08	98,94	154,01
2	Kumpulrejo	206,00	355,90	561,90
3	Ledok	100,52	89,05	189,57
4	Noborejo	32,43	269,63	302,06
5	Randuacir	54,06	359,43	413,49
6	Tegalrejo	78,04	117,44	195,47
	Kec. Tingkir			
1	Gendongan	27,09	29,00	56,08
2	Kalibening	61,20	35,54	96,74
3	Kutowinangun Kidul	24,22	74,59	98,81
4	Kutowinangun Lor	48,89	149,91	198,79
5	Sidorejo Kidul	155,07	123,60	278,67

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6	Tingkir Lor	102,65	71,78	174,43
7	Tingkir Tengah	0,89	136,47	137,35
	Kec. Sidomukti			
1	Dukuh	62,49	298,79	361,28
2	Kalicacing	39,12	31,41	70,52
3	Kecandran	92,59	254,91	347,50
4	Mangunsari	10,69	284,40	295,09
	Kec. Sidorejo			
1	Blotongan	179,96	243,78	423,74
2	Bugel	149,87	102,35	252,21
3	Kauman Kidul	71,23	138,50	209,73
4	Pulutan	9,09	204,18	213,27
5	Salatiga	46,27	159,25	205,52
6	Sidorejo Lor	87,59	170,48	258,07
	Kota Salatiga	**1.695,01**	**3.799,30**	**5.494,32**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Salatiga Tahun 2023

Selain luas potensi bahaya, aspek kebencanaan juga diidentifikasi berdasarkan pada kerentanaan multibahaya. Kajian kerentanan multibahaya dilakukan untuk mengetahui potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian di Kota Salatiga

Tabel 2. 4 Potensi Luas Kerentanan Multibahaya per Kelurahan

No	Kecamatan/ Kelurahan	Resiko (ha)			Luas (ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
	Kec. Argomulyo				
1	Cebongan	0,25	153,76	0	154,01
2	Kumpulrejo	181,26	380,64	0	561,90
3	Ledok	1,17	188,39	0	189,57
4	Noborejo	24,03	278,04	0	302,06
5	Randuacir	53,04	360,45	0	413,49
6	Tegalrejo	3,01	192,46	0	195,47
	Kec. Tingkir				
1	Gendongan	0	56,08	0	56,08
2	Kalibening	19,28	77,46	0	96,74
3	Kutowinangun Kidul	8,30	90,51	0	98,81
4	Kutowinangun Lor	35,75	163,05	0	198,79
5	Sidorejo Kidul	51,75	226,92	0	278,67
6	Tingkir Lor	28,58	139,89	5,97	174,43
7	Tingkir Tengah	0	137,29	0,06	137,35
	Kec. Sidomukti				
1	Dukuh	38,98	322,30	0	361,28
2	Kalicacing	0	70,52	0	70,52
3	Kecandran	81,32	266,18	0	347,50
4	Mangunsari	0,96	294,13	0	295,09
	Kec. Sidorejo				
1	Blotongan	85,88	322,93	14,93	423,74
2	Bugel	65,12	170,84	16,25	252,21
3	Kauman Kidul	46,14	163,60	0	209,73

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Kecamatan/ Kelurahan	Resiko (ha)			Luas (ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
4	Pulutan	19,95	193,32	0	213,27
5	Salatiga	0,06	205,46	0	205,52
6	Sidorejo Lor	5,42	250,63	2,02	258,07
	Kota Salatiga	**750,25**	**4.704,84**	**39,22**	**5.494,32**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Salatiga Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan luasan kerentanan multibahaya yang mungkin terjadi. Dalam kajian ini nilai luasan total sesuai dengan luas administrasi dikarenakan beberapa bencana yang diperhitungkan mempertimbangkan keseluruhan wilayah. Hasil menunjukkan Kelurahan Bugel memiliki luasan tertinggi sehingga menjadi daerah dengan pengaruh kerentanan bencana terbesar.

Aspek selanjutnya adalah risiko multibahaya. Risiko multibahaya dikaji melalui nilai bahaya, kerentanan dan kapasitasnya sehingga akan diperoleh kelas risiko per kecamatan di Kota Salatiga. Hasil analisis risiko untuk multibahaya dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2. 5 Potensi Luas Risiko Multibahaya per Kelurahan

No	Kecamatan/ Kelurahan	Risiko (ha)			Luas (ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
	Kec. Argomulyo				
1	Cebongan	0	154,01	0	154,01
2	Kumpulrejo	193,09	368,81	0	561,90
3	Ledok	0,67	188,89	0	189,57
4	Noborejo	1,45	300,61	0	302,06
5	Randuacir	31,38	382,10	0	413,48
6	Tegalrejo	5,23	190,25	0	195,47
	Kec. Tingkir				
1	Gendongan	0	47,91	8,18	56,08
2	Kalibening	9,34	87,40	0	96,74
3	Kutowinangun Kidul	5,82	86,02	6,97	98,81
4	Kutowinangun Lor	32,21	166,58	0	198,79
5	Sidorejo Kidul	73,33	205,34	0	278,67
6	Tingkir Lor	9,09	160,86	4,48	174,43
7	Tingkir Tengah	0	137,30	0,03	137,33
	Kec. Sidomukti				
1	Dukuh	34,51	326,76	0	361,28
2	Kalicacing	0	70,52	0	70,52
3	Kecandran	77,80	269,70	0	347,50
4	Mangunsari	0	295,09	0	295,09
	Kec. Sidorejo				
1	Blotongan	121,72	299,09	2,93	423,74
2	Bugel	103,49	148,72	0	252,21
3	Kauman Kidul	33,09	176,63	0	209,72
4	Pulutan	12,24	201,03	0	213,27
5	Salatiga	0,04	205,49	0	205,52
6	Sidorejo Lor	14,08	243,99	0	258,07
	Kota Salatiga	**758,58**	**4.713,10**	**22,58**	**5.494,26**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Salatiga Tahun 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Berdasarkan di atas dapat diidentifikasikan terdapat beberapa kelurahan yang mempunyai luasan risiko tinggi terhadap bencana multibahaya, antara lain Kutowinangun Kidul, Tingkir Lor, Blotongan dan Tingkir Tengah.

2.2 Perekonomian

2.2.1. Struktur Ekonomi

Kondisi ekonomi makro Kota Salatiga selama tahun 2019-2024 menunjukkan kinerja yang relatif stabil seiring membaiknya perekonomian nasional dan perekonomian global. Kondisi ekonomi suatu wilayah dapat menggambarkan kerentanan ekonomi wilayah tersebut dan berimplikasi pada peningkatan kondisi kemiskinan baik kemiskinan makro maupun kemiskinan mikro.

Nilai PDRB Kota Salatiga atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2024 mencapai 18,08 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 1,31 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 16,77 triliun rupiah. Peningkatan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh inflasi dan meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 10,92 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 11,50 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Kota Salatiga mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37 persen. Peningkatan PDRB atas dasar harga konstan ini menunjukkan kondisi ekonomi yang lebih baik setelah pandemi Covid-19 melanda.

Selama lima tahun terakhir (2020– 2024) struktur perekonomian Salatiga didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Pendidikan serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib . Hal ini dapat dilihat dari peranan masing- masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Salatiga.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Salatiga pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 33,14 persen (angka ini meningkat dari 32,19 persen di tahun 2020). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 13,59 persen (turun dari 13,94 persen di tahun 2020), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 12,64 persen (turun dari 12,85 persen di tahun 2020). Berikutnya lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,92 persen (naik dari 7,12 persen di tahun 2020); lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 4,82 persen (turun dari 5,53 persen di tahun 2020); serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4,72 persen (turun dari 5,20 persen di tahun 2020).

Tabel 2. 6. Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto (persen) Kota Salatiga Tahun 2019-2024

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,5	4,54	4,51	4,44	4,34	4,38
B	Pertambangan dan Penggalian	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02
C	Industri Pengolahan	31,27	32,19	32,76	32,78	33,04	33,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,19	0,18	0,18	0,17	0,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F	Konstruksi	14,41	13,94	13,78	13,56	13,61	13,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,19	12,85	13,02	12,83	12,74	12,64
H	Transportasi dan Pergudangan	3,01	2,3	2,32	3,37	3,58	3,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,53	7,12	7,16	7,6	7,85	7,92
J	Informasi dan Komunikasi	3,22	3,85	3,87	3,61	3,54	3,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial and Insurance Activities*	3,48	3,55	3,56	3,53	3,42	3,28
L	Real Estat	4,58	4,62	4,51	4,39	4,32	4,18
M,N	Jasa Perusahaan	1,32	1,26	1,24	1,25	1,25	1,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,18	5,2	5,04	4,82	4,64	4,72
P	Jasa Pendidikan	5,39	5,53	5,29	4,92	4,81	4,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,61	1,8	1,73	1,65	1,63	1,64
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,02	0,96	0,92	0,97	0,96	0,97
	Produk Domestik Regional Bruto	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Kota Salatiga, 2025 (Data Diolah)

Dari 4 (empat) lapangan usaha yang memiliki peranan di atas 5 (lima) persen, hanya 2 (dua) kategori yang meningkat peranannya dibandingkan dengan tahun 2020. Lapangan usaha tersebut adalah Industri Pengolahan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen.

2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Salatiga pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Salatiga tahun 2024 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 11,50 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat dari 10,92 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37 persen, lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 5,34 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 9,11 persen. Pertumbuhan pada kategori tersebut disebabkan karena semakin berkembangnya kemajuan teknologi dalam sarana komunikasi sehingga mempercepat penyampaian informasi. Pada tahun 2024, terdapat sebelas lapangan usaha yang tumbuh di atas lima persen. Sedangkan lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen. Terdapat satu kategori yang pertumbuhannya negatif, yakni kategori pertambangan dan penggalian. Hal ini terjadi karena

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

banyak penambang yang beralih profesi karena kategori tersebut cukup menjanjikan.

Sebelas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di atas 5 persen tersebut adalah: Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,11 persen, Jasa Perusahaan sebesar 8,17 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,09 persen, Konstruksi sebesar 7,07 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,73 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,65 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,45 persen, Jasa Pendidikan sebesar 6,40 persen, Pengadaan Listrik dan gas sebesar 5,95 persen, jasa Lainnya sebesar 5,67 persen, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 5,32 persen. Pertumbuhan lapangan usaha yang lainnya yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,89 persen, Industri Pengolahan sebesar 3,77 persen, Real Estate sebesar 3,71 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 2,86 persen, dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,08 persen, serta Pertambangan dan Penggalian sebesar -27,16 persen.

Tabel 2. 7. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Salatiga (persen) Tahun 2019-2024

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,18	-1,38	2,6	3,59	1,85	5,32
B	Pertambangan dan Penggalian	1,36	-1,06	-2,83	-9,97	1,72	-27,16
C	Industri Pengolahan	6,61	0,24	4,44	4,59	4,84	3,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,86	2,92	5,1	6,41	2,83	5,95
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,8	1,81	1,21	3,64	3,79	2,86
F	Konstruksi	4,05	-3,87	0,8	1,04	4,96	7,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,54	-3,76	5,36	4,05	4,48	4,89
H	Transportasi dan Pergudangan	8,26	-26,56	3,1	51	7,17	6,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,5	-6,13	4,39	14,4	11,43	6,45
J	Informasi dan Komunikasi	10,19	18,84	6,31	2,06	6,48	9,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial and Insurance Activities*	3,42	1,84	1,06	0,56	2,09	2,08
L	Real Estat	3,74	-0,13	2,13	4,9	6,29	3,71
M,N	Jasa Perusahaan	10,17	-6,85	3,22	5,66	5,75	8,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,33	-1,27	1,83	2,28	2,57	7,09
P	Jasa Pendidikan	6,58	-0,18	0,03	1,56	5,55	6,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,84	8,95	0,27	3,17	5,41	6,73
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,42	-7,09	0,61	10,93	5,45	5,67
	PDRB Lapangan Usaha	**5,9**	**-1,68**	**3,35**	**5,53**	**5,34**	**5,37**

Sumber: BPS Kota Salatiga, 2025

Kondisi ekonomi Kota Salatiga dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi wilayah ini. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diketahui dari nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi yang ada pada nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berdasarkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

nilai PDRB ADHK Kota Salatiga Tahun 2019-2024 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah ini cenderung fluktuatif. Penurunan nilai PDRB ADHK pernah terjadi hanya pada tahun 2020 yaitu sebesar -1,68%. Penurunan nilai tersebut disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 di seluruh dunia yang mengakibatkan perekonomian dunia dan nasional mengalami guncangan.

2.2.3. PDRB Per Kapita

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat juga baik. Indikator lain yang berhubungan dengan PDRB yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB per kapita adalah indikator penting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil pembangunan.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk pada satu tahun. Nilai PDRB per kapita Kota Salatiga atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 PDRB per kapita tercatat sebesar 69,14 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mencapai 59,83 juta rupiah

Peningkatan PDRB per kapita masih dipengaruhi oleh adanya faktor inflasi. Pada tahun 2020, PDRB per kapita atas dasar harga konstan mengalami penurunan dari sebelumnya menjadi 49,51 juta rupiah. Penurunan PDRB per kapita tahun 2020 tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang menghancurkan berbagai sektor ekonomi. Tahun 2021 hingga 2024 terjadi perbaikan ekonomi sehingga PDRB per kapita atas dasar harga konstan juga kembali meningkat menjadi 50,60 juta rupiah hingga 57.16 juta rupiah.

Tabel 2. 8 Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Salatiga Tahun 2019-2024 (dalam miliar rupiah)

Deskripsi	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (milyar rupiah)					
ADHB	13.271,84	14.088,91	15.381,49	16.770,34	18.079,27
ADHK 2010	9.503,71	9.822,00	10.365,44	10.918,73	11.505,05
PDRB Per Kapita					
ADHB	69.142,17	72.165,87	78.260,97	84.306,96	89.825,95
ADHK 2010	45.511,38	50.597,31	52.739,33	54.890,06	57.162,27
Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK 2020	-1,02	2,19	4,23	4,08	4,14
Jumlah Penduduk (ribu)	191,95	194,12	196,54	198,92	201,27
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)	-0,66	1,13	1,25	1,21	1,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2025 (Data Diolah)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.3 Demografis dan Sosial Budaya

2.3.1. Kependudukan

Kondisi demografi menunjukkan jumlah penduduk yang berubah pada tiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi dan penuaan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024) Kota Salatiga mengalami dinamika dalam pertambahan jumlah penduduk. Pada Tabel 2.9 menunjukkan jumlah penduduk perempuan 2000 jiwa lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Tentunya perubahan komposisi *sex ratio* akan memberikan dampak pada segala aspek kehidupan (sosial, ekonomi, budaya, dan politik), terutama dalam program penanggulangan kemiskinan. Selengkapnya tabel jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin di Kota Salatiga (Tabel 2.9).

Tabel 2. 9 Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Salatiga Tahun 2019-2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	2020	97.326	98.756	196.082	98,55
2	2021	97.382	99.058	196.440	98,30
3	2022	99.403	100.817	200.220	98,59
4	2023	99.872	101.497	201.369	98,39
5	2024	98.571	100.400	198.971	98,18

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2025 (Data Diolah)

Dinamika kependudukan di Kota Salatiga ditandai dengan naik turunnya jumlah dan sebaran penduduk di keempat kecamatan selama kurun waktu tahun 2019-2024. Dinamika tersebut disebabkan karena berbagai hal, baik migrasi masuk, keluar, maupun meninggal dunia, terutama di masa pendemi Covid 19. Kondisi dinamika persebaran penduduk tertuang dalam tabel 2.10 berikut

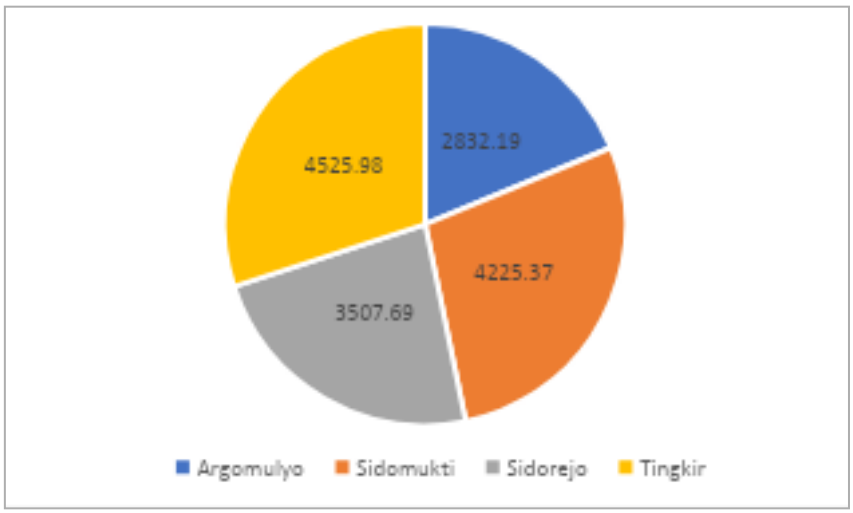
Tabel 2. 10 Data Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kota Salatiga Tahun 2019-2024

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Argomulyo	49.679	50.261	50.264	51.542	52.045	51.376
2	Tingkir	46.562	46.937	46.838	47.699	48.106	47.206
3	Sidomukti	44.710	44.162	45.054	45.764	46.125	45.634
4	Sidorejo	54.612	54.722	54.284	55.215	55.093	54.755
Kota Salatiga		**195.563**	**196.082**	**196.440**	**200.220**	**201.369**	**198.971**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Persebaran penduduk Kota Salatiga tahun 2024 tertinggi di Kecamatan Sidorejo dengan jumlah penduduk sebanyak 54.755 jiwa, Kemudian disusul Kecamatan Argomulyo sebesar 51.376 jiwa, berikutnya adalah Kecamatan Tingkir (47.206 jiwa), dan terendah ada di Kecamatan Sidomukti sebanyak 45.634 jiwa. Namun secara keseluruhan penduduk Kota Salatiga dapat dikatakan merata. Perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah administrasi (kabupaten/kota) menunjukkan kepadatan penduduk di suatu wilayah. Tingkat kepadatan penduduk berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung wilayah. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun, menunjukkan kepadatan penduduk per 3.520 per km^2 tahun 2024 .

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 2. 3 Kepadatan Penduduk per kecamatan Tahun 2024

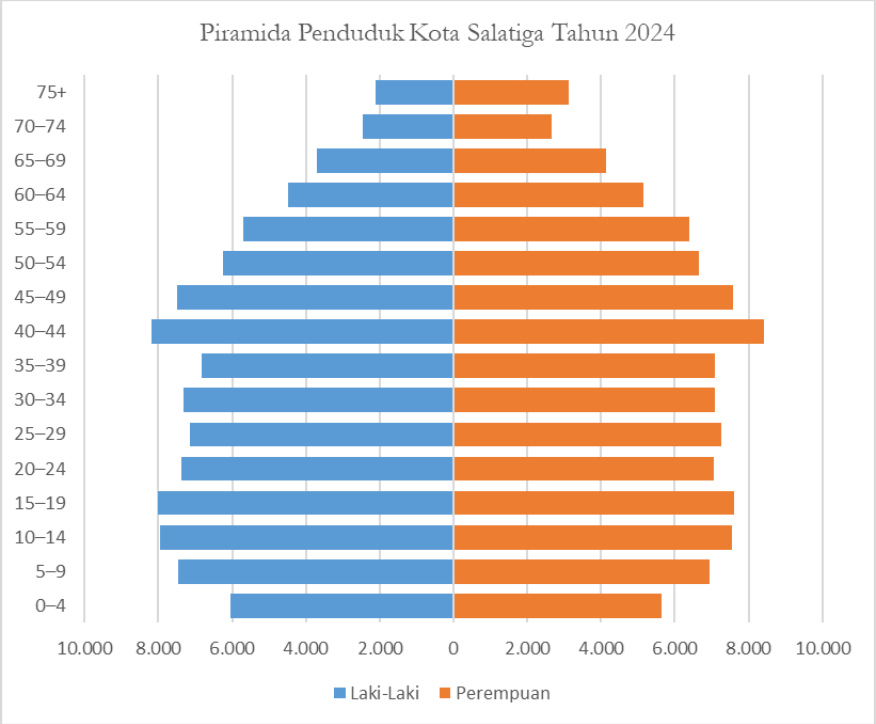
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025 (data diolah)

Wilayah yang mengalami kepadatan tertinggi yaitu 30 persen penduduk atau 4.525,98 jiwa adalah Kecamatan Tingkir dan disusul oleh Kecamatan Sidomukti sebagai wilayah kepadatan tertinggi kedua yaitu 28 persen dengan kepadatan penduduk 4.225,37 per km^2. Sedangkan Kecamatan Sidorejo 3.507,69 per km^2, dan Kecamatan Argomulyo dengan kepadatan terendah sebesar 2.832,19 km^2.

Permasalahan kemiskinan erat hubungannya dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau seseorang yang memiliki hambatan, kesulitan, dan gangguan untuk melaksanakan fungsi sosialnya. Hal tersebut membuat tidak dapat terpenuhinya kebutuhan hidupnya dengan baik dan menjadi masyarakat rentan. Oleh karena itu, perlu ada pencatatan jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia untuk ketepatan intervensi program penanggulangan kemiskinan.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk tertinggi berada pada kelompok usia 40-44 tahun sebanyak 16.614 jiwa atau sebesar 8,35 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan kelompok usia terendah yaitu kelompok usia 70-74 tahun sebanyak 5.130 jiwa atau sebesar 2,57persen dari jumlah penduduk. Data jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia tahun 2024 disajikan pada gambar berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

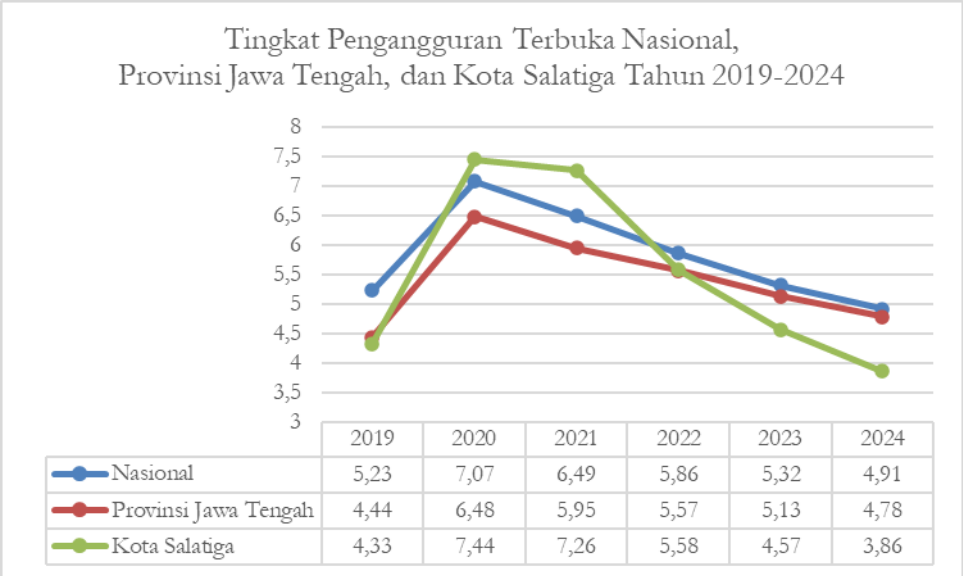


Gambar 2. 4 Piramida Penduduk Kota Salatiga Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2025 (data diolah)

2.3.2. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator ketenagakerjaan yang mendeskripsikan persentase jumlah orang yang menganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas, sesuai penetapan pemerintah) yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan. Mereka yang berada pada usia kerja namun termasuk dalam kategori pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, atau yang sudah pensiun tidak dihitung. Perbandingan TPT Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tersaji pada gambar berikut.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91
Provinsi Jawa Tengah	4,44	6,48	5,95	5,57	5,13	4,78
Kota Salatiga	4,33	7,44	7,26	5,58	4,57	3,86

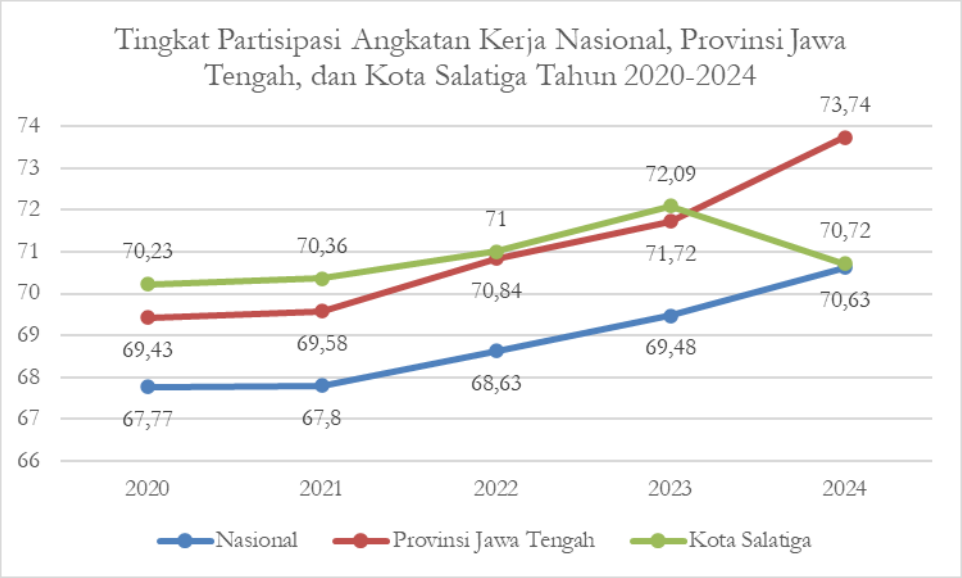
Gambar 2. 5. Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Salatiga Tahun 2019-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (Data Diolah)

Capaian TPT Kota Salatiga Tahun 2024 sebesar 3,86 persen menunjukkan trend kinerja positif penurunan angka pengangguran apabila dibandingkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,57 persen (2023); 5,58 persen (2022); 7,26 persen (2021); dan 7,44 persen (2020). Kondisi tahun 2020 ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 (4,33 persen), yang disebabkan karena kondisi pandemi Covid 19. Apabila dibadingkan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional dalam penurunan angka penangguran, Kota Salatiga mempunyai kinerja yang berada diatas provinsi maupun nasional, dengan capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,78 persen dan Nasional sebesar 4,91 persen.



Gambar 2. 6. Perkembangan TPAK Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (persen)

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Capaian TPAK Kota Salatiga Tahun 2024 sebesar 70,72 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 72,09 persen. Capaian Kota Salatiga tahun 2024 berada di atas capaian nasional sebesar 70,63 persen, akan tetapi berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,74 persen. Hal ini memerlukan perhatian serius terutama berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pencari kerja di Kota Salatiga. Tren menurun terjadi pada tahun 2024 karena adanya lapangan usaha yang mengalami kerugian yang secara langsung berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang melambat akan berpengaruh pada partisipasi pencari pekerjaan, atau keluar dari kelompok angkatan kerja.

2.3.3. Sosial

Masalah kesejahteraan sosial masyarakat merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan juga potensi terhadap kerentanan kemiskinan. Jumlah penduduk yang besar memberikan kecenderungan timbulnya masalah sosial, seperti anak terlantar, wanita rawan sosial, penyandang disabilitas, hingga tuna susila. Terdapat juga permasalahan sosial yang berasal dari keluarga yang berumah tangga tak layak huni dan keluarga fakir miskin.

Kondisi sosial berhubungan pada kerentanan sosial terkait dengan kepadatan penduduk dan kelompok rentan. Kelompok masyarakat rentan dalam kondisi kemiskinan merupakan perempuan terutama remaja perempuan, perempuan hamil, perempuan menyusui, anak, penyandang disabilitas dan lanjut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

usia. Kelompok rentan ini membutuhkan perlakuan dan perlindungan khusus agar kelompok rentan mampu bertahan menghadapi situasi kemiskinan. Kondisi sosial antara lain ditunjukkan melalui berbagai informasi, antara lain kondisi dan sebaran penerima bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2024, di Kota Salatiga terdapat 4251 Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), dengan sebaran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 11. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Tiap Kelurahan di Kota Salatiga Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah KPM (orang)	No	Kelurahan	Jumlah KPM (orang)
1	Argomulyo	**1.156**	1	Cebongan	129
			2	Kumpulrejo	269
			3	Ledok	185
			4	Noborejo	179
			5	Randuacir	200
			6	Tegalrejo	194
2	Tingkir	**919**	1	Gendongan	104
			2	Kalibening	80
			3	Kutowinangun Kidul	125
			4	Kutowinangun Lor	235
			5	Sidorejo Kidul	193
			6	Tingkir Lor	103
			7	Tingkir Tengah	79
3	Sidomukti	**910**	1	Dukuh	325
			2	Kalicacing	117
			3	Kecandran	179
			4	Mangunsari	289
4	Sidorejo	**1.266**	1	Blotongan	289
			2	Bugel	100
			3	Kauman Kidul	117
			4	Pulutan	147
			5	Salatiga	301
			6	Sidorejo Lor	312
Kota Salatiga		**4.251**			**4.251**

Sumber: Dinas Sosial Kota Salatiga, 2025

Selain itu terkait dengan kondisi sosial, keberadaan informasi atau data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merujuk pada informasi tentang individu, keluarga, atau kelompok yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan memerlukan bantuan sosial. Data ini digunakan untuk menentukan target penerima bantuan sosial, perencanaan program, dan evaluasi program kesejahteraan sosial. Jumlah dan sebaran data PPKS Kota Salatiga pada tahun 2024, sebanyak 11.933 orang dengan rincian 3.360 orang PPKS Bukan Fakir Miskin, dan 8.573 orang PPKS Fakir Miskin. Sebaran total PPKS Bukan Fakir Miskin (PPKS Non Fakir Miskin) tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2. 12. Jumlah PPKS Bukan Fakir Miskin (Pendataan Per Individu) Kota Salatiga Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Kecamatan	Jumlah (orang)	No	Kelurahan	Jumlah (orang)
1	Argomulyo	1.382	1	Cebongan	150
			2	Kumpulrejo	353
			3	Ledok	294
			4	Noborejo	147
			5	Randuacir	213
			6	Tegalrejo	225
2	Tingkir	608	1	Gendongan	66
			2	Kalibening	73
			3	Kutowinangun Kidul	64
			4	Kutowinangun Lor	83
			5	Sidorejo Kidul	139
			6	Tingkir Lor	83
			7	Tingkir Tengah	100
3	Sidomukti	908	1	Dukuh	306
			2	Kalicacing	148
			3	Kecandran	119
			4	Mangunsari	335
4	Sidorejo	462	1	Blotongan	66
			2	Bugel	73
			3	Kauman Kidul	64
			4	Pulutan	83
			5	Salatiga	139
			6	Sidorejo Lor	83
Kota Salatiga		**3.360**			**3.360**

Sumber: Dinas Sosial Kota Salatiga, 2025

Berdasarkan data pada tabel tersebut, agihan berdasarkan kecamatan dapat diketahui jumlah PPKS tanpa PPKS fakir Miskin terbanyak di Kecamatan Argomulyo sebesar 1.382 orang, dan yang paling sedikit di Kecamatan Sidorejo sebesar 462 orang. Selain PPKS Tanpa Kategori Fakir Miskin (PPKS Non Fakir Miskin), dalam kaitan dengan penanggulangan kemiskinan, identifikasi juga dilakukan terhadap PPKS Kategori Fakir Miskin. Pada Tahun 2024, jumlah PPKS Kategori Fakir Miskin diidentifokasikan sebanyak 8.573 orang, dengan agihan/sebaran sebagaimana Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2. 13. Jumlah PPKS Fakir Miskin (Pendataan Per Individu) Kota Salatiga Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah (orang)	No	Kelurahan	Jumlah (orang)
1	Argomulyo	**2.172**	1	Cebongan	254
			2	Kumpulrejo	477
			3	Ledok	328
			4	Noborejo	532
			5	Randuacir	301
			6	Tegalrejo	280
2	Tingkir	**2.877**	1	Gendongan	133
			2	Kalibening	209
			3	Kutowinangun Kidul	588
			4	Kutowinangun Lor	885

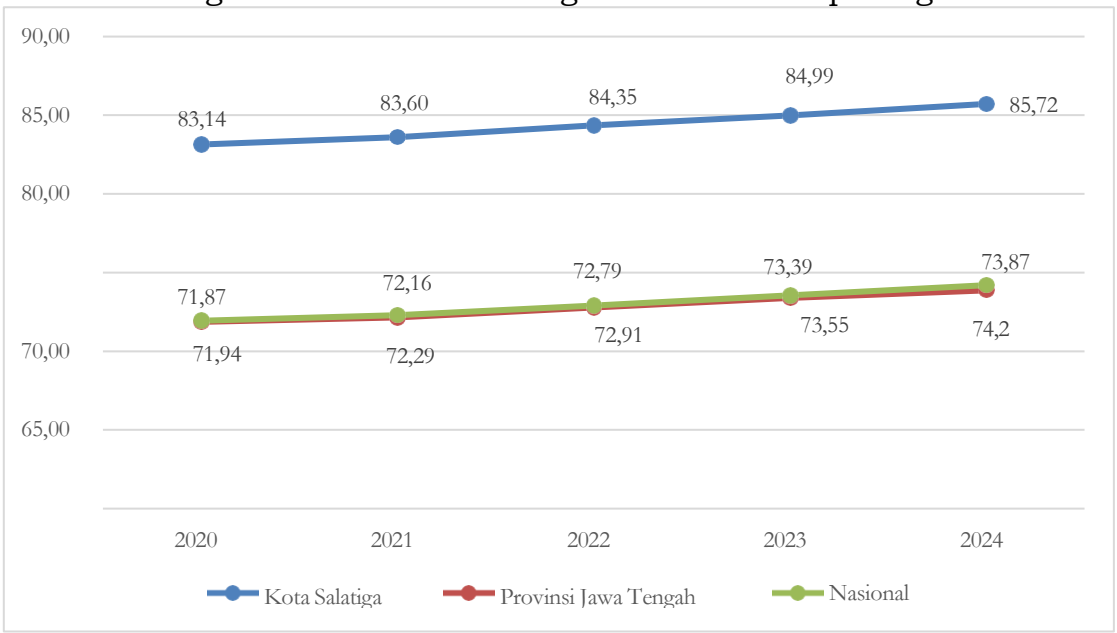
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

			5	Sidorejo Kidul	521
			6	Tingkir Lor	421
			7	Tingkir Tengah	120
3	Sidomukti	**1.447**	1	Dukuh	280
			2	Kalicacing	160
			3	Kecandran	392
			4	Mangunsari	615
4	Sidorejo	**2.077**	1	Blotongan	467
			2	Bugel	86
			3	Kauman Kidul	96
			4	Pulutan	318
			5	Salatiga	454
			6	Sidorejo Lor	656
Kota Salatiga		**8.573**			**8.573**

Sumber: Dinas Sosial Kota Salatiga, 2025

Selain kondisi penerima bantuan sosial, dinamika kesejahteraan sosial dapat diidentifikasi melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Capaian IPM Kota Salatiga selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2019-2024. Pada Tahun 2021 IPM Kota Salatiga sebesar 83,60, indeks pembangunan manusia meningkat 0,46 dari tahun 2020 sebesar 83,14. Perlambatan capaian IPM sangat dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan capaian IPM Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka IPM Kota Salatiga selama lima tahun terakhir selalu berada di atas capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

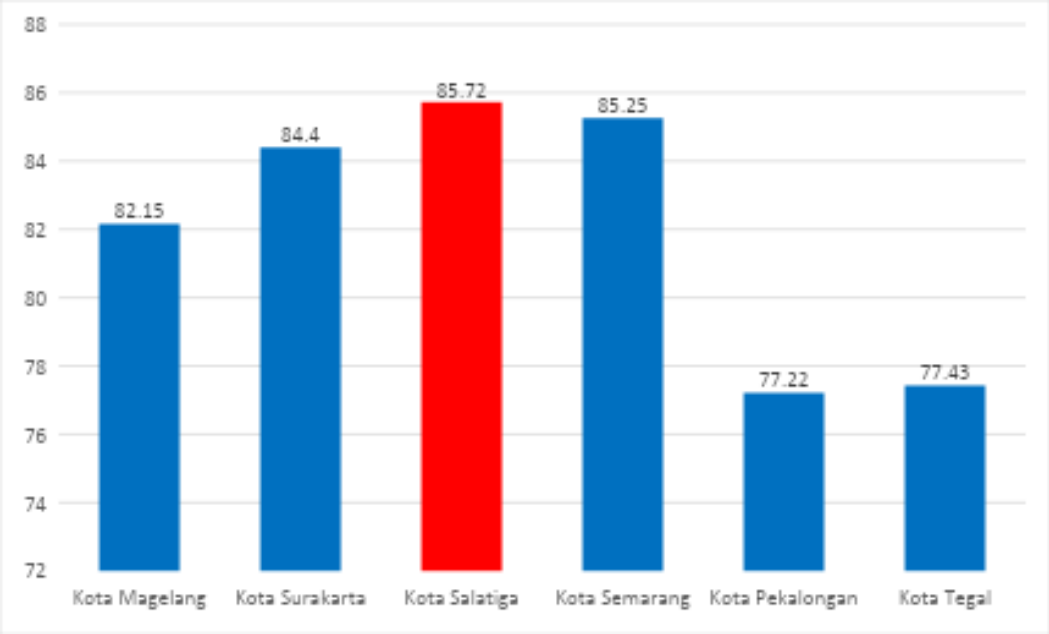


Gambar 2. 7. Capaian IPM Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2025

Capaian IPM Kota Salatiga pada tahun 2024 sebesar 85,72 menunjukkan hasil yang baik, yaitu berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, bahkan apabila dibandingkan dengan dengan kota lain di Jawa Tengah menduduki posisi tertinggi, selengkapnya dapat dilihat pada gambar bawah ini.



Gambar 2. 8. Posisi Relatif IPM Kota Salatiga dibandingkan dengan Kota Lain di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi dasar tersebut diukur dengan empat komponen IPM yaitu usia harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Perkembangan komponen IPM Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel berkut

Tabel 2. 14. Komponen IPM Kota Salatiga Tahun 2019-2024

No	Komponen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Usia Harapan Hidup saat lahir	77,22	77,4	77,55	77,72	77,93	78.26
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,34	15,41	15,42	15,43	15,44	15.46
3.	Rata-rata Lama Sekolah	10,41	10,42	10,66	10,95	11,24	11.48
4.	Pengeluaran Riil Perkapita (ribu Rp)	15.944	15.699	15.843	16.351	16.650	17.096
IPM Kota Salatiga		83.12	83,14	83,6	84,35	84,99	85,72

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB III
PROFIL KEMISKINAN KOTA SALATIGA

3.1 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan sosial dan ekonomi seseorang atau sekelompok orang untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Definisi kemiskinan yang dipergunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yakni kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2024). Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Adapun Garis Kemiskinan (GK) menurut BPS mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lainnya). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

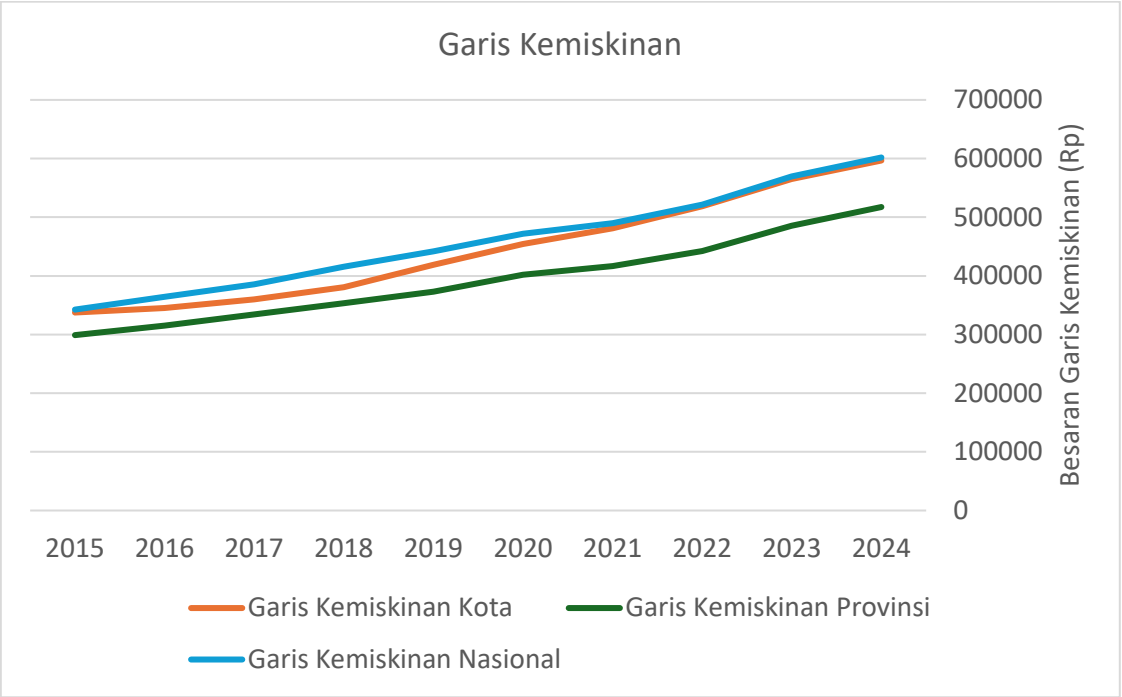
Selain garis kemiskinan, BPS juga menggunakan Persentase Penduduk Miskin (*Head Count Index (HCI-P0)*) yang merupakan persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (BPS, 2024). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

3.2 Indikator Kemiskinan Makro

3.2.1 Garis Kemiskinan Kota Salatiga

Garis kemiskinan adalah penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Penduduk yang mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan diklasifikasikan atau dikategorikan sebagai penduduk miskin (BPS, 2024). Selama periode tahun 2015-2024, garis kemiskinan Kota Salatiga mengalami kenaikan. Sementara analisis perkembangan antar waktu perkembangan garis kemiskinan Kota Salatiga di tahun 2015 kurang dari 400.000, kemudian menjadi lebih dari 500.000 di tahun 2024. Adapun analisis efektifitas garis kemiskinan Kota Salatiga cenderung naik, dimana kenaikan selama rentang waktu tersebut mencapai lebih dari Rp100.000. Secara lengkap, garis kemiskinan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat ada grafik berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 3. 1. Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2015-2024

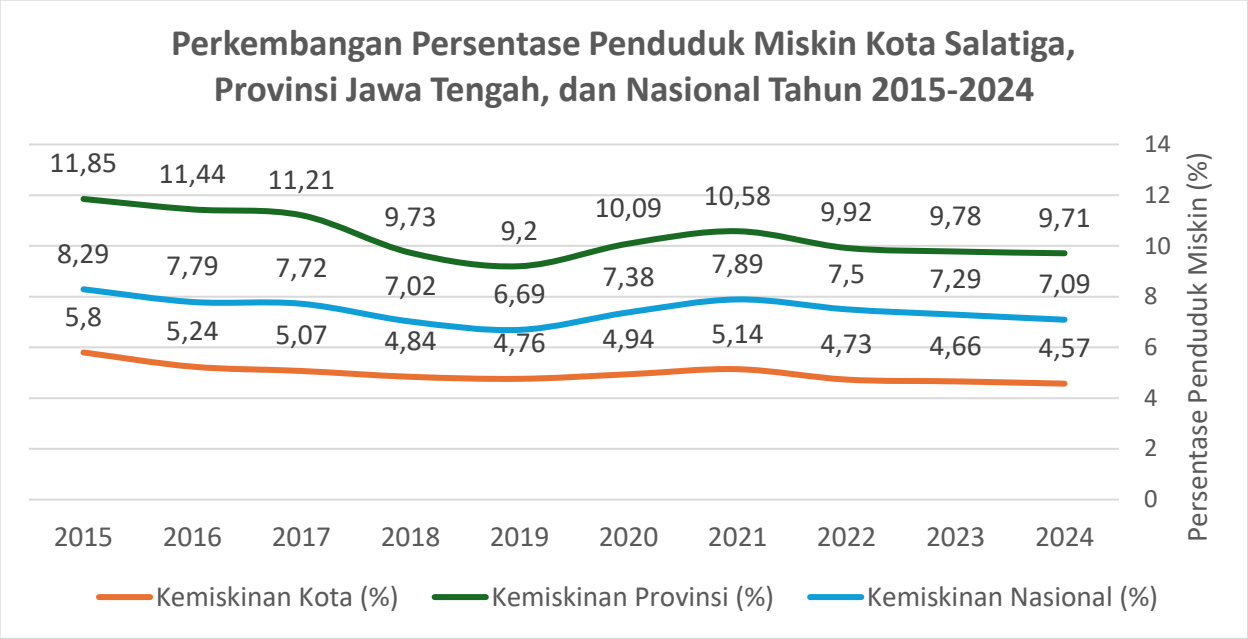
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan grafik garis kemiskinan tahun 2015-2024, dapat diketahui bahwa garis kemiskinan Kota Salatiga pada periode tersebut selalu berada di di atas rata-rata garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Apabila dibandingkan dengan garis kemiskinan nasional secara umum, besaran garis kemiskinan Kota Salatiga ada di bawah garis kemiskinan nasional. Namun, seiring waktu besaran garis kemiskinan Kota Salatiga semakin mendekati besaran garis kemiskinan nasional.

3.2.2 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin (P0)

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan digunakan sebagai batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Kota Salatiga merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Tengah dan memiliki berbagai upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang baik bersumber dari APBN, ABPD Provinsi maupun APBD Kota Salatiga sendiri. Program-program yang diberikan berhasil mendorong penurunan persentase penduduk miskin di Kota Salatiga dari tahun 2015-2024. Berikut persebaran persentase penduduk miskin Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan nasional selama periode 2015-2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 3. 2. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2015-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Sepanjang rentang waktu 10 tahun sejak 2015-2024, persentase penduduk miskin di Kota Salatiga selalu mengalami penurunan. Namun, pada periode tahun 2019-2021 mengalami kenaikan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda global dan sangat berdampak pada berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. Jika pada tahun 2019 persentase penduduk miskin sebesar 4,76 persen; maka di tahun 2020 meningkat menjadi 4,94 persen dan kembali meningkat menjadi 4,94 persen di tahun 2021. Bilamana dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, terlihat persentase penduduk miskin Kota Salatiga selalu rendah selama kurun waktu 10 tahun terakhir.

3.2.3 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk menopang kelangsungan hidupnya (BPS, 2024). Ini meliputi kebutuhan akan makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, serta akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Pengukuran kemiskinan ekstrem umumnya menggunakan ukuran kemiskinan absolut yang konsisten antar negara dan antar waktu. Bank Dunia merevisi garis kemiskinan ekstrem dari US1,90 menjadi US2,15 per kapita per hari (menggunakan *Purchasing Power Parity*/PPP tahun 2017) (World Bank, 2024). Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung jumlah dan angka kemiskinan ekstrem setiap tahunnya berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) (BPS, 2024).

Tabel 3. 1 Tingkat dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023

No	Kode	Nama Daerah	Estimasi Jumlah Kemiskinan (ribu jiwa)	Estimasi Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

			2021*	2022*	2023**	2021*	2022*	2023**
1	**3300**	**Provinsi Jawa Tengah**	**795,51**	**689,71**	**391,92**	**2,28**	**1,97**	**1,11**
2	3301	Cilacap	20,7	37,96	21,79	1,2	2,19	1,25
3	3302	Banyumas	63,53	23,91	13,07	3,72	1,39	0,76
4	3303	Purbalingga	17,23	20,84	11,25	1,83	2,19	1,18
5	3304	Banjarnegara	36,59	14,23	14,01	3,95	1,53	1,5
6	3305	Kebumen	52,84	65,86	29,74	4,42	5,51	2,49
7	3306	Purworejo	9,08	7,74	9,75	1,27	1,08	1,36
8	3307	Wonosobo	26,54	38,73	12,58	3,36	4,89	1,59
9	3308	Magelang	28,5	29,95	18,11	2,19	2,29	1,37
10	3309	Boyolali	18,42	5,36	1,96	1,87	0,54	0,2
11	3310	Klaten	24,3	26,19	14,77	2,07	2,23	1,26
12	3311	Sukoharjo	10,51	3,26	6,74	1,17	0,36	0,74
13	3312	Wonogiri	19,35	16,15	3,04	2,02	1,69	0,32
14	3313	Karanganyar	13,99	17,53	2,85	1,57	1,95	0,31
15	3314	Sragen	25,96	20,96	13,85	2,92	2,36	1,55
16	3315	Grobogan	25,54	31,74	3,16	1,85	2,29	0,23
17	3316	Blora	11,29	23,91	1,98	1,31	2,76	0,23
18	3317	Rembang	23,86	24,48	11,22	3,72	3,79	1,73
19	3318	Pati	29,5	10,86	15,61	2,34	0,86	1,23
20	3319	Kudus	8,84	5,64	3,91	1	0,63	0,43
21	3320	Jepara	8,84	23,59	17,12	0,69	1,82	1,31
22	3321	Demak	37,73	25,59	16,82	3,21	2,16	1,41
23	3322	Semarang	7,43	12,88	4,16	0,69	1,19	0,38
24	3323	Temanggung	16,1	7,51	2,58	2,07	0,96	0,33
25	3324	Kendal	17,8	22,59	6,28	1,82	2,3	0,64
26	3325	Batang	23	12,09	16,16	2,97	1,55	2,06
27	3326	Pekalongan	20,49	18,75	10,86	2,27	2,07	1,19
28	3327	Pemalang	59,88	36,17	23,9	4,61	2,78	1,84
29	3328	Tegal	12,87	10,56	3,48	0,9	0,73	0,24
30	3329	Brebes	82,43	72,22	75,59	4,56	3,99	4,17
31	3371	Kota Magelang	1,22	0,16	0	1	0,13	0
32	3372	Kota Surakarta	18,33	4,19	0,73	3,53	0,81	0,14
33	3373	Kota Salatiga	3,05	2,11	0,76	1,55	1,06	0,37
34	3374	Kota Semarang	7,8	11,55	0	0,42	0,61	0
35	3375	Kota Pekalongan	7,18	2,07	3,56	2,32	0,67	1,13
36	3376	Kota Tegal	4,81	2,39	0,56	1,93	0,95	0,22

Keterangan

* : Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

** : Estimasi dihitung oleh Satgas data P3KE

Sumber: Kemenko PMK, 2024

Penentuan persentase dan jumlah penduduk miskin Kota Salatiga merujuk pada metode perhitungan dari BPS pada tahun 2021, 2022, dan 2024, dan Satgas P3KE pada tahun 2023. Pada tahun 2024, BPS kembali mengeluarkan estimasi angka kemiskinan ekstrem sebagaimana tabel 3.2 berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 3. 2 Persentase Kemiskinan Esktrem Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah per Maret 2024

Kabupaten/ Kota	Nilai Estimasi P0 Ekstrem	Kabupaten/Kota	Nilai Estimasi P0 Ekstrem
Cilacap	1,28	Kudus	0,28
Banyumas	1,02	Jepara	0,84
Purbalingga	1,17	Demak	1,22
Banjarnegara	1,09	Semarang	0,32
Kebumen	1,26	Temanggung	0,44
Purworejo	1,4	Kendal	0,49
Wonosobo	1,26	Batang	0,4
Magelang	1,28	Pekalongan	0,51
Boyolali	0,84	Pemalang	0,92
Klaten	0,67	Tegal	0,87
Sukoharjo	0,42	Brebes	0,75
Wonogiri	0,81	Kota Magelang	0,61
Karanganyar	0,39	Kota Surakarta	0,81
Sragen	2,27	Kota Salatiga	0,34
Grobogan	0,89	Kota Semarang	0,31
Blora	0,89	Kota Pekalongan	0,38
Rembang	3,18	Kota Tegal	0,68
Pati	0,61		

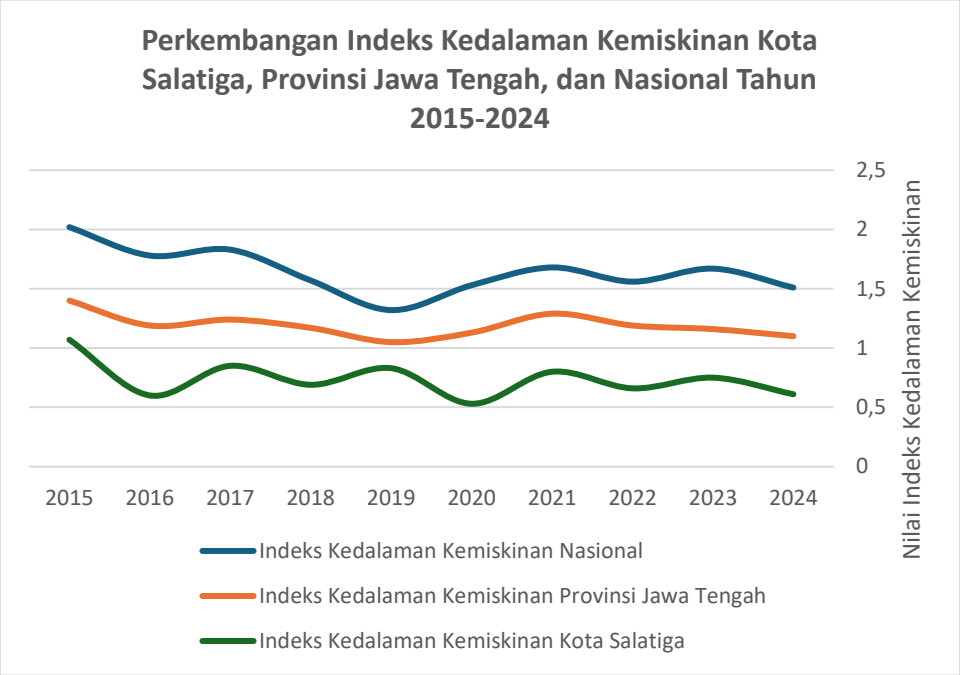
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Angka kemiskinan tersebut sifatnya estimasi, dan bukan merupakan angka resmi statistik kemiskinan. Angka tersebut dihitung khusus sebagai rujukan internal bagi pemerintah daerah, terutama sebagai alat bantu dalam melakukan identifikasi dan evaluasi capaian upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) tingkat Kabupaten/Kota. Estimasi angka kemiskinan ekstrem tingkat Kabupaten/Kota dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan dan pengalokasian anggaran PPKE berdasar wilayah kabupaten/kota.

3.2.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* - P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (BPS, 2024). Semakin tinggi P1 semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Salatiga selama kurun waktu 2015-2024 cenderung fluktuatif. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2015 adalah 1,07 lalu turun menjadi 0,6 di tahun 2016. Pada tahun 2017 mencapai 0,85 serta mengalami penurunan kembali menjadi 0,69 di tahun 2018. Kenaikan tertinggi terjadi di kurun waktu 2020-2021 yang mana terjadi kenaikan skor sebesar yaitu 0,27. Selengkapnya dapat diihat pada grafik Indeks Kedalam Kemiskinan (P1) berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 3. 3. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2015-2024

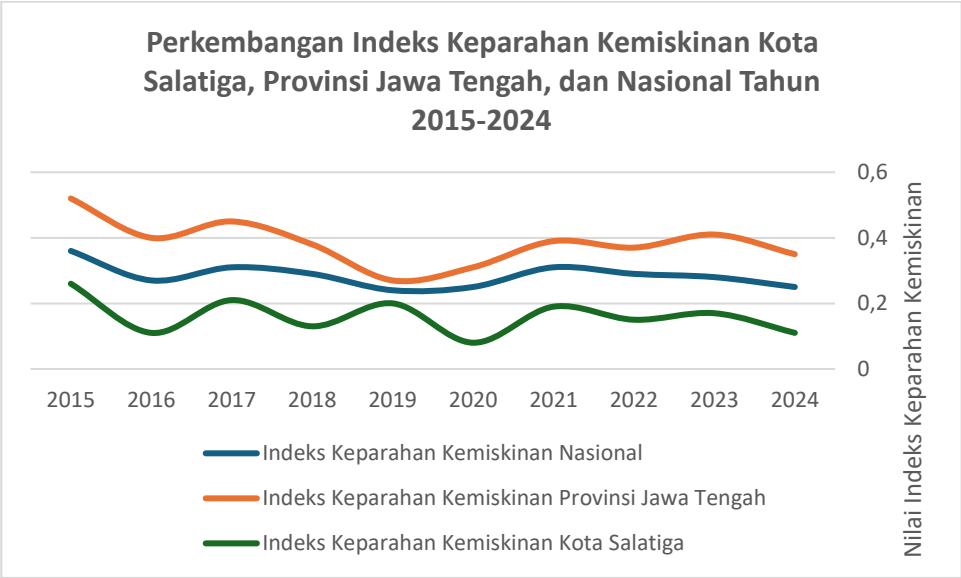
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Salatiga cenderung fluktuatif dari tahun 2015-2024. Pada tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Salatiga lebih rendah. Kondisi perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Salatiga cenderung lebih fluktuatif dibanding Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Secara keseluruhan, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Salatiga masih berada dibawah Indeks Kemiskinan Provinsi dan Nasional selama 10 terakhir yaitu 2015-2024.

3.2.5 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Salatiga pada tahun 2015 sebesar 0,26, kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi 0,11 di tahun 2016 dan kembali naik menjadi 0,21 di tahun 2017. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,12, dari 0,2 di tahun 2019 menjadi 0,08 di tahun 2020. Kemudian terakhir skor P2 Kota Salatiga di tahun 2024 sebesar 0,11. Selengkapnya dapat dilihat grafik Indeks Keparahan Kemiskinan berikut ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 3. 4. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2015-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Salatiga lebih fluktuatif setiap tahunnya. Hal yang berbeda terjadi di tahun 2020 yang mana tren Indeks Keparahan Kemiskinan yang terjadi pada Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mengalami penurunan namun pada Kota Salatiga mengalami kenaikan. Secara keseluruhan selama kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu periode tahun 2015-2024, Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Salatiga selalu di bawah Indeks Keparahan Kemiskinan provinsi dan nasional. Artinya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kota Salatiga lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional.

3.2.6 Analisis Keterkaitan Kondisi Kemiskinan (P0, P1, & P2)

Analisis keterkaitan digunakan sebagai tindakan untuk evaluasi akibat dari suatu program atau kegiatan terhadap *outcome* yang telah dihasilkan. Analisis keterkaitan dapat mengetahui apakah capaian yang dihasilkan itu disebabkan dari intervensi kebijakan pemerintah melalui pelaksanaan program atau kegiatan atau bukan. Berdasarkan beberapa analisis yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat diartikan bahwa persentase penduduk miskin Kota Salatiga lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Begitu juga pada Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan lebih rendah jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Artinya bahwa kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di Kota Salatiga jauh lebih rendah dibanding provinsi dan nasional.

3.3 Kemiskinan Mikro

Salah satu capaian kinerja penanggulangan kemiskinan Kota Salatiga pada tahun 2024 adalah dengan selesainya proses padupadan antara data P3KE dengan data DTKS, dan juga dengan data kependudukan. Padupadan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemberian dan penetapan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor: 000.7.2/270/2024 Tahun tentang Data Kemiskinan Kota Salatiga. Proses tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penentuan lokasi prioritas dengan berdasarkan pada jumlah penduduk miskin maupun berdasarkan pada variabel yang terdapat pada data P3KE dan hasil padupadan P3KE dan Data DTKS..

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Persebaran penduduk miskin di suatu wilayah dapat menjadi gambaran bagaimana kondisi hidup masyarakatnya dari sisi ekonomi. Agar mempermudah dalam mengetahui persebarannya, data-data terkait jumlah penduduk miskin di suatu wilayah dipaparkan dalam bentuk peta. Selain memudahkan dalam melihat dan mengetahui persebarannya, adanya peta ini juga mempersingkat waktu yang diperlukan dalam proses *decision making* pembuatan program-program yang berkaitan dengan pemberantasan kemiskinan di setiap daerah.

Potret kemiskinan dilakukan dengan melakukan identifikasi jumlah penduduk miskin berdasarkan padupadan data P3KE Tahun 2023 dan Data DTKS Tahun 2023. Proses padupadan dilakukan mulai Februari 2024 sampai dengan Juni 2024, dengan melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, unsur kelurahan di Kota Salatiga maupun mitra lembaga yang berkaitan dengan permasalahan sosial.

Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Miskin (Hasil padupadan Data P3KE Tahun 2023 dan DTKS)

Kecamatan/ Kelurahan	**Jumlah Penduduk Miskin (hasil padupadan 2023)**				
	P2	P3	P4	P5	Total
Argomulyo	**19**	**690**	**727**		
Cebongan	1	85	77		163
Kumpulrejo	7	158	154		319
Ledok	3	104	133		240
Noborejo	1	176	182		359
Randuacir	4	84	108		196
Tegalrejo	3	83	73		159
Sidomukti	**5**	**450**			
Dukuh	2	83	146		231
Kalicacing	1	50	38		89
Kecandran	0	124	149		273
Mangunsari	2	193	214		409
Sidorejo	**7**	**622**	**380**		
Blotongan	1	149	128		278
Bugel	0	24	20		44
Kauman Kidul	1	33	20		54
Pulutan	0	98	119		217
Salatiga	3	134	35		172
Sidorejo Lor	2	184	58		244
Tingkir	**29**	**693**	**646**		
Gendongan	0	43	8		51
Kalibening	2	58	63		123
Kutowinangun Kidul	4	133	80		217
Kutowinangon Lor	21	201	139		361
Sidorejo Kidul	1	133	226		360
Tingkir Lor	0	92	109		201
Tingkir Tengah	1	33	21		55

Sumber: Bappeda, Hasil Padupadan P3KE dan DTKS, (2024)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kondisi kemiskinan mikro yang merujuk pada hasil padupadan data DTKS Tahun 2024 dan P3KE 2023 yang dilakukan pada tahun 2024 mengidentifikasikan kondisi kemiskinan mikro berdasarkan 14 (empat belas) variabel kemiskinan yang berkaitan dengan infrastruktur dasar. Data tersebut terdapat dalam padupadan P3KE dan DTKS yang selanjutnya diuraikan dan divisualisasikan berdasarkan variabel-variabel tersebut.

1. Variabel Kepemilikan Bangunan

Status kepemilikan bangunan memberikan kejelasan dan kepastian terkait kepemilikan bangunan yang berdiri. Berdasarkan olahan data terkait status kepemilikan bangunan per kelurahan di setiap kecamatan di Kota Salatiga, diperoleh data berdasarkan pada: milik sendiri, bebas sewa, dinas, kontrak/sewa, dan lainnya.

Tabel 3. 4 Data Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Status kepemilikan Bangunan Tahun 2024

Kecamatan/ Kelurahan	Status Bangunan				
	Milik Sediri	Bebas Sewa	Dinas	Kontrak Sewa	Lainnya
Argomulyo					
Cebongan	122	28	0	6	7
Kumpulrejo	270	9	0	1	39
LedoK	171	18	0	29	22
Noborejo	313	17	0	1	28
Renduacir	183	7	0	0	66
Tegalrejo	114	19	1	4	21
Sidomukti					
Dukuh	203	14	0	10	4
Kalicacing	44	26	0	12	7
Kecandran	257	14	0	1	1
Mangunsari	313	66	0	25	5
Sidorejo					
Blotongan	219	35	0	12	12
Bugel	37	3	0	3	1
Kauman Kidul	40	8	0	3	3
Pulutan	183	24	1	2	7
Salatiga	93	49	0	17	13
Sidorejo Lor	112	87	0	21	23
Tingkir					
Gendongan	4	31	0	12	4
Kalibening	103	17	0	2	1
Kutowinangun Kidur	112	35	1	16	53
Kutowinangun Lor	223	72	0	35	31
Sidorejo Kidul	302	23	0	17	18
Tingkir Lor	170	25	0	2	4
Tingkr Tengah	40	11	0	2	2

Sumber: Bappeda, Hasil Padupadan P3KE dan DTKS, (2024)

2. Variabel Status Kepemilikan Lahan

Status kepemilikan lahan memberikan kejelasan dan kepastian kepada badan hukum serta publik terkait kepemilikan lahan yang ada. Berdasarkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

olahan data terkait status kepemilikan lahan per kelurahan di setiap kecamatan di Kota Salatiga, diperoleh hasil berupa pembobotan yang didasarkan pada: milik sendiri, milik orang lain, tanah negara, dan lainnya.

Tabel 3. 5 Data Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Status kepemilikan Lahan Tahun 2024

Kecamatan/ Kelurahan	Status Lahan			
	Milik Sediri	Milik Orang Lain	Tanah Negara	Lainnya
Argomulyo				
Cebongan	121	19	0	23
Kumpulrejo	254	30	8	27
LedoK	170	38	2	30
Noborejo	312	5	1	41
Renduacir	182	6	1	7
Tegalrejo	111	14	8	26
Sidomukti				
Dukuh	202	23	0	6
Kalicacing	52	28	1	8
Kecandran	258	13	0	2
Mangunsari	309	72	18	10
Sidorejo				
Blotongan	211	51	2	14
Bugel	36	4	2	2
Kauman Kidul	44	6	2	2
Pulutan	173	1	8	1
Salatiga	95	45	1	31
Sidorejo Lor	102	78	6	58
Tingkir				
Gendongan	4	17	0	30
Kalibening	102	14	0	7
Kutowinangun Kidur	120	34	1	62
Kutowinangun Lor	216	92	5	48
Sidorejo Kidul	291	40	12	17
Tingkir Lor	170	14	1	16
Tingkir Tengah	38	13	0	4

Sumber: Bappeda Hasil Padupadan P3KE dan DTKS, (2024)

3. Variabel Jenis Lantai Terluas

Jenis lantai terluas di suatu rumah dapat menjadi salah satu faktor penilai kondisi ekonomi keseluruhan sebuah rumah tangga. Semakin bagus bahan lantai yang digunakan, maka kondisi ekonomi rumah tangga tersebut juga semakin baik. Berdasarkan olahan data terkait jenis lantai terluas per kelurahan di setiap kecamatan di Kota Salatiga, diperoleh hasil berupa pembobotan yang didasarkan pada jenis-jenis lantai yang digunakan dalam rumah tangga, yakni bambu, kayu/ papan kualitas tinggi, kayu/ papan kualitas rendah, keramik, marmer/ granit, parket/ vinyl/ permadani, semen/ bata merah, tanah, dan ubin/ tegel/ teraso.

Tabel 3. 6 Data Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Jenis Lantai Terluas Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kecamatan/ Kelurahan	Status Bangunan								
	Bumbu	Kayu/ Papan Kualitas Tinggi	Kayu/ Papan Kualitas Rendah	Keramik	Marmer/ Granit	Parket/ Vinil/ Permadani	Semen /Bata Merah	Tanah	Ubin/ Tegel/ Teraso
Argomulyo									
Cebongan	0	0	0	66	0	7	76	4	10
Kumpulrejo	2	0	0	88	0	26	168	20	14
LedoK	0	0	1	125	2	3	38	18	53
Noborejo	0	0	0	139	1	32	112	8	67
Renduacir	2	0	0	75	0	13	76	8	22
Tegalrejo	0	0	0	80	2	3	46	9	19
Sidomukti									
Dukuh	1	0	5	92	2	10	80	7	34
Kalicacing	0	1	0	34	0	7	25	5	17
Kecandran	0	1	0	114	3	11	57	11	61
Mangunsari	1	1	1	178	1	15	146	27	39
Sidorejo									
Blotongan	0	1	1	121	0	8	103	10	34
Bugel	0	1	0	13	0	10	10	3	5
Kauman Kidul	0	0	0	21	1	0	27	0	5
Pulutan	0	1	0	102	3	7	56	4	10
Salatiga	0	2	1	85	0	5	58	1	20
Sidorejo Lor	0	2	0	71	0	18	85	5	63
Tingkir									
Gendongan	0	0	0	15	0	0	26	0	10
Kalibening	0	2	0	49	0	2	36	19	15
KutowinangunKidur	0	0	0	85	0	9	82	11	30
Kutowinangun Lor	2	2	1	142	2	37	129	13	33
Sidorejo Kidul	0	0	0	196	4	11	83	35	31
Tingkir Lor	0	0	1	76	0	7	86	11	20
Tingkir Tengah	0	0	0	20	0	2	24	7	2

Sumber: BAPPEDA, Hasil Padupadan P3KE dan DTKS, (2024)

4. Variabel Jenis Dinding Terluas

Jenis dinding terluas di suatu rumah dapat menjadi salah satu faktor penilai kondisi ekonomi keseluruhan sebuah rumah tangga. Semakin bagus bahan dinding yang digunakan, maka kondisi ekonomi rumah tangga tersebut juga semakin baik. Berdasarkan olahan data terkait jenis dinding terluas per kelurahan di setiap kecamatan di Kota Salatiga, diperoleh hasil berupa pembobotan yang didasarkan pada jenis-jenis dinding yang digunakan dalam rumah tangga, yakni: anyaman bambu, asbes, bambu, batang kayu, GRC/kalsiboard, kayu, papan berkualitas rendah, seng, tembok, dan lainnya.

Tabel 3. 7 Data Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Jenis Dinding Terluas Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kecamatan/ Kelurahan	Jenis Dinding Terbatas									
	Anyaman Bambu	Asbes	Bambu	Batang Kayu	GRC/ Kalsiboard	Kayu	Papan Kualitas Rendah	Seng	Tembok	Lainnya
Argomulyo										
Cebongan	0	0	0	1	0	7	0	0	155	0
Kumpulrejo	2	0	1	1	0	8	1	0	306	0
Ledok	5	0	0	6	4	7	0	0	218	0
Noborejo	0	0	0	1	0	7	0	0	351	0
Renduacir	2	0	0	1	0	3	2	0	188	0
Tegalrejo	0	0	0	3	0	6	2	0	148	0
Sidomukti										
Dukuh	8	0	0	0	0	8	1	0	214	0
Kalicacing	1	0	0	1	0	16	1	0	70	0
Kecandran	1	0	0	1	0	6	0	0	250	0
Mangunsari	2	0	0	2	1	32	1	1	369	0
Sidorejo										
Blotongan	14	0	0	0	0	26	4	0	234	0
Bugel	0	0	0	0	0	3	0	0	41	0
Kauman Kidul	0	0	0	0	0	2	0	1	51	0
Pulutan	0	0	0	0	0	16	1	0	166	0
Salatiga	1	0	0	3	0	14	2	1	151	0
Sidorejo Lor	3	0	0	0	1	21	6	0	212	1
Tingkir										
Gendongan	0	0	0	0	0	4	2	0	45	0
Kalibening	1	0	0	0	0	15	0	0	107	0
Kutowinangun Kidur	1	0	0	0	0	35	1	0	179	1
Kutowinangun Lor	2	0	0	0	0	37	1	0	316	4
Sidorejo Kidul	1	0	0	0	0	11	3	0	344	0
Tingkir Lor	1	0	0	0	0	30	1	0	169	0
Tingkir Tengah	0	0	0	0	0	10	1	0	44	0

Sumber: Bappeda, Hasil Padupadan P3KE dan DTKS, (2024)

5. Variabel Kondisi Dinding

Kondisi dinding di suatu rumah juga bisa menjadi salah satu faktor yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menilai kondisi ekonomi keseluruhan sebuah rumah tangga. Semakin bagus kondisi dinding rumah, maka kondisi ekonomi rumah tangga tersebut juga semakin baik. Berdasarkan olahan data terkait kondisi dinding per kelurahan di setiap kecamatan di Kota Salatiga, diperoleh hasil berupa pembobotan yang didasarkan pada kualitas dinding yang digunakan dalam rumah tangga, yakni bagus/ kualitas tinggi dan jelek/ kualitas rendah.

Tabel 3. 8 Data Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Kondisi Dinding Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kecamatan/Kelurahan	Kondisi Dinding	
	Bagus/Kualitas Tinggi	Jelek/Kualitas Rendah
Argomulyo		
Cebongan	51	112
Kumpulrejo	95	224
Ledok	66	174
Noborejo	153	206
Renduacir	58	138
Tegalrejo	24	135
Sidomukti		
Dukuh	88	143
Kalicacing	43	46
Kecandran	121	137
Mangunsari	142	267
Sidorejo		
Blotongan	81	197
Bugel	28	16
Kauman Kidul	12	42
Pulutan	114	69
Salatiga	42	130
Sidorejo Lor	56	185
Tingkir		
Gendongan	2	49
Kalibening	47	76
Kutowinangun Kidur	62	155
Kutowinangun Lor	232	129
Sidorejo Kidul	148	212
Tingkir Lor	53	148
Tingkir Tengah	31	24

Sumber : Bappeda, Hasil Padupadan P3KE dan DTKS, (2024)

6. Variabel Jenis Atap Terluas

Jenis atap terluas di suatu rumah dapat menjadi salah satu faktor penilai kondisi ekonomi keseluruhan sebuah rumah tangga. Semakin bagus bahan atap yang digunakan, maka kondisi ekonomi rumah tangga tersebut juga semakin baik. Berdasarkan olahan data terkait jenis atap terluas per kelurahan di setiap kecamatan di Kota Salatiga, diperoleh hasil berupa pembobotan yang didasarkan pada jenis-jenis atap yang digunakan dalam rumah tangga, yakni: asbes, bambu, beton/ genteng beton, genteng keramik, genteng metal, genteng tanah liat, jerami/ ijuk, dan seng.

Tabel 3. 9 Data Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Jenis Atap Terluas Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kecamatan/ Kelurahan	Jenis Dinding Terbatas								
	Anyaman Bambu	Asbes	Bambu	Beton/ Genteng Beton	Genteng Keramik	Genteng Metal	Genteng Tanah Liar	Jerami/ Ijuk	Seng
Argomulyo									
Cebongan	8	0	0	0	3	3	152	0	155
Kumpulrejo	6	0	1	1	3	3	284	0	306
Ledok	31	0	2	8	3	3	195	0	218
Noborejo	10	0	1	2	0	0	342	1	351
Renduacir	12	1	0	1	1	1	181	0	188
Tegalrejo	11	0	0	0	1	1	147	0	148
Sidomukti									
Dukuh	15	0	1	0	0	0	214	0	214
Kalicacing	17	0	0	1	1	1	60	0	70
Kecandran	31	0	3	0	1	1	219	0	250
Mangunsari	40	0	2	0	1	1	357	0	369
Sidorejo									
Blotongan	15	0	4	1	0	0	250	0	234
Bugel	2	0	0	0	0	0	39	0	41
Kauman Kidul	2	0	0	1	1	1	49	0	51
Pulutan	8	0	2	1	1	1	168	0	166
Salatiga	18	0	2	0	0	0	150	0	151
Sidorejo Lor	36	0	1	1	1	1	189	0	212
Tingkir									
Gendongan	6	0	0	0	0	0	44	0	45
Kalibening	5	0	0	0	0	0	118	0	107
Kutowinangun Kidur	20	0	3	0	3	0	107	0	179
Kutowinangun Lor	52	0	1	2	11	2	272	1	316
Sidorejo Kidul	18	0	0	3	1	3	335	0	344
Tingkir Lor	11	0	4	1	3	1	182	0	169
Tingkir Tengah	5	0	0	0	0	0	48	0	44

Sumber : Bappeda, Hasil Padupadan P3KE dan DTKS, (2024)

7. Variabel Kondisi Atap

Kondisi atap di suatu rumah juga bisa menjadi salah satu faktor yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menilai kondisi ekonomi keseluruhan sebuah rumah tangga. Semakin bagus kondisi atap rumah, maka kondisi ekonomi rumah tangga tersebut juga semakin baik. Berdasarkan olahan data terkait kondisi atap per kelurahan di setiap kecamatan di Kota Salatiga, diperoleh hasil berupa pembobotan yang didasarkan pada kualitas atap yang digunakan dalam rumah tangga, yakni bagus/ kualitas tinggi dan jelek/ kualitas rendah.

Tabel 3. 10 Data Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Kondisi Atap Tahun 2024

Kecamatan/Kelurahan	Kondisi Atap	
	Bagus/Kualitas Tinggi	Jelek/Kualitas Rendah
Argomulyo		
Cebongan	35	128
Kumpulrejo	90	229

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kecamatan/Kelurahan	Kondisi Atap	
	Bagus/Kualitas Tinggi	Jelek/Kualitas Rendah
Ledok	49	191
Noborejo	155	204
Renduacir	51	145
Tegalrejo	20	139
Sidomukti		
Dukuh	76	155
Kalicacing	44	45
Kecandran	120	138
Mangunsari	129	280
Sidorejo		
Blotongan	80	198
Bugel	22	22
Kauman Kidul	8	46
Pulutan	120	63
Salatiga	36	136
Sidorejo Lor	61	183
Tingkir		
Gendongan	0	51
Kalibening	38	85
Kutowinangun Kidur	20	135
Kutowinangun Lor	233	128
Sidorejo Kidul	143	217
Tingkir Lor	38	163
Tingkir Tengah	32	23

Sumber: Bappeda, Hasil Padupadan P3KE dan DTKS, (2024)

8. Variabel Sumber Air Minum

Ketersediaan sumber air minum dapat menjadi salah satu variabel untuk menentukan tingkat kemiskinan masyarakat karena mencerminkan akses terhadap kebutuhan dasar yang berpengaruh pada kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan sumber air minum terbatas seringkali harus mengeluarkan biaya lebih besar atau menghabiskan waktu dan tenaga ekstra untuk mendapatkan air bersih, yang dapat mengurangi kesempatan mereka dalam kegiatan ekonomi dan pendidikan.

Selain itu, ketergantungan pada sumber air yang tidak layak meningkatkan risiko penyakit, yang berdampak pada biaya kesehatan dan menurunkan daya kerja masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sumber air minum sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat karena mendukung kesehatan, efisiensi waktu, dan peningkatan produktivitas, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Tabel 3. 11 Data Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Sumber Air Minum Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kecamatan/ Kelurahan	Bahan Bakar Memasak										
	Air Isi Ulang	Air Kemasan Bermerek	Air Sungai/ Danau/ Waduk	Ledeng Eceran	Ledeng Meteran	Mata Air Terlindungi	Mata Air Tak Terlindungi	Sumur Bor/Pompa	Sumur Tak Terlindungi	Sumur Terlindungi	Lainnya
Argomulyo											
Cebongan	0	0	0	60	45	0	0	22	2	31	3
Kumpulrejo	0	0	0	4	151	4	0	18	37	50	52
Ledok	0	0	0	7	206	5	1	0	0	8	13
Noborejo	0	0	0	0	18	3	0	34	18	286	0
Renduacir	0	0	0	3	67	1	0	22	10	89	0
Tegalrejo	0	0	0	9	110	0	0	0	6	33	1
Sidomukti											
Dukuh	1	1	0	21	55	0	0	24	3	25	25
Kalicacing	0	0	0	5	51	0	0	3	0	30	0
Kecandran	2	0	0	36	107	0	0	9	2	99	3
Mangunsari	1	0	0	31	234	0	1	26	12	102	2
Sidorejo											
Blotongan	3	1	1	9	49	1	2	33	6	172	1
Bugel	0	0	0	0	4	9	0	7	1	22	1
Kauman Kidul	0	0	0	10	2	3	3	2	3	21	10
Pulutan	3	1	0	0	20	1	1	60	2	95	0
Salatiga	2	0	0	2	35	21	2	15	8	85	2
Sidorejo Lor	9	1	0	6	49	20	0	18	23	115	3
Tingkir											
Gendongan	0	0	0	5	44	0	0	1	0	0	1
Kalibening	0	0	0	14	37	12	1	16	2	41	0
Kutowinangun Kidur	0	0	0	5	98	15	0	1	2	24	10
Kutowinangun Lor	4	0	7	54	150	7	2	12	13	58	54
Sidorejo Kidul	5	1	0	1	81	2	0	37	3	220	10
Tingkir Lor	0	0	0	52	31	2	0	1	12	99	4
Tingkir Tengah	0	0	0	3	3	0	0	17	1	31	0

Sumber: Bappeda, Hasil Padupadan P3KE dan DTKS, (2024)

9. Variabel Cara Memperoleh Air Minum

Cara memperoleh air minum dapat menjadi salah satu variabel untuk menentukan tingkat kemiskinan masyarakat karena akses terhadap air bersih mencerminkan infrastruktur dasar, daya beli, dan kualitas hidup. Masyarakat miskin umumnya memiliki keterbatasan dalam mendapatkan air layak konsumsi, baik karena sumber air yang terbatas, biaya yang tinggi, atau infrastruktur yang kurang memadai, sehingga mereka harus menempuh jarak jauh atau menggunakan air yang tidak higienis. Keterbatasan ini berdampak pada kesehatan, meningkatkan risiko penyakit akibat air yang tercemar, serta mengurangi produktivitas karena waktu yang dihabiskan untuk mencari air. Oleh karena itu, aksesibilitas terhadap air minum sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat, karena mendukung kesehatan, efisiensi waktu, serta pembangunan sosial-ekonomi yang lebih baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 3. 12 Data Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Cara Memperoleh Air Minum Tahun 2024

Kecamatan/ Kelurahan	Cara Memperoleh Air Minum		
	Langganan	Membeli Eceran	Tidak Membeli
Argomulyo			
Cebongan	106	2	55
Kumpulrejo	141	6	172
Ledok	210	3	27
Noborejo	51	0	308
Renduacir	58	3	131
Tegalrejo	107	5	47
Sidomukti			
Dukuh	86	16	53
Kalicacing	45	1	43
Kecandran	132	15	126
Mangunsari	253	24	132
Sidorejo			
Blotongan	66	17	195
Bugel	4	1	39
Kauman Kidul	11	1	42
Pulutan	87	4	92
Salatiga	22	2	148
Sidorejo Lor	18	15	211
Tingkir			
Gendongan	42	6	3
Kalibening	78	0	45
Kutowinangun Kidur	93	2	60
Kutowinangun Lor	175	45	141
Sidorejo Kidul	143	5	212
Tingkir Lor	79	5	117
Tingkir Tengah	13	1	41

Sumber : Bappeda, Hasil Padupadan P3KE dan DTKS, (2024)

10. Variabel Sumber Penerangan

Sumber penerangan dapat menjadi salah satu variabel untuk menentukan tingkat kemiskinan masyarakat karena mencerminkan akses terhadap infrastruktur energi yang mempengaruhi kualitas hidup, produktivitas, dan peluang ekonomi. Masyarakat yang masih mengandalkan penerangan tradisional seperti lampu minyak atau lilin umumnya menghadapi keterbatasan dalam aktivitas belajar, bekerja, dan usaha di malam hari, yang dapat menghambat perkembangan pendidikan dan ekonomi mereka. Selain itu, sumber penerangan yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan masalah kesehatan akibat asap atau polusi dalam ruangan. Oleh karena itu, akses terhadap sumber penerangan yang andal dan modern sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat karena mendukung pendidikan, keamanan, dan produktivitas, serta membuka peluang lebih luas untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 3. 13 Data Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Sumber Penerangan Tahun 2024

Kecamatan/Kelurahan	Cara Memperoleh Air Minum		
	Bukan Listrik	Listrik PLN	Listrik Non PLN
Argomulyo			
Cebongan	0	155	8
Kumpulrejo	4	298	17
Ledok	3	228	9
Noborejo	2	353	4
Renduacir	0	179	13
Tegalrejo	2	150	7
Sidomukti			
Dukuh	0	149	6
Kalicacing	0	81	8
Kecandran	0	266	7
Mangunsari	1	394	14
Sidorejo			
Blotongan	0	271	7
Bugel	0	44	0
Kauman Kidul	0	54	0
Pulutan	0	182	1
Salatiga	0	167	5
Sidorejo Lor	0	237	7
Tingkir			
Gendongan	0	51	0
Kalibening	0	123	0
Kutowinangun Kidur	2	147	6
Kutowinangun Lor	0	315	46
Sidorejo Kidul	0	349	11
Tingkir Lor	0	198	3
Tingkir Tengah	0	55	0

Sumber: Bappeda, Hasil Padupadan P3KE dan DTKS, (2024)

11. Variabel Status Kepemilikan Listrik

Status kepemilikan listrik dapat menjadi salah satu variabel untuk menentukan tingkat kemiskinan masyarakat karena mencerminkan akses terhadap layanan energi yang mendukung kehidupan sehari-hari, produktivitas, dan pembangunan ekonomi. Masyarakat yang tidak memiliki akses listrik atau bergantung pada sumber listrik terbatas cenderung mengalami keterbatasan dalam penerangan, penggunaan alat elektronik, serta akses informasi dan teknologi yang dapat menghambat pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Tanpa listrik, aktivitas seperti belajar, bekerja, dan berwirausaha menjadi lebih sulit, sehingga memperkuat lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, kepemilikan listrik sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat karena meningkatkan kualitas hidup, mendukung aktivitas ekonomi, serta mempercepat pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

sosial dan teknologi, yang pada akhirnya membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Tabel 3. 14 Data Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Status Kepemilikan Listrik Tahun 2024

Kecamatan/Kelurahan	Status Kepemilikan Listrik	
	Menumpang Tetangga	Milik Sendiri
Argomulyo		
Cebongan	31	132
Kumpulrejo	53	266
Ledok	28	212
Noborejo	15	344
Renduacir	23	169
Tegalrejo	25	134
Sidomukti		
Dukuh	30	125
Kalicacing	7	82
Kecandran	49	224
Mangunsari	48	361
Sidorejo		
Blotongan	30	248
Bugel	2	42
Kauman Kidul	6	48
Pulutan	8	175
Salatiga	34	138
Sidorejo Lor	57	187
Tingkir		
Gendongan	7	44
Kalibening	22	101
Kutowinangun Kidur	25	130
Kutowinangun Lor	80	281
Sidorejo Kidul	34	326
Tingkir Lor	21	180
Tingkir Tengah	5	50

Sumber : Bappeda, Hasil Padupadan P3KE dan DTKS, (2024)

12. Variabel Bahan Bakar Memasak

Bahan bakar memasak dapat menjadi salah satu variabel untuk menentukan tingkat kemiskinan masyarakat karena mencerminkan akses terhadap energi bersih dan efisien yang berpengaruh pada kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Masyarakat yang masih bergantung pada bahan bakar tradisional seperti kayu bakar atau arang cenderung menghadapi risiko kesehatan akibat paparan asap berlebih, serta menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga untuk mengumpulkan bahan bakar, yang dapat mengurangi produktivitas dalam aktivitas lain seperti bekerja atau belajar. Selain itu, penggunaan bahan bakar yang tidak efisien juga dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga dalam jangka panjang dan berkontribusi pada degradasi lingkungan. Oleh karena itu, akses terhadap bahan bakar memasak yang bersih dan modern sangat penting

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

bagi kesejahteraan masyarakat karena mendukung kesehatan, efisiensi waktu, serta keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Tabel 3. 15 Data Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Bahan Bakar Memasak Tahun 2024

Kecamatan /Kelurahan	Bahan Bakar Memasak								
	Briket	Arang	Gas >3k	Gas 3kg	Gas Kota/ Biogas	Minyak Tanah	Kayu Bakar	Listrik	Tidak Memasak di Rumah
Argomulyo									
Cebongan	0	0	28	129	0	0	4	0	2
Kumpulrejo	0	0	10	249	0	0	55	5	0
Ledok	0	0	58	172	1	0	6	3	0
Noborejo	0	0	9	335	0	0	11	1	3
Renduacir	0	0	26	159	0	0	6	1	0
Tegalrejo	0	0	3	149	0	0	5	2	0
Sidomukti									
Dukuh	0	0	12	137	0	0	4	2	0
Kalicacing	0	1	19	65	0	1	0	0	3
Kecandran	0	0	30	218	0	0	25	0	0
Mangunsari	0	0	42	359	0	0	4	1	3
Sidorejo									
Blotongan	0	0	8	256	0	0	10	0	4
Bugel	0	0	0	43	0	0	0	0	1
Kauman Kidul	0	0	0	50	0	0	4	0	0
Pulutan	0	0	1	177	0	0	1	1	2
Salatiga	0	0	3	167	0	0	0	0	2
Sidorejo Lor	0	0	21	212	0	0	5	1	5
Tingkir									
Gendongan	0	0	1	49	0	0	0	0	1
Kalibening	0	0	1	113	0	0	3	2	4
Kutowinangun Kidur	0	1	0	151	0	0	3	0	0
Kutowinangun Lor	0	1	7	337	0	0	15	0	1
Sidorejo Kidul	0	0	28	318	0	0	13	1	0
Tingkir Lor	0	0	10	182	0	0	8	0	1
Tingkir Tengah	0	0	3	50	0	0	2	0	0

Sumber: Bappeda, Hasil Padupadan P3KE dan DTKS, (2024)

13. Variabel Kepemilikan Fasilitas BAB

Fasilitas Buang Air Besar (BAB) dapat menjadi salah satu variabel untuk menentukan tingkat kemiskinan masyarakat karena mencerminkan akses terhadap sanitasi yang layak, yang berpengaruh pada kesehatan, lingkungan, dan kualitas hidup. Masyarakat yang tidak memiliki fasilitas BAB yang memadai sering kali terpaksa melakukan praktik sanitasi yang tidak higienis, seperti buang air besar di tempat terbuka, yang dapat mencemari sumber air dan meningkatkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

risiko penyebaran penyakit seperti diare dan infeksi saluran pencernaan. Kurangnya sanitasi yang layak juga berdampak pada martabat serta kenyamanan hidup masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas BAB yang memadai sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat karena mendukung kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas secara keseluruhan.

Tabel 3. 16 Data Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Fasilitas BAB Tahun 2024

Kecamatan/Kelurahan	Fasilitas BAB			
	Bersama	Sendiri	Tidak	Umum
Argomulyo				
Cebongan	41	122	0	0
Kumpulrejo	24	291	2	2
Ledok	14	224	0	2
Noborejo	22	337	0	0
Renduacir	13	178	1	0
Tegalrejo	22	136	1	0
Sidomukti				
Dukuh	14	141	0	0
Kalicacing	21	65	0	3
Kecandran	14	258	1	0
Mangunsari	40	368	0	1
Sidorejo				
Blotongan	22	255	0	1
Bugel	3	41	0	0
Kauman Kidul	4	49	0	1
Pulutan	28	155	0	0
Salatiga	46	124	0	2
Sidorejo Lor	60	183	1	0
Tingkir				
Gendongan	17	34	0	0
Kalibening	12	109	1	1
Kutowinangun Kidur	30	109	1	15
Kutowinangun Lor	48	293	5	15
Sidorejo Kidul	24	334	1	1
Tingkir Lor	17	179	2	3
Tingkir Tengah	5	50	0	0

Sumber: Bappeda, Hasil Padupadan P3KE dan DTKS, (2024)

14. Variabel Tempat Pembuangan Tinja

Tempat pembuangan tinja dapat menjadi salah satu variabel untuk menentukan tingkat kemiskinan masyarakat karena mencerminkan akses terhadap sistem sanitasi yang layak, yang berpengaruh pada kesehatan, lingkungan, dan kualitas hidup. Masyarakat yang tidak memiliki tempat pembuangan tinja yang aman, seperti *septic tank* atau sistem pembuangan terkelola, seringkali membuang limbah manusia secara sembarangan, seperti pada contoh di tabel 3.16 yaitu di lubang tanah, sungai, dan danau, yang dapat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

mencemari air tanah dan sumber air minum, serta meningkatkan risiko penyebaran penyakit seperti diare, kolera, dan infeksi saluran pencernaan.

Sanitasi yang buruk juga berdampak negatif pada kebersihan lingkungan dan martabat hidup masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan. Oleh karena itu, keberadaan tempat pembuangan tinja yang aman sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat karena membantu menjaga kesehatan, mengurangi pencemaran lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 3. 17 Data Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Tempat Pembuangan Tinja Tahun 2024

Kecamatan/ Kelurahan	Tempat Pembuangan Tinja					
	Kolam/ Sawah/ Sungai/ Danau/ Laut	Lubang Tanah	Pantai/ Tanah Lapang/ Kebun	Ledeng Ecerean	Ledeng Meteran	Mata Air Terlindungi
Argomulyo						
Cebongan	0	115	0	12	36	0
Kumpulrejo	0	113	0	53	151	2
Ledok	0	6	0	48	186	0
Noborejo	0	156	0	48	155	0
Renduacir	0	21	0	77	93	1
Tegalrejo	0	9	0	73	74	3
Sidomukti						
Dukuh	0	5	0	94	56	0
Kalicacing	7	0	0	64	118	0
Kecandran	0	18	0	121	133	1
Mangunsari	1	33	0	135	240	0
Sidorejo						
Blotongan	0	126	0	87	65	0
Bugel	3	9	0	12	20	0
Kauman Kidul	0	25	0	12	17	0
Pulutan	0	0	0	11	172	0
Salatiga	3	16	0	19	134	0
Sidorejo Lor	12	39	1	58	134	0
Tingkir						
Gendongan	0	3	0	7	41	0
Kalibening	0	9	0	55	58	1
Kutowinangun Kidur	36	15	0	26	77	1
Kutowinangun Lor	10	103	0	57	186	5
Sidorejo Kidul	0	18	0	97	245	0
Tingkir Lor	9	38	0	55	9	7
Tingkir Tengah	1	38	0	2	14	0

Sumber: Bappeda, Hasil Padupadan P3KE dan DTKS, (2024)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3.4 Determinan Kemiskinan

3.4.1. Analisis Karakteristik Permasalahan Kemiskinan Konsumsi

Berdasarkan grafik perkembangan pengeluaran konsumsi makanan, analisis posisi relatifnya bahwasanya konsumsi makanan di Kota Salatiga lebih tinggi jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional. Akan tetapi. pola perkembangan pengeluaran konsumsi makanan di Jawa Tengah dan Nasional menunjukkan tren yang meningkat selama 7 tahun terakhir. Bila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi makanan tertinggi. Pengeluaran tertinggi konsumsi makanan penduduk bulanan di Kota Salatiga terjadi di tahun 2022 yaitu sekitar Rp858.243,00, sedangkan perkembangan konsumsi makanan tertinggi di Jawa Tengah dan Nasional terjadi di tahun 2024.

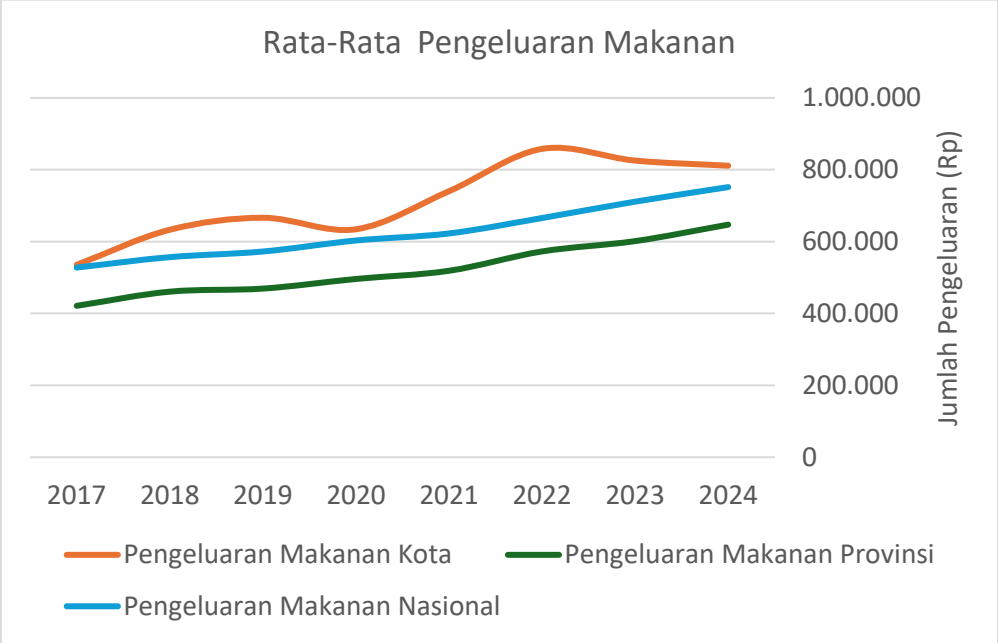


Gambar 3. 5. Dinamika Pengeluaran Penduduk Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dinamika pengeluaran konsumsi Kota Salatiga Tahun 2017-2024 menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi Kota Salatiga berada di atas ambang batas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Jika dilihat dari data-data diatas dari tahun 2017-2024, rata-rata pengeluaran konsumsi terbesar Kota Salatiga berasal dari konsumsi makanan daripada non makanan. Dilihat dari pengeluaran makanan di Kota Salatiga selama 7 tahun terakhir lebih rendah dibandingkan pengeluaran non makanan, sehingga dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga masih cukup baik, karena pengeluaran untuk makanan lebih kecil dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga.

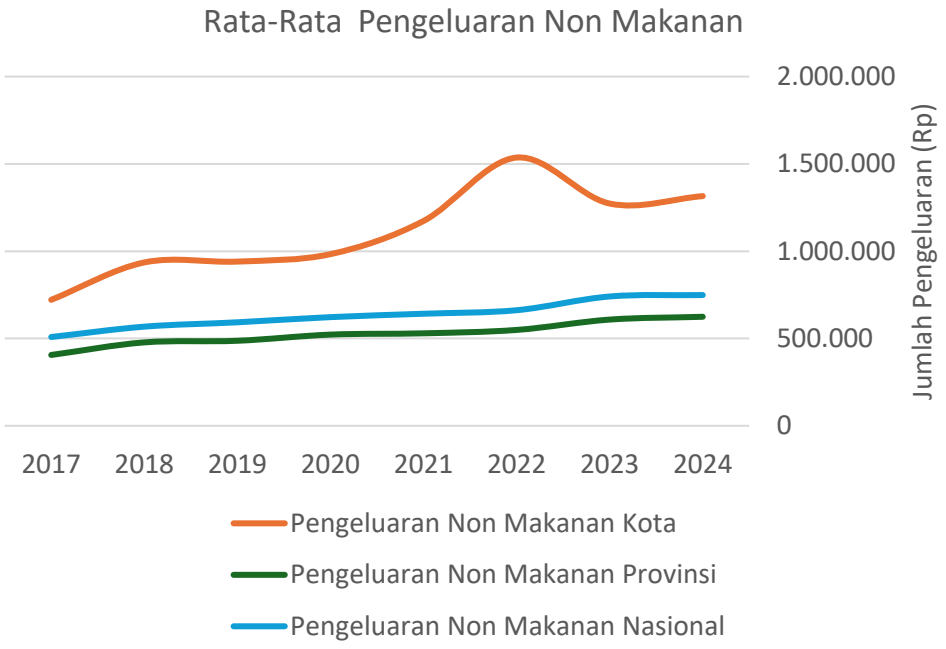
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 3. 6. Perkembangan Pengeluaran Makanan Penduduk Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 3.7 menunjukkan perbandingan besaran rata-rata pengeluaran per kapita per tahun untuk bukan makanan selama periode 2017-2024. Selama periode 7 tahun terakhir pengeluaran non makanan di Kota Salatiga selalu lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pengeluaran konsumsi bukan makanan Kota Salatiga tertinggi terjadi di tahun 2022 yaitu di atas Rp1.500.000. Pengeluaran penduduk Kota Salatiga memiliki pola yang berbeda jika dibandingkan dengan Nasional dan provinsi yang mana Kota Salatiga memiliki pola yang fluktuatif sedangkan Provinsi dan Nasional memiliki pola yang cenderung meningkat landai. Peningkatan tertinggi terjadi di rentang tahun 2020 - 2022, namun kembali menurun di tahun 2023.



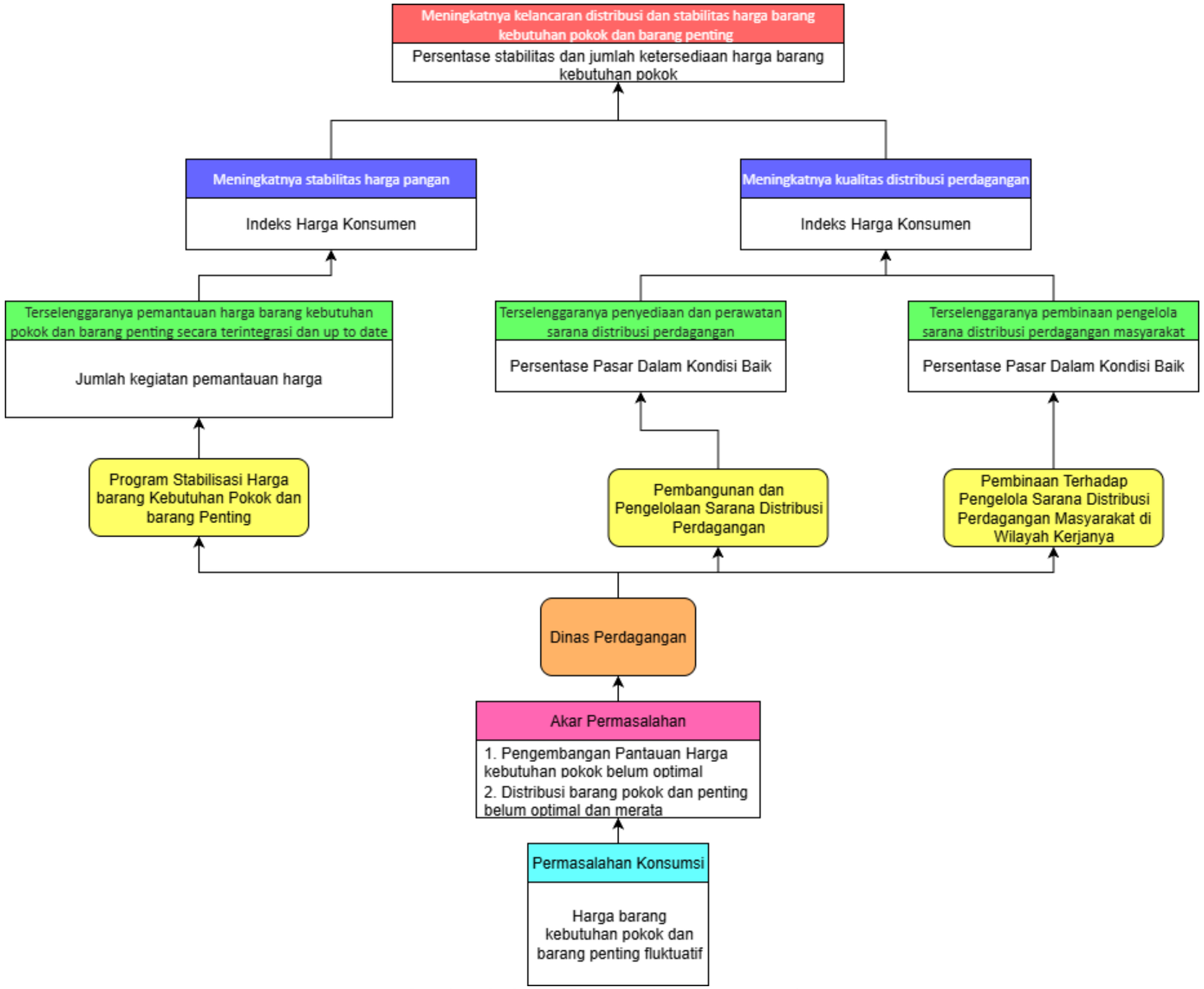
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Gambar 3. 7. Perkembangan Pengeluaran Non Makanan Penduduk Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Perkembangan *time series* pola pengeluaran merepresentasikan perkembangan besaran ataupun pangsa pengeluaran per kapita setiap tahunnya. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kota Salatiga selama 7 tahun terakhir memperlihatkan tren yang fluktuatif, artinya perkembangan yang diciptakan tidak tetap atau tidak stabil. Pada periode tahun 2017 – 2019 pola perkembangan pengeluaran konsumsi cenderung meningkat, akan tetapi di tahun 2020 mengalami sedikit penurunan. Walaupun begitu, ditahun selanjutnya yaitu tahun 2021 – 2022 pengeluaran konsumsi masyarakat Kota Salatiga mengalami peningkatan kembali bahkan mencapai peningkatan tertinggi. Grafik diatas juga menjelaskan bahwa dalam 7 tahun terakhir yaitu periode 2017-2024 rata-rata pengeluaran konsumsi masyarakat Kota Salatiga didominasi oleh konsumsi non makanan. Dalam hal ini proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk non makanan lebih tinggi daripada konsumsi untuk makanan. Artinya Kota Salatiga memiliki kecenderungan yang lebih besar pada kebutuhan non primer (non makanan).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



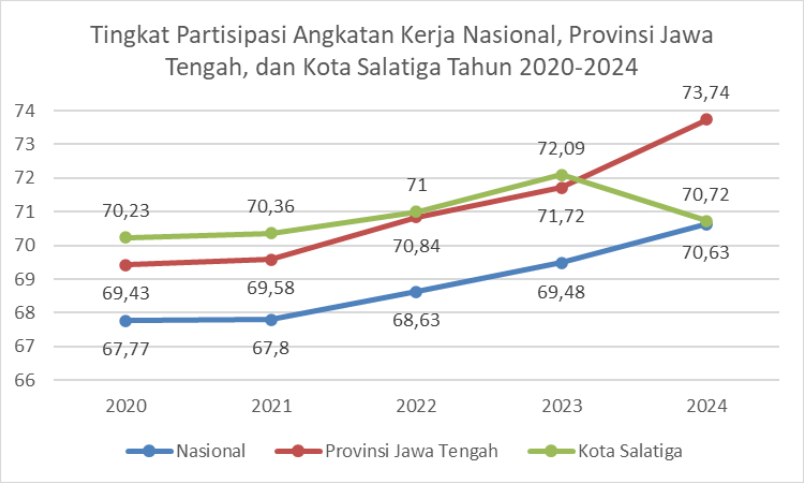
Gambar 3. 8. Grafik ToC Bidang Konsumsi

Sumber: Hasil Analisis FGD TKPK, Data Sekunder dari OPD, LP2KD, LKJIP, dan Renstra OPD, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3.4.2. Analisis Karateristik Permasalahan Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan secara persentase banyaknya penduduk usia diatas 15 tahun yang termasuk dalam angkatan kerja. Nilai TPAK menggambarkan besar-kecilnya pasokan atau ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung aktivitas ekonomi. TPAK bermanfaat untuk melihat penduduk yang potensial memproduksi barang dan jasa. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu.



Gambar 3. 9. Perkembangan TPAK Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

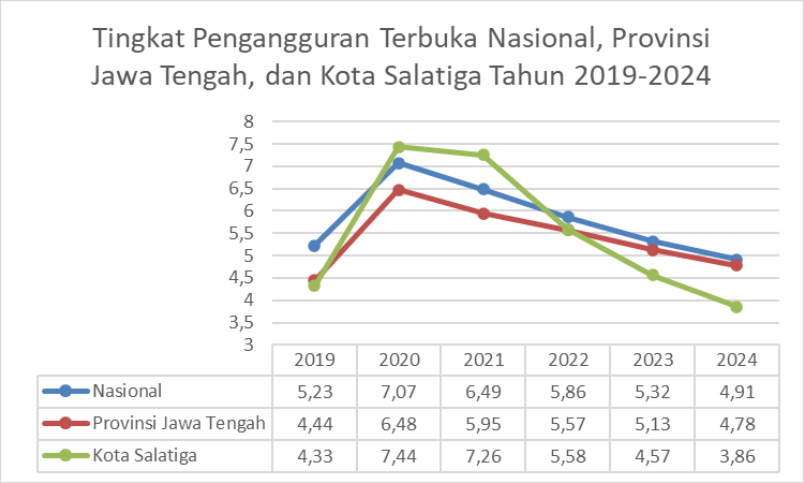
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar diatas menunjukkan perkembangan nilai TPAK Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional dari tahun 2020 hingga 2024. Nilai TPAK Kota Salatiga pada tahun 2020-2023 selalu mengalami peningkatan dan memiliki nilai yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai TPAK Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2020 nilai TPAK Kota Salatiga yaitu sebesar 70,23 dan meningkat pada tahun-tahun berikutnya, hingga akhirnya pada tahun 2023 nilai TPAK Kota Salatiga mencapai 72,09. Akan tetapi pada tahun 2024 nilai TPAK Kota Salatiga mengalami penurunan menjadi 70,72 dan berada dibawah nilai TPA Provinsi Jawa Tengah yakni sebesar 73,74 dan memiliki selisih sedikit dengan TPAK Nasional yang memiliki nilai 70,63. Penurunan TPAK memiliki arti proporsi penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan atau sudah bekerja mengalami penurunan. Penurunan nilai TPAK dapat menjadi hal yang mengkhawatirkan karena penurunan TPAK bisa menandakan adanya masalah dalam pasar tenaga kerja, seperti kurangnya lapangan pekerjaan dan/atau berkurangnya minat mencari kerja.

Kondisi ketenagakerjaan di Kota Salatiga juga dapat digambarkan dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT menggambarkan persentase jumlah pengangguran dibanding dengan jumlah angkatan kerja dalam suatu wilayah. Nilai TPT menunjukkan besar/kecilnya jumlah pasokan tenaga kerja yang belum termanfaatkan. Beberapa kategori yang termasuk dalam pengangguran terbuka menurut BPS adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan yang mencari pekerjaan, tidak punya pekerjaan dan yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja.

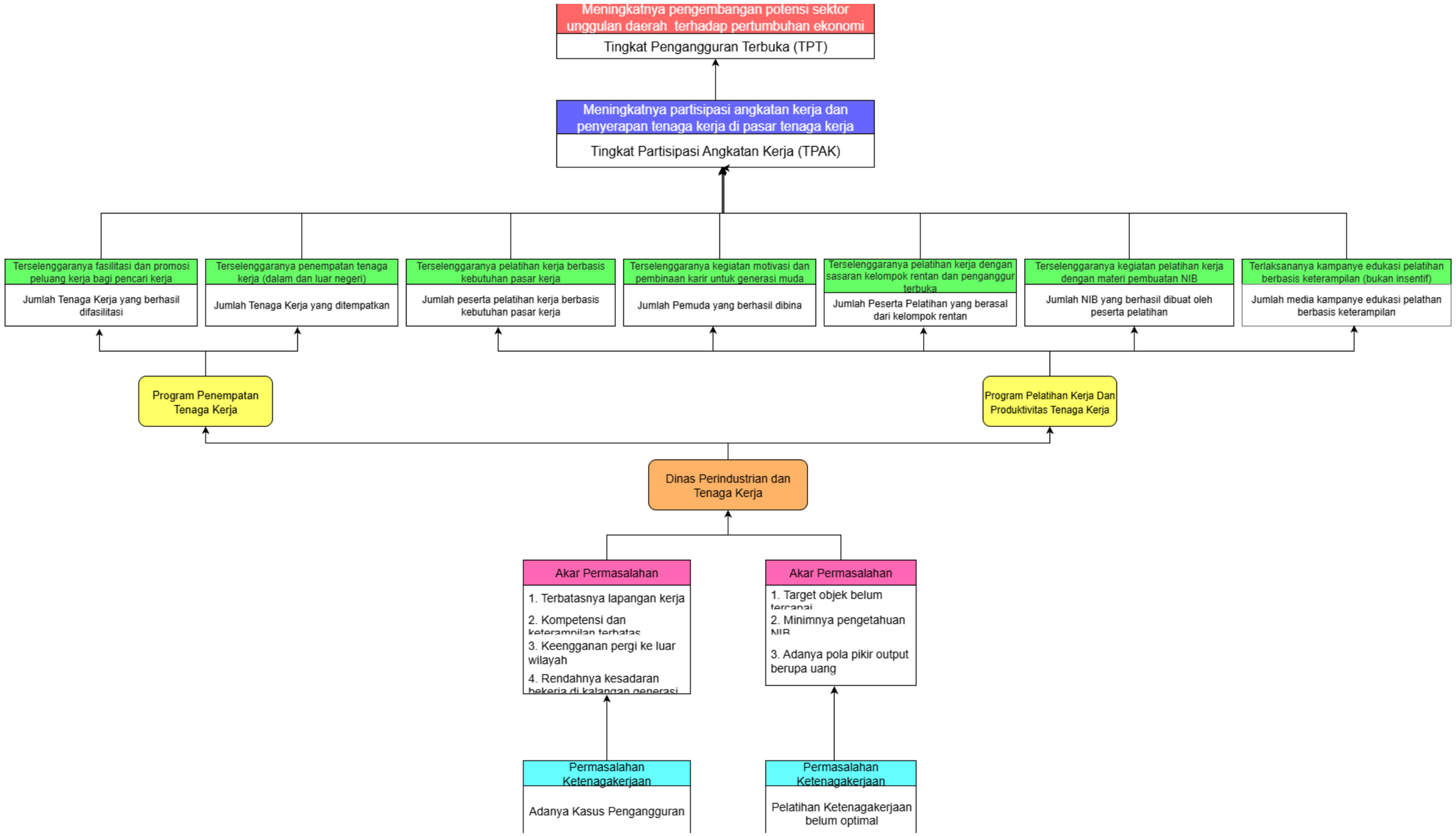


Gambar 3. 10. Perkembangan TPT Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Perkembangan Nilai TPT Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional pada tahun 2020-2024 cukup fluktuatif. Pada tahun 2019 nilai TPT Kota Salatiga berada pada angka 4,33 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai TPT Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional yang masing-masing berada pada angka 4,44 ddan 5,23. Pada tahun 2020, nilai TPT pada ketiga wilayah tersebut mengalami peningkatan yang cukup ekstrim, bahkan nilai TPT Kota Salatiga mengalami peningkatan menjadi 7,44 dan lebih tinggi dibandingkan nilai TPT Provinsi Jawa Tengah yang berada pada angka 6,48 dan Nasional pada angka 7,07. Peningkatan nilai TPT ini erat kaitannya dengan dampak sosial ekonomi yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia di awal tahun 2020. Perkembangan nilai TPT pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan perkembangan yang baik, yang ditunjukkan dengan penurunan nilai TPT dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 nilai TPT Kota Salatiga berada pada angka 3,86 dan lebih rendah dibandingkan nilai TPT Provinsi dan TPT Nasional yang masing-masing memiliki nilai 4,78 dan 4,91.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



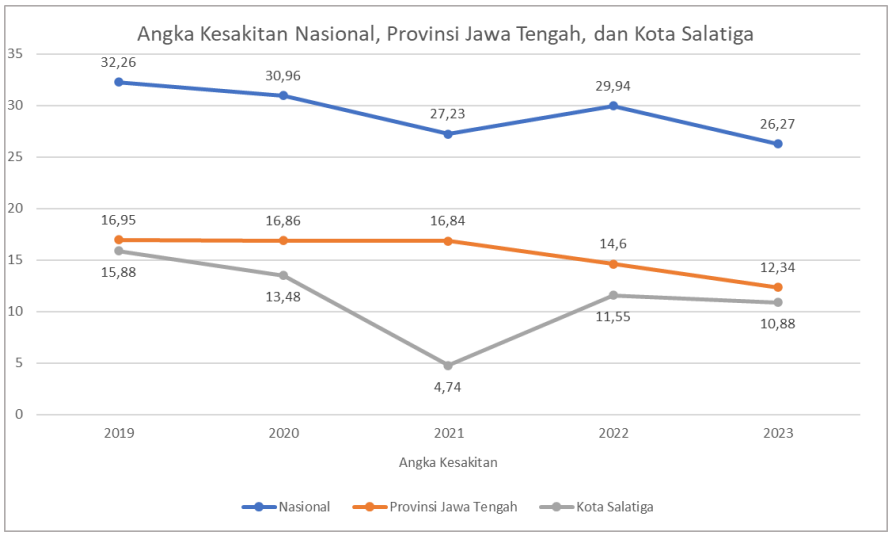
Gambar 3. 11. Grafik ToC Bidang Ketenagakerjaan

Sumber: Hasil Analisis FGD TKPK, Data Sekunder dari OPD, LP2KD, LKJIP, dan Renstra OPD, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3.4.3. Analisis Karateristik Permasalahan Kesehatan

Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir, sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari. Angka ini mencerminkan beban morbiditas yang ditanggung oleh penduduk dan menjadi salah satu cerminan derajat kesehatan masyarakat. Semakin tinggi angka kesakitan, semakin besar jumlah penduduk yang mengalami gangguan kesehatan, yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap produktivitas kerja, kualitas hidup, serta peningkatan beban pelayanan kesehatan. Angka kesakitan bermanfaat untuk melihat sejauh mana populasi rentan terhadap penyakit, serta untuk mengevaluasi efektivitas upaya kesehatan promotif, preventif, dan kuratif yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Penurunan angka kesakitan menunjukkan perbaikan pada aspek kesehatan masyarakat, baik dari sisi perilaku hidup bersih dan sehat, ketersediaan sarana prasarana kesehatan, maupun akses pelayanan kesehatan yang semakin merata dan berkualitas.



Gambar 3. 12 Perkembangan Angka Kesakitan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023

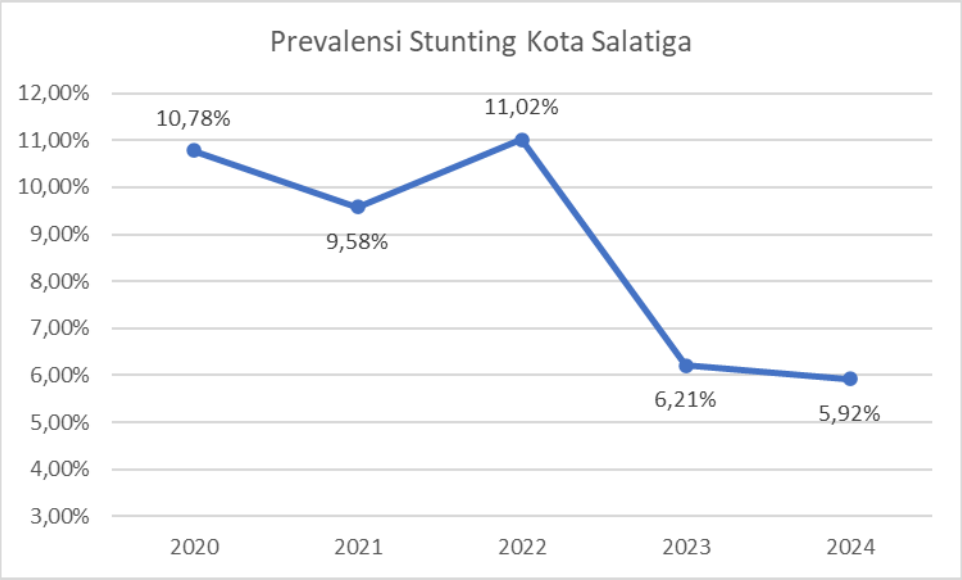
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2025

Gambar diatas merupakan grafik perkembangan angka kesakitan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023. Secara keseluruhan, angka kesakitan pada ketiga wilayah menunjukkan tren yang cenderung menurun. Penurunan angka kesakitan tertinggi di Kota Salatiga terjadi pada tahun 2021, yang mana nilai angka kesakitan pada tahun 2021 sebesar 4,74 dari yang sebelumnya 13,48 pada tahun 2020. Akan tetapi pada tahun 2022 angka kesakitan Kota Salatiga mengalami kenaikan menjadi 11,55 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 menjadi 10,88. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang memiliki nilai angka kesakitan 15,88 nilai angka kesakitan tahun 2023 tetap lebih rendah. Serta apabila dibandingkan dengan angka kesakitan Provinsi Jawa Tengah dan angka kesakitan Nasional, nilai angka kesakitan Kota Salatiga selalu lebih rendah.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu sejak masa kehamilan hingga anak berusia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dua tahun. Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang berada di bawah standar usianya. *Stunting* tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan kognitif, tingkat produktivitas di masa dewasa, serta peningkatan risiko penyakit tidak menular di kemudian hari. Prevalensi stunting mencerminkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, pola asuh, serta akses layanan kesehatan ibu dan anak. Semakin tinggi angka *stunting* menunjukkan tingginya kerentanan anak-anak terhadap kekurangan gizi dan buruknya kondisi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, penurunan angka *stunting* menjadi salah satu prioritas utama pembangunan sumber daya manusia di tingkat nasional maupun daerah.

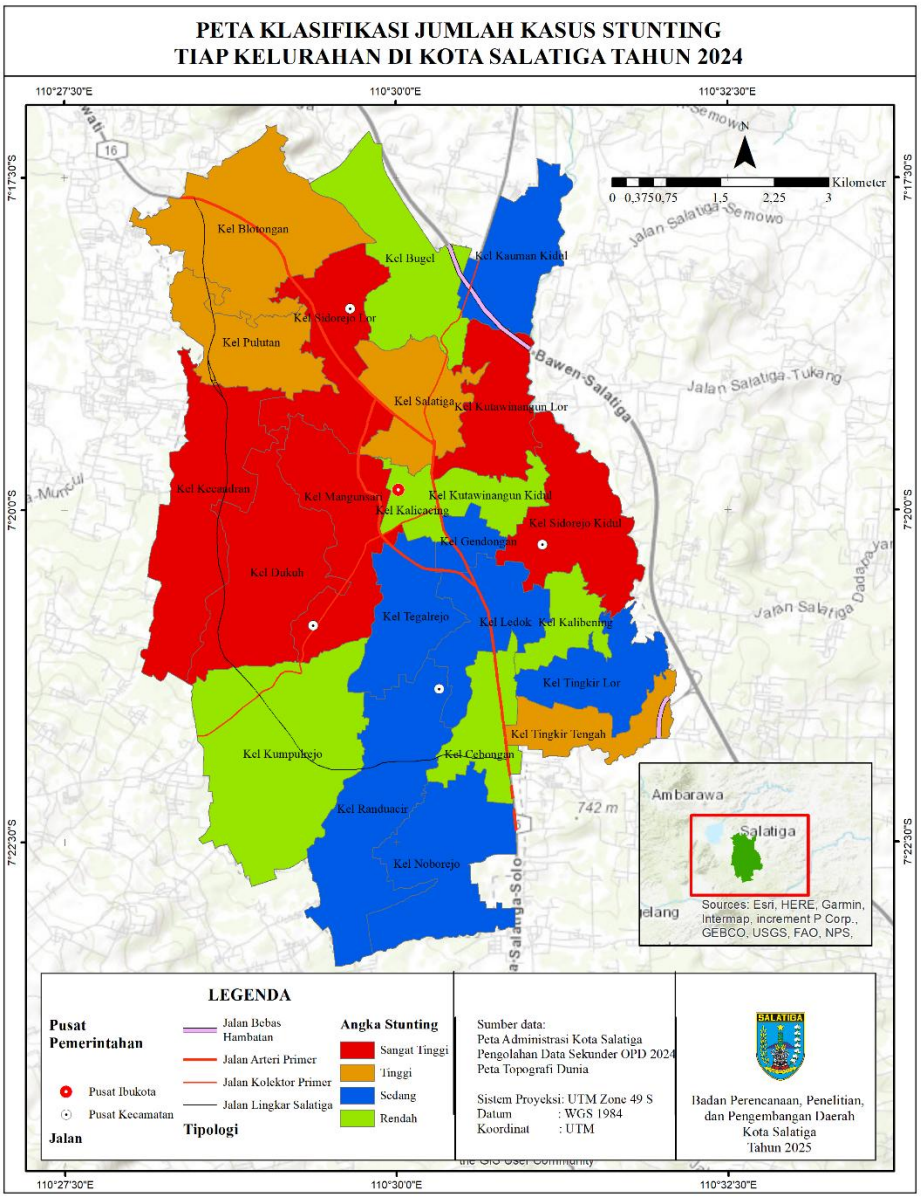


Gambar 3. 13 Perkembangan Perkembangan Prevalensi *Stunting* Kota Salatiga Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Tahun 2025

Prevalensi *stunting* di Kota Salatiga menunjukkan penurunan yang signifikan antara tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, prevalensi *stunting* tercatat sebesar 10,78 persen, yang kemudian menurun menjadi 9,58 persen pada tahun 2021. Meskipun sempat meningkat lagi menjadi 11,02 persen di tahun 2022, angka ini mengalami penurunan drastis menjadi 6,21 persen di tahun 2023 dan terus menurun hingga mencapai 5,92 persen di tahun 2024.Penurunan sebesar 4,86 persen dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian dan pencegahan stunting di Kota Salatiga. Keberhasilan ini mencerminkan berbagai intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan gizi ibu dan anak, pelayanan kesehatan, serta edukasi gizi di masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

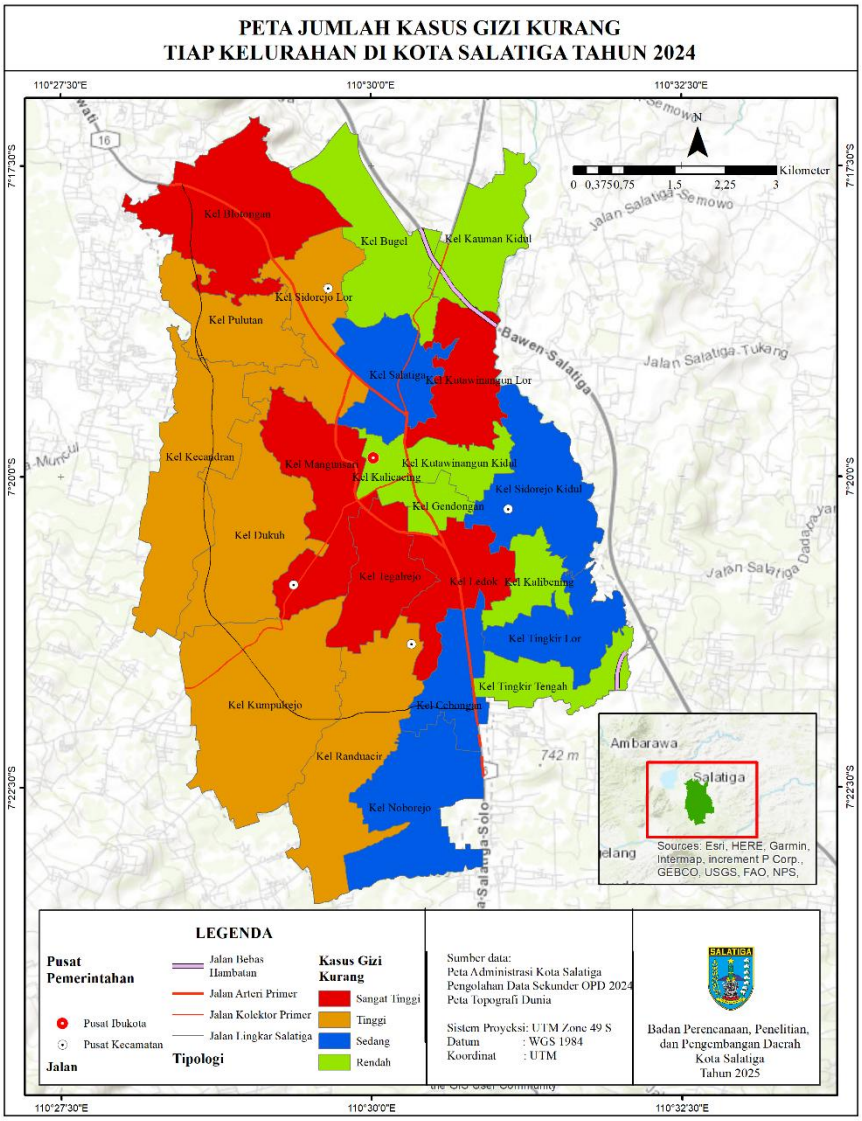


Gambar 3. 14 Peta Klasifikasi Jumlah Kasus *Stunting* Tiap Kelurahan di Kota Salatiga Tahun 2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Tahun 2025, diolah

Gambar di atas merupakan peta klasifikasi jumlah kasus *stunting* tiap kelurahan di Kota Salatiga Tahun 2024. Terdapat 6 kelurahan di Kota Salatiga yang terklasifikasi sebagai Kelurahan dengan jumlah kasus *stunting* tinggi yakni Kelurahan Kecandran, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Sidorejo Lor, Kelurahan Kutawinangun Lor, dan Kelurahan Sidorejo Kidul. Jumlah kasus *stunting* terbanyak ada di Kelurahan Mangunsari (58 kasus). Terbentuk 2 Kluster yang berada di bagian barat dan timur wilayah Kota Salatiga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



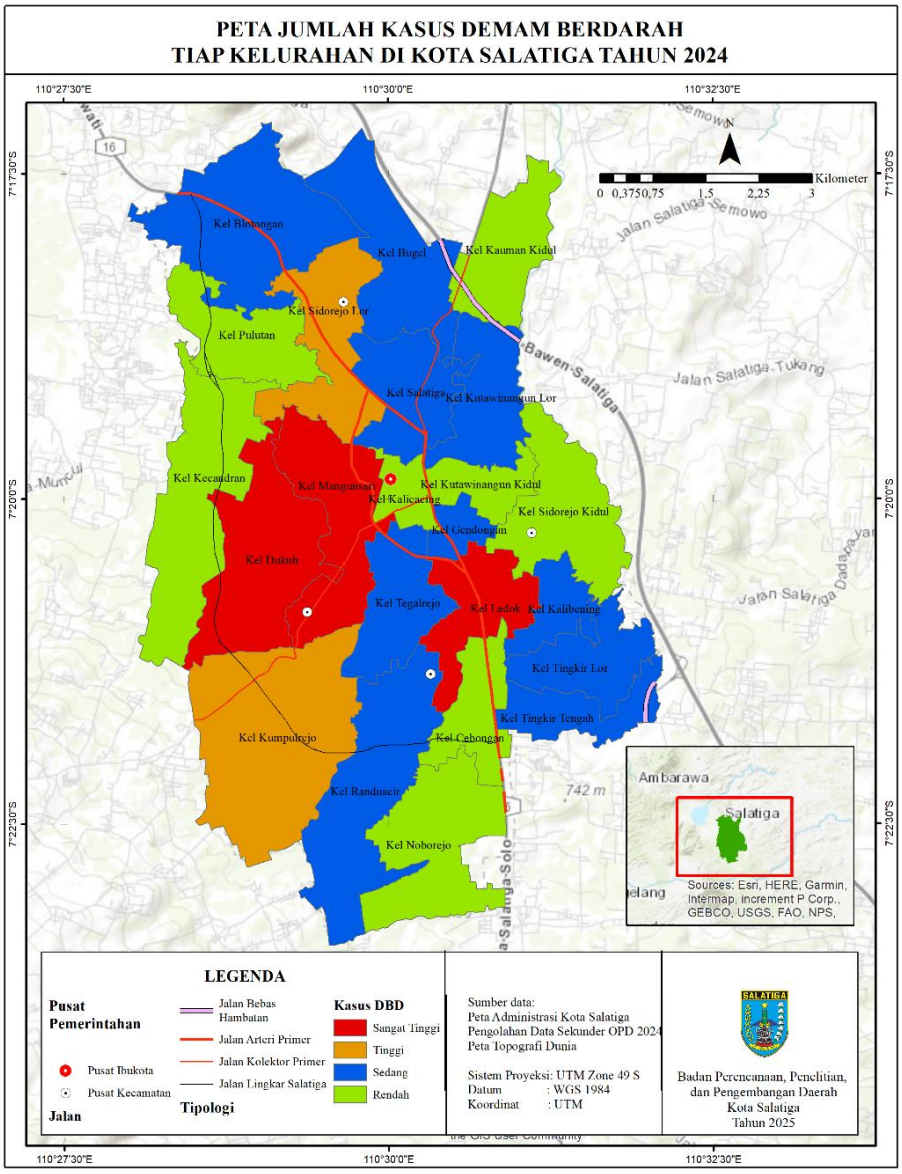
Gambar 3. 15 Peta Klasifikasi Jumlah Balita Gizi Kurang Tiap Kelurahan di Kota Salatiga Tahun 2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Tahun 2025, diolah

Gizi kurang adalah kondisi di mana asupan zat gizi seseorang, khususnya energi dan protein, tidak mencukupi kebutuhan tubuh dalam jangka waktu tertentu. Pada anak-anak, kondisi ini sering ditandai dengan berat badan yang berada di bawah standar usianya. Gizi kurang menjadi salah satu indikator penting dalam menilai status kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia. Angka gizi kurang mencerminkan kualitas konsumsi pangan, perilaku hidup sehat, serta tingkat akses terhadap pelayanan kesehatan dasar. Semakin tinggi angka gizi kurang menunjukkan tingginya kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan, keterbatasan akses pangan bergizi, serta belum optimalnya praktik pemberian makan pada anak. Berdasarkan Peta Klasifikasi Jumlah Balita Gizi Kurang Tiap Kelurahan di Kota Salatiga Tahun 2024, dapat diketahui bahwa terdapat 5 kelurahan di Kota Salatiga yang terklasifikasi sebagai Kelurahan dengan jumlah kasus gizi kurang yang tinggi yakni Kelurahan Blotongan, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kelurahan Mangunsari,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kelurahan Tegalrejo, dan Kelurahan Ledok. Jumlah kasus gizi kurang terbanyak ada di Kelurahan Tegalrejo (32 kasus).

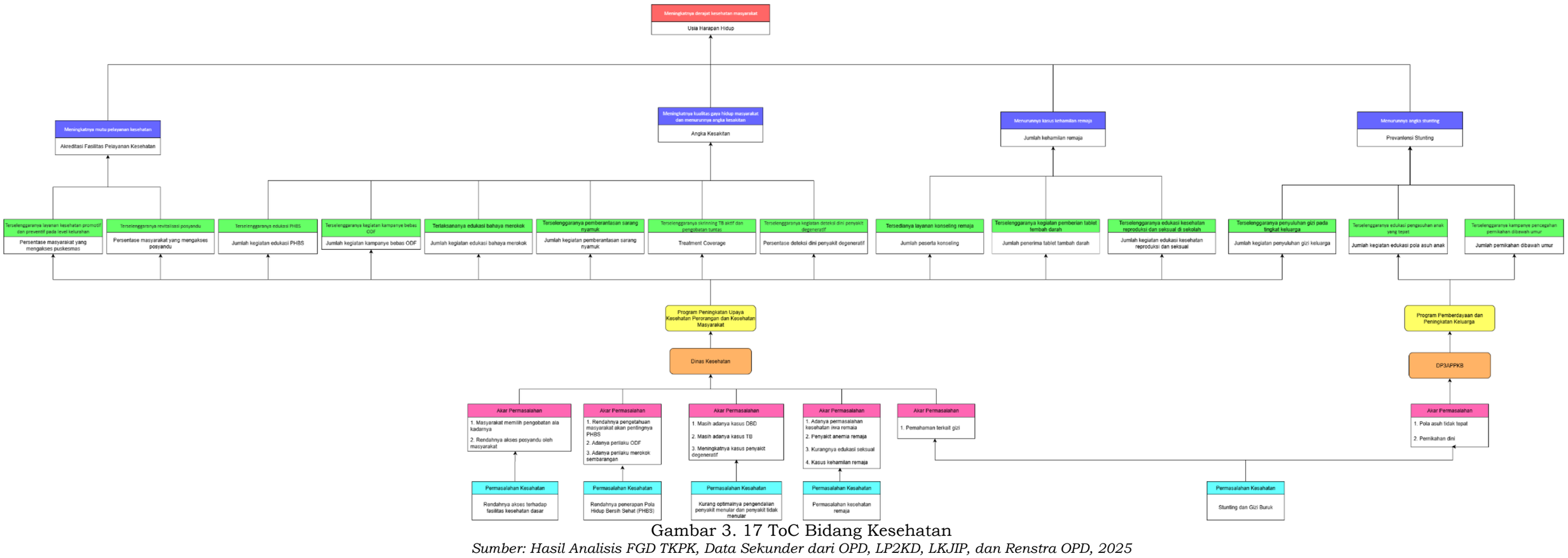


Gambar 3. 16 Peta Klasifikasi Jumlah Kasus DBD Tiap Kelurahan di Kota Salatiga Tahun 2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Tahun 2025, diolah

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti*. Penyakit ini dapat menyerang semua kelompok umur dan memiliki potensi menjadi wabah jika tidak dikendalikan secara efektif. Tingginya angka kasus DBD mencerminkan masih adanya tantangan dalam pengelolaan lingkungan, kebersihan tempat tinggal, serta belum optimalnya pelaksanaan program pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di masyarakat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, pada tahun 2024 di Kota Salatiga masih terdapat kasus DBD (hanya 8 dari 23 Kelurahan yang bebas DBD). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar wilayah Kota Salatiga memiliki lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk *Aedes aegypti*. Sebaran wilayah DBD hampir merata dan cenderung fokus di wilayah tengah-barat Kota Salatiga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



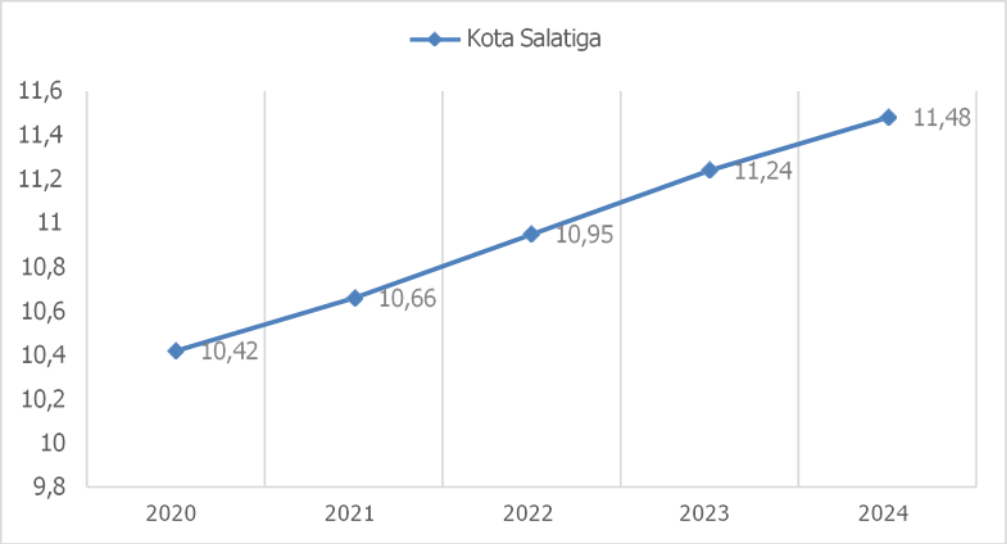
Gambar 3. 17 ToC Bidang Kesehatan

Sumber: Hasil Analisis FGD TKPK, Data Sekunder dari OPD, LP2KD, LKJIP, dan Renstra OPD, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3.4.4. Analisis Karateristik Permasalahan Pendidikan

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah tahun yang secara rata-rata telah dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal, baik yang telah selesai maupun yang masih berlangsung. RLS mencerminkan tingkat pencapaian pendidikan penduduk secara umum dan menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai RLS, maka semakin besar peluang penduduk untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial. RLS juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas, kesejahteraan, dan mobilitas sosial masyarakat. Sebaliknya, RLS yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya akses atau keberlanjutan pendidikan, terutama pada kelompok rentan dan wilayah marginal.

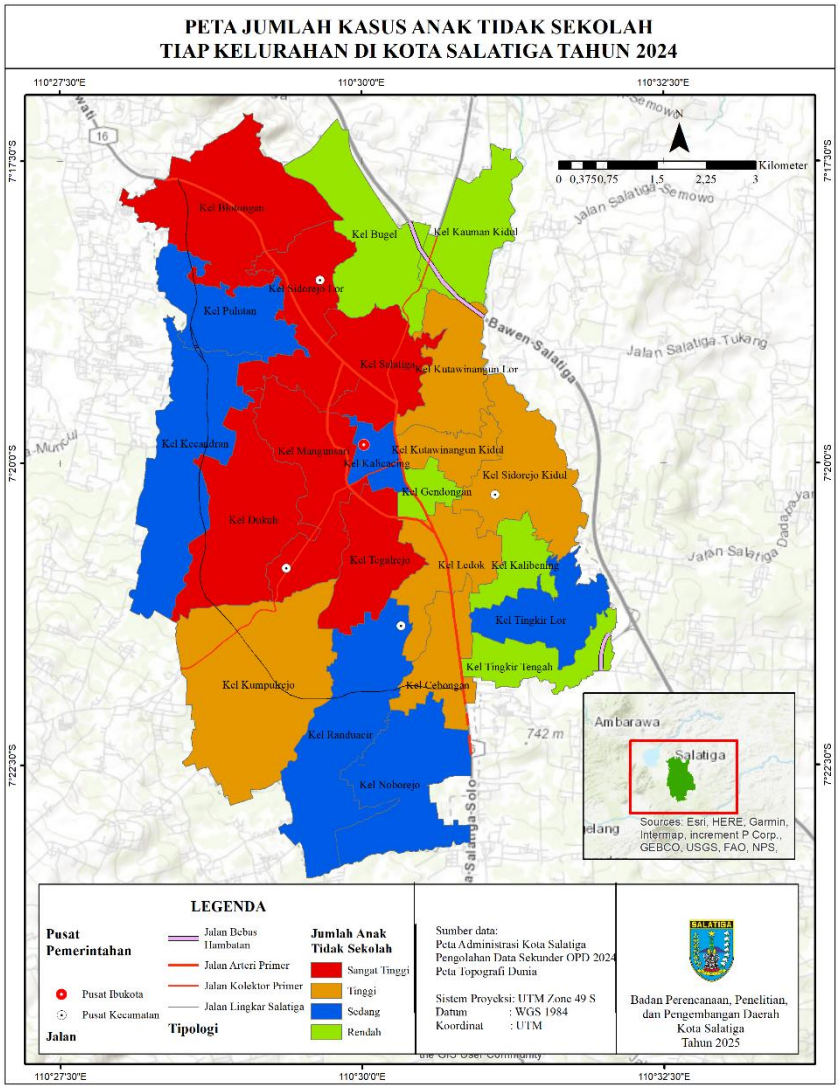


Gambar 3. 18 Grafik Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Salatiga Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS Kota Salatiga, 2025

Berdasarkan gambar Grafik Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Salatiga Tahun 2020 – 2024 menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah di Kota Salatiga mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 10,42 tahun. Angka ini terus meningkat mencapai 11,48 tahun di tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam akses pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal. Selama lima tahun terakhir, rata-rata lama sekolah di Kota Salatiga meningkat sebesar 1,06 tahun, menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang menyelesaikan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Dengan angka 11,48 tahun pada tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Salatiga telah menempuh pendidikan hingga tingkat menengah atas atau setara dengan SMA/Sederajat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

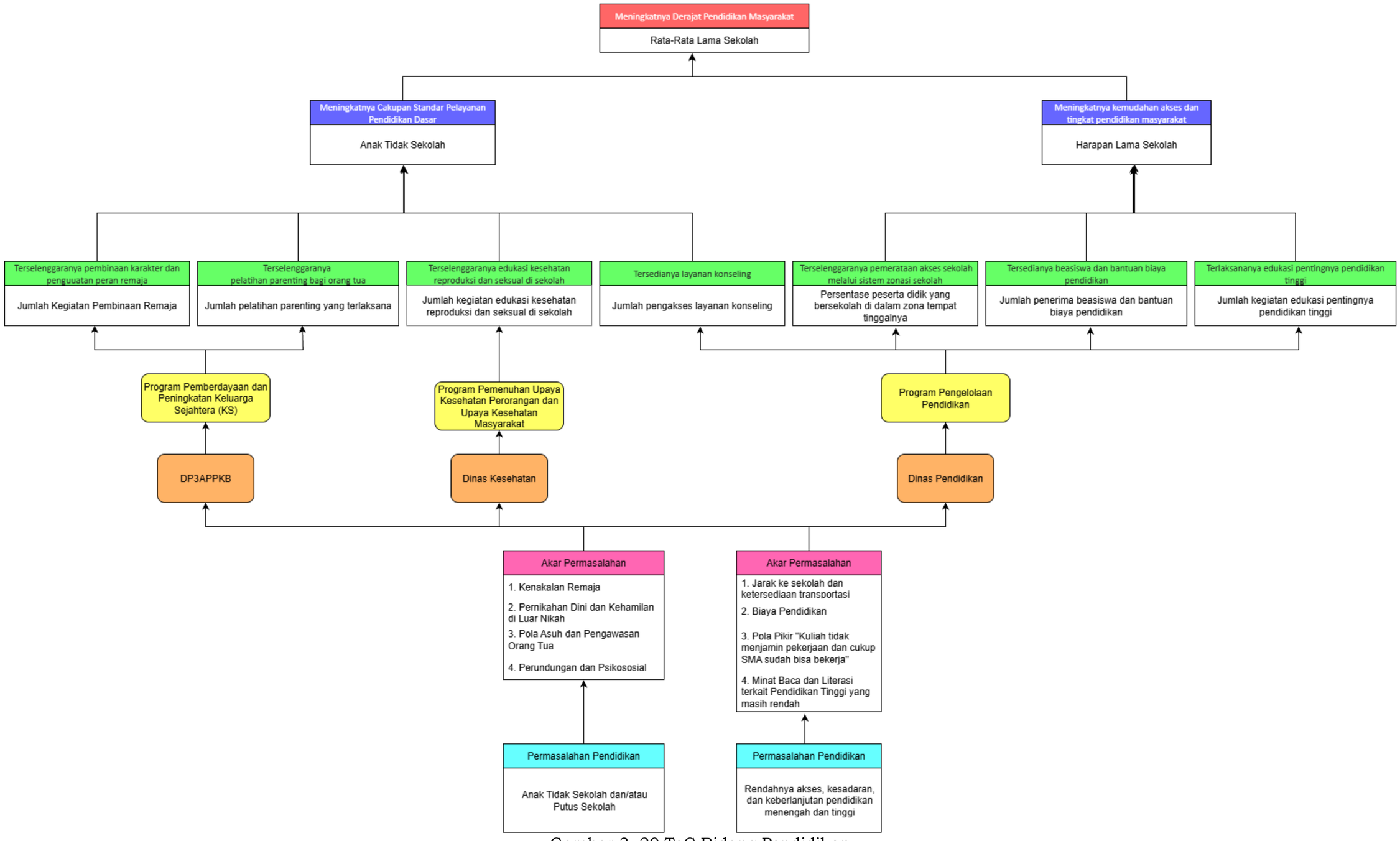


Gambar 3. 19 Peta Klasifikasi Jumlah Kasus ATS Tiap Kelurahan di Kota Salatiga Tahun 2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Tahun 2025, diolah

Meskipun Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Salatiga relatif tinggi, akan tetapi dunia pendidikan di Kota Salatiga masih menghadapi permasalahan terkait Anak Tidak Sekolah (ATS), yang merupakan indikator yang menggambarkan proporsi anak usia sekolah (umumnya 7–18 tahun) yang tidak sedang bersekolah pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Adanya kasus ATS menandakan bahwa masih terdapat tantangan dalam hal aksesibilitas dan keterjangkauan layanan pendidikan bagi seluruh kelompok masyarakat. Anak yang tidak bersekolah berpotensi menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan potensi diri, memperoleh pekerjaan layak di masa depan, serta berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan daerah. Berdasarkan data Dinas Pendidikan yang telah diolah, Terdapat 7 kelurahan di Kota Salatiga yang terklasifikasi sebagai Kelurahan dengan jumlah kasus anak tidak sekolah yang tergolong tinggi yakni Kelurahan Blontongan, Kelurahan Sidorejo Lor, Kelurahan Salatiga, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Tegalrejo, dan Kelurahan Ledok. Jumlah kasus anak tidak sekolah terbanyak ada di Kelurahan Blotongan (69 kasus).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 3. 20 ToC Bidang Pendidikan

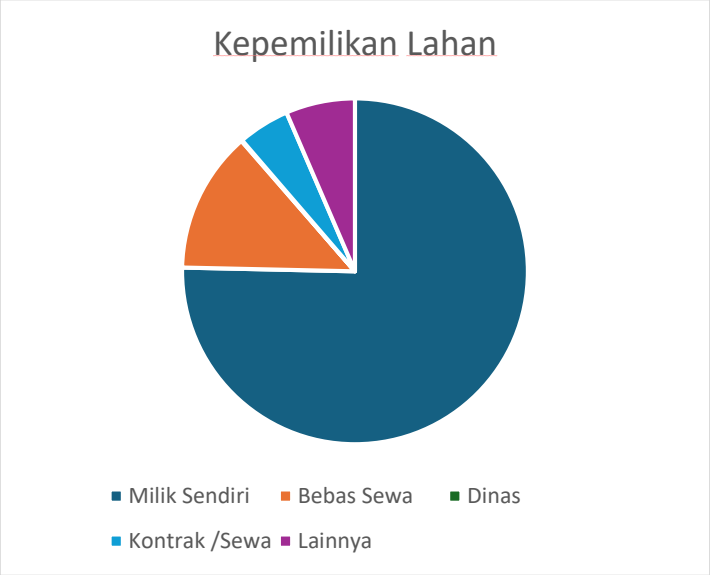
Sumber: Hasil Analisis FGD TKPK, Data Sekunder dari OPD, LP2KD, LKJIP, dan Renstra OPD, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3.4.5. Analisis Karateristik Permasalahan Infrastruktur Dasar

1. Kepemilikan lahan

Sekelompok atau perorangan yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara kayak dapat dikategorikan orang miskin. Hak dasar tidak hanya tentang hak atas sandang, pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan perumahan. Akan tetapi status kepemilikan lahan juga menjadi hak dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Status kepemilikan lahan yaitu bukti tertulis kepemilikan lahan atau tanah yang sah secara hukum. Masyarakat Kota Salatiga memiliki beragam status kepemilikan tanah, berikut grafik yang secara menggambarkan kondisi status kepemilikan tanah Kota Salatiga.



Gambar 3. 21 Status Kepemilikan Tanah di Kota Salatiga

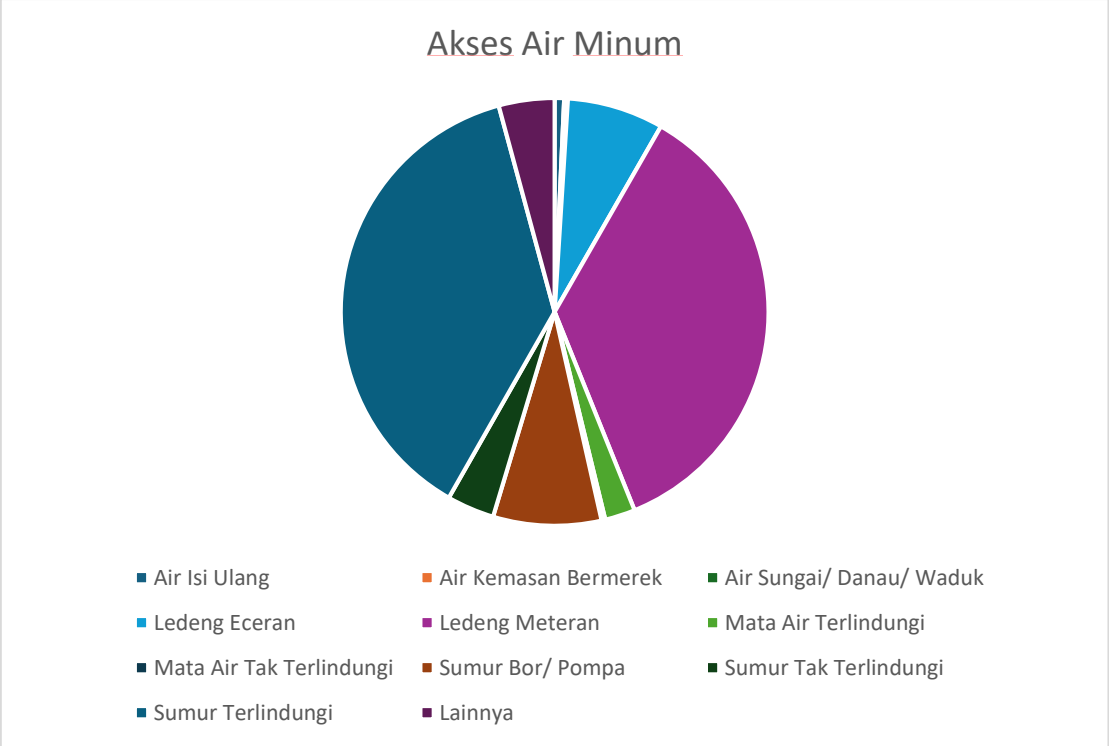
Sumber: Bappeda, Hasil Padupadan P3KE dan DTKS, (2024)

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar status kepemilikan lahan masyarakat Kota Salatiga adalah status milik sendiri. Adapun rincinaya status kepemilikan lahan di Kota Salatiga adalah 75 persen miliki sendiri, 13 persen bebas sewa, 5 persen kontrak sewa, dan 6 persen untuk status lainya yang tidak tertulis.

2. Sumber Air Minum Utama

Kemiskinan makro maupun mikro dapat dilihat dengan mengukur kemampuan memenuhi kebutuhan basik (*basic needs approach*). Salah satu kebutuhan memenuhi dasar tersebut adalah terkait akses air minum bersih. Rumah tangga miskin umumnya memiliki keterbataan untuk mengakses air minum secara berkelanjutan dan aman. Berikut ketersediaan akses air minum bagi masyarakat Kota Salatiga tertera dalam grafik dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 3. 22 Sumber Air Minum Rumah Tangga di Kota Salatiga

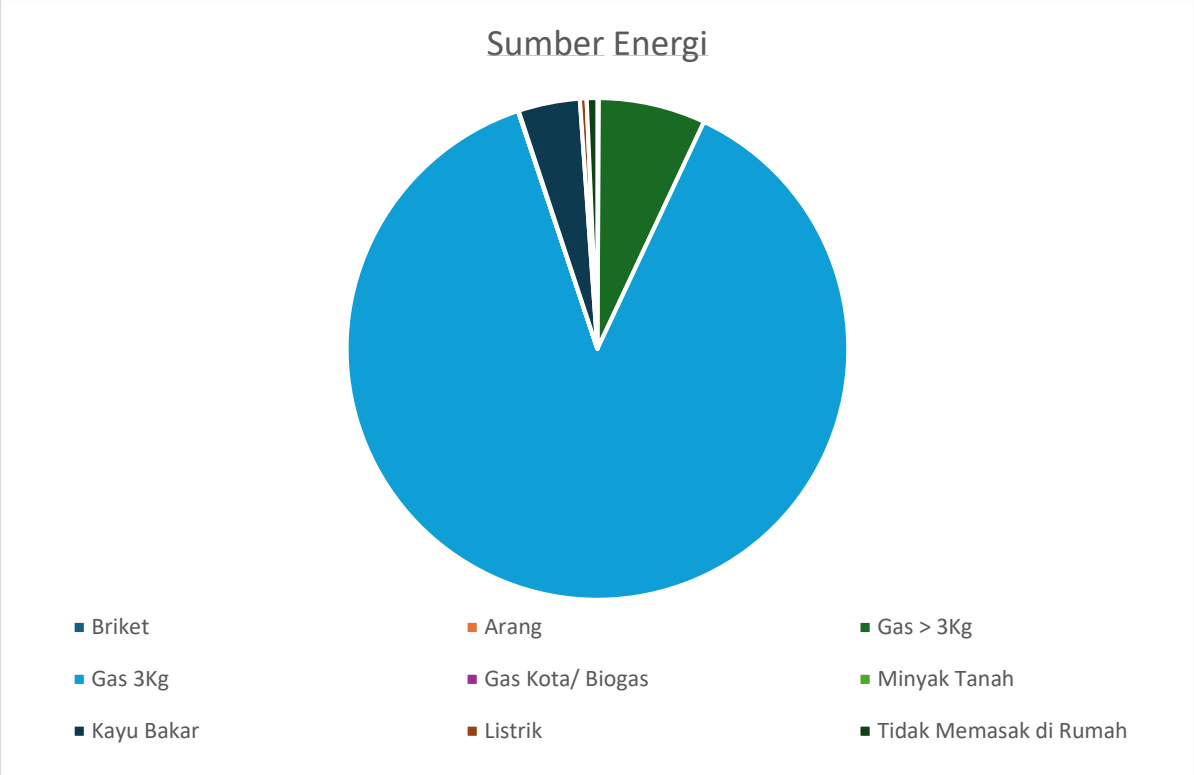
Sumber: Bappeda, Hasil Padupadan P3KE dan DTKS, (2024)

Grafik diatas memperlihatkan mayoritas rumah tangga di Kota Salatiga menggunakan sumber air minum dari sumur terlindungi diikuti ledeng meteran dengan persentase masing-masing sebesar 38 persen dan 36 persen. Kemudian ada sumber air sumur bor atau pompa sebesar 8 persen dan ledeng eceran sebesar 6 persen. Adapun seperti air isi ulang, air kemasan bermerek, air sungai, mata air terlindungi, mata air tak terlindungi, sumur tak terlindung dan lainya, yang mana masing-masing nilainya tidak lebih dari 5 persen.

3. Sumber Energi untuk Memasak

Kemiskinan seringkali dilihat dari kegiatan atau aktivitas rumah tangga, salah satunya adalah aktivitas memasak. Aktivitas ini memerlukan sumber energi atau bahan bakar untuk dapat berjalan dengan lancar. Rumah tangga miskin biasanya masih menggunakan bahan bakar tradisional seperti kayu bakar atau arang sebagai jenis bahan bakar utama. Namun, kebiasaan penggunaan bahan bakar tersebut justru berbahaya bagi seluruh anggota keluarga yang ada di lingkungan rumah karena terjadinya polusi udara sehingga berdampak pada kesehatan. Berikut sebaran penggunaan bahan bakar atau sumber energi yang digunakan rumah tangga di Kota Salatiga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 3. 23 Sumber Energi Rumah Tangga di Kota Salatiga

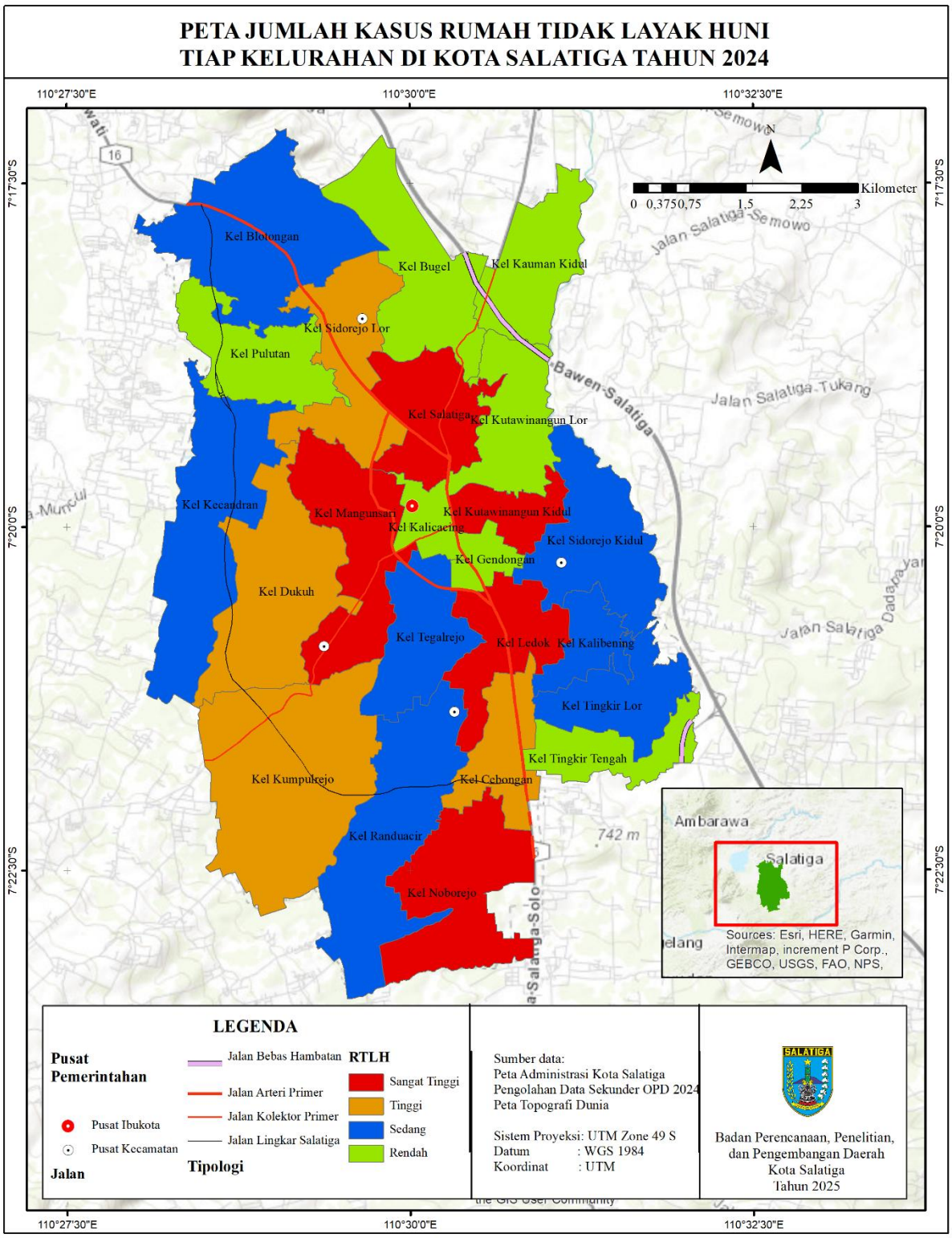
Sumber: Bappeda, Hasil Padupadan P3KE dan DTKS, (2024)

Sebagian besar rumah tangga di Kota Salatiga memasak menggunakan gas LPG 3 kg yaitu sebanyak 38 persen, disusul urutan kedua memasak dengan menggunakan gas >3 kg sebesar 7 persen, kemudian kayu bakar sebesar 4 persen, dan sisanya tidak lebih dari 1 persen. Hal ini menandakan bahwa rumah tangga di Kota Salatiga memiliki kemampuan dalam membeli gas LPG dan kemampuan dalam membeli kompor gas yang lebih ramah lingkungan jika dibandingkan penggunaan sumber energi tradisional.

4. Rumah Tidak Layak Huni

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mendefinisikan rumah sebagai bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Salah satu indikator pelayanan pada sub urusan perumahan adalah keberadaan jumlah rumah layak huni. Sayang urusan ini masih belum tertangani dengan baik karena masih terdapat daerah-daerah yang masih memiliki jumlah rumah tidak layak huni tak terkecuali Kota Salatiga yang memiliki jumlah rumah tidak layak huni yang tersebar di beberapa kelurahan. Berikut peta angka rumah tidak layak huni Kota Salatiga tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 3. 24 Peta Angka Rumah Tidak Layak Huni Kota Salatiga Tahun 2024

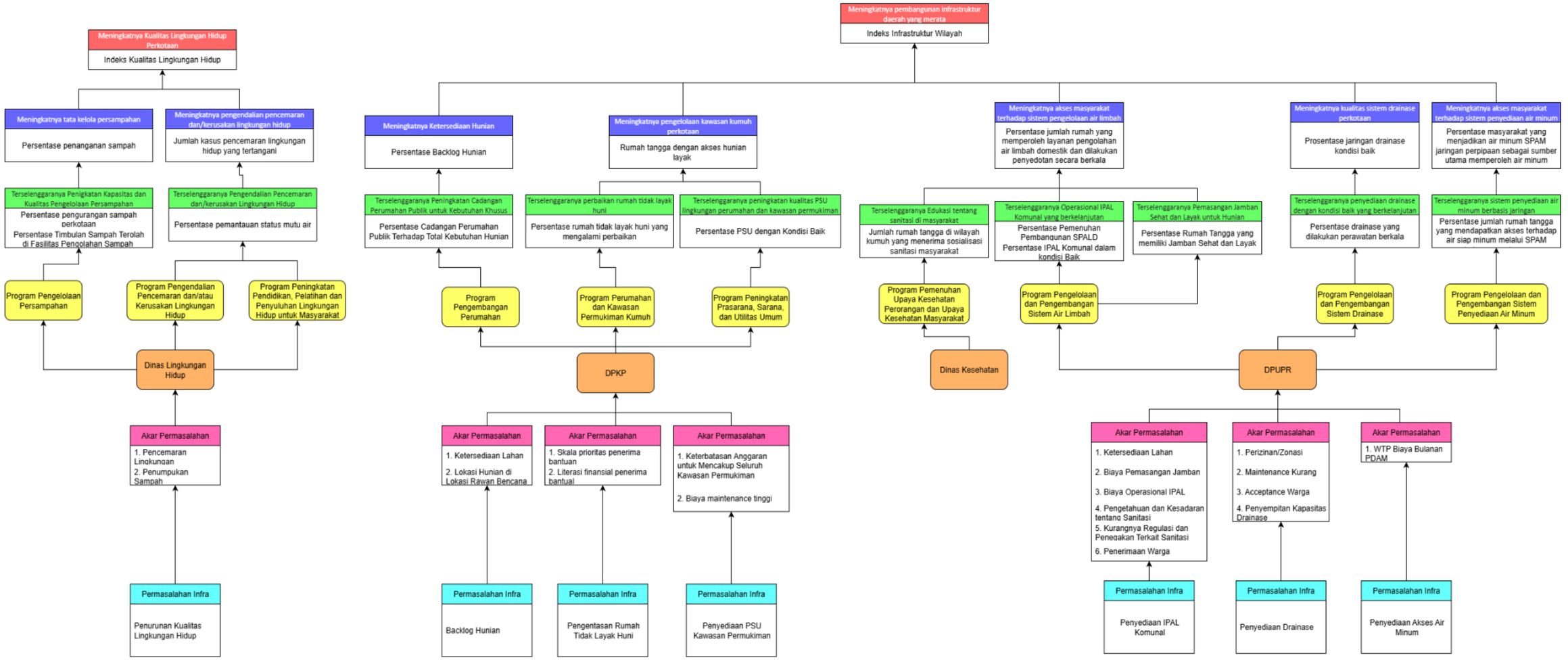
Sumber: DPKP, 2025

Pada tahun 2014, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tertinggi berada di Kelurahan Mangunsari, Noborejo, Ledok, Kutowinangun Kidul, dan Kelurahan Salatiga. Kelurahan-kelurahan ini cenderung berada di tengah kota kecuali Kelurahan Noborejo. Adapun kelurahan yang memiliki RTLH rendah yaitu Kelurahan Pulutan, Bugel, Tingkir Tengah, Kalicacing,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Gendongan, Kutowinangun Lor, dan Kelurahan Kauman Kidul. Jika dilihat dari total 23 kelurahan yang ada di Kota Salatiga, terdapat 5 kelurahan memiliki proporsi RTLH sangat tinggi, 4 kelurahan dengan proporsi RTLH Tinggi, 6 Kelurahan memiliki proporsi RTLH sedang, dan 7 kelurahan memiliki proporsi RTLH rendah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 3. 25 ToC Bidang Infrastruktur

Sumber: Hasil Analisis FGD TKPK, Data Sekunder dari OPD, LP2KD, LKJIP, dan Renstra OPD, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3.4.6. Analisis Karateristik Permasalahan Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan individu, keluarga, kelompok, atau komunitas yang berada dalam kondisi kerentanan sosial sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak, baik dari aspek fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Dengan keberagaman karakteristik tersebut, penanganan terhadap PPKS membutuhkan pendekatan yang multidimensi dan lintas sektor.

Di Kota Salatiga, PPKS menjadi salah satu kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dalam kerangka penanggulangan kemiskinan. Masih tingginya jumlah PPKS mencerminkan adanya kelompok masyarakat yang sangat rentan dan berada dalam posisi paling bawah dalam struktur kesejahteraan sosial. Kondisi ini semakin diperparah dengan belum optimalnya pelayanan sosial dasar, belum memadainya kapasitas pendamping sosial, serta belum terintegrasinya intervensi penanganan PPKS antar lembaga dan sektor. Berikut merupakan data PPKS Kota Salatiga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.

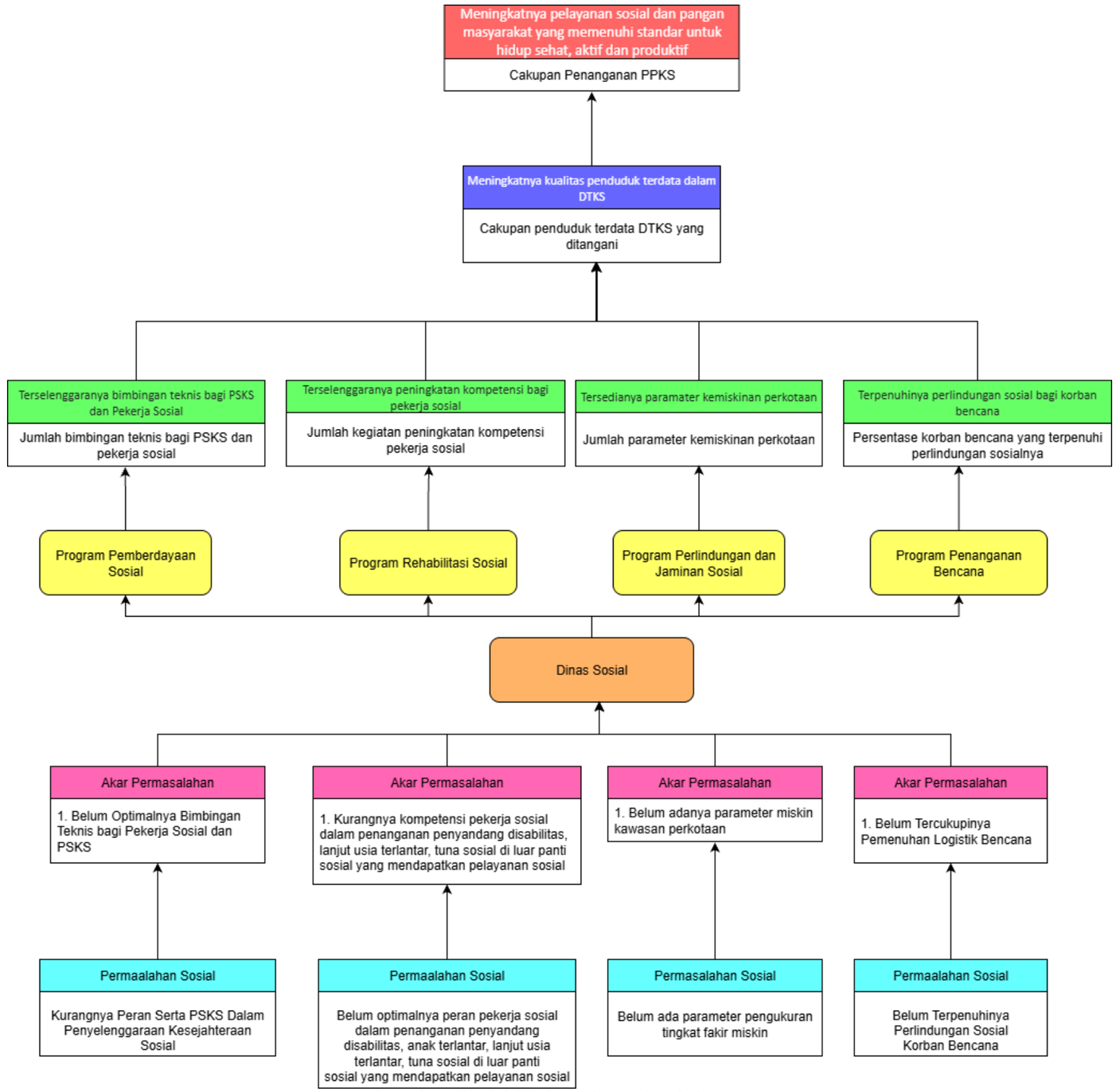
Tabel 3. 18 Jumlah PPKS Kota Salatiga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Jumlah PPKS	**Tahun**				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Kota Salatiga	15.861	18.725	18.634	17.155	24.323
Jawa Tengah	4.056.054	4.654.151	4.579.790	4.112.263	4.007.316

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan tren perkembangan jumlah PPKS antara Kota Salatiga dan Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020 jumlah PPKS Kota Salatiga berjumlah 15.861 dan mengalami penambahan hingga menjadi 24.323 PPKS pada tahun 2024. Sedangkan pada level Provinsi, jumlah PPKS Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 mencapai 4.056.054 dan mengalami penurunan hingga menjadi 4.007.316 PPKS pada tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



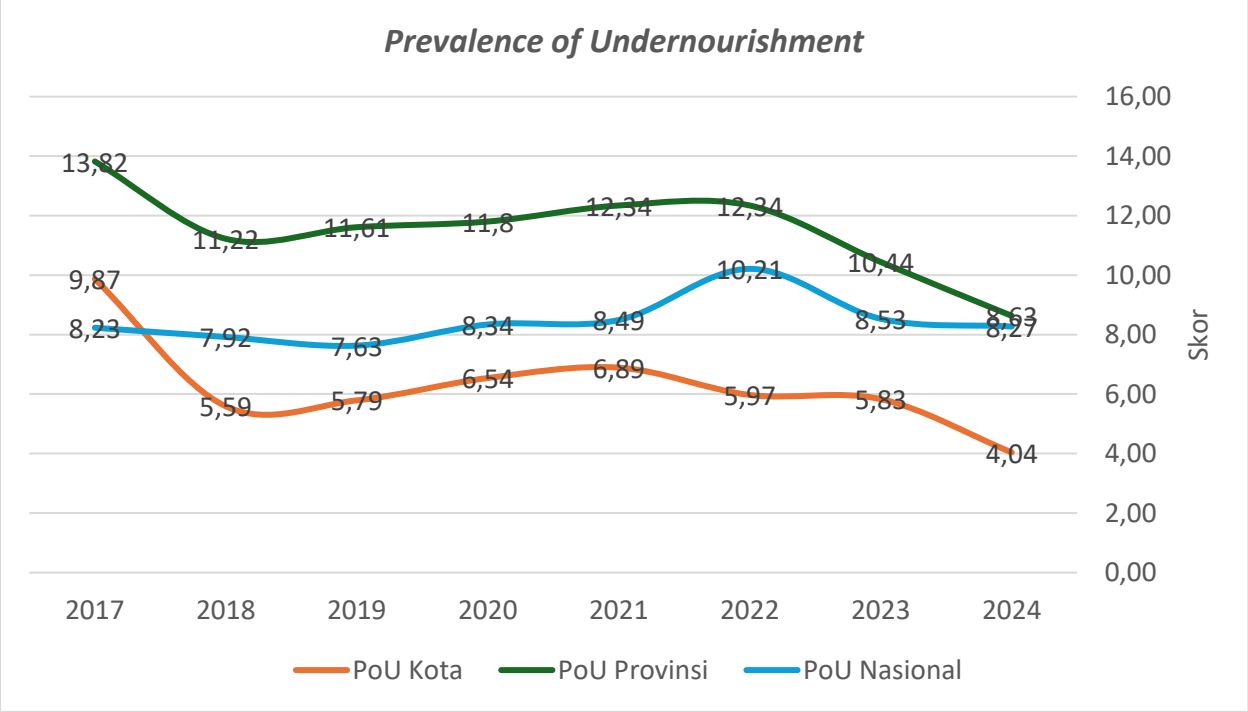
Gambar 3. 26 ToC Bidang Sosial

Sumber: Hasil Analisis FGD TKPK, Data Sekunder dari OPD, LP2KD, LKJIP, dan Renstra OPD, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3.4.7. Analisis Karateristik Permasalahan Ketahanan Pangan

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment*/PoU) merupakan bagian dari suatu populasi penduduk di suatu wilayah yang mana konsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat. Angka PoU menjadi salah satu indikator dalam melihat tingkat ketahanan pangan di suatu daerah. Pada tahun 2018, skor PoU Kota Salatiga mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu dari 9,87 di tahun 2017 menjadi 5,57 di tahun 2018. Penurunan ini mengindikasikan keberhasilan pemerintah kota Salatiga dalam memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Namun sayangnya, skor PoU kembali naik di tahun 2019 bahkan kenaikan sampai dengan tahun 2021 yaitu menjadi 6,89. Setelah mengalami kenaikan secara beruntun, skor Pou Kota Salatiga mengalami penurun kambali sampai dengan tahun 2024 yaitu dengan skor 4,04. Lebih lengkapnya dapat melihat grafik PoU di bawah ini.



Gambar 3. 27 Perkembangan PoU Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2024

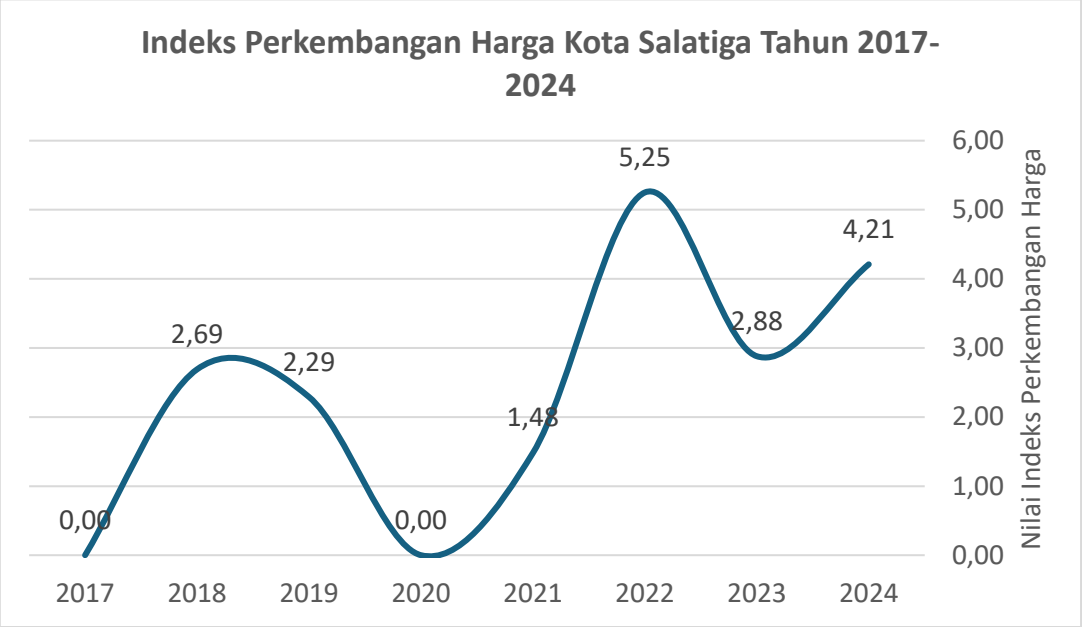
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa skor PoU Kota Salatiga masih berada di bawah skor PoU provinsi dan nasional. Walaupun, pada periode tahun 2017, pernah berada di atas skor PoU nasional. Capaian ini cukup baik karena masih berada di bawah rata-rata skor PoU Provinsi Jawa Tengah dan skor PoU Nasional yang keduanya masih berada pada skor PoU lebih dari 8,00. Artinya skor PoU Kota Salatiga jauh lebih rendah dibanding PoU provinsi dan nasional. Sehingga dapat diartikan bahwa tingkat ketahanan pangan di Kota Salatiga lebih baik daripada Provinsi Jawa Tengah dan nasional.

Indeks Perkembangan Harga atau IPH merupakan indeks yang mengukur harga 20 komoditas pangan yang mempunyai nilai berat besar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

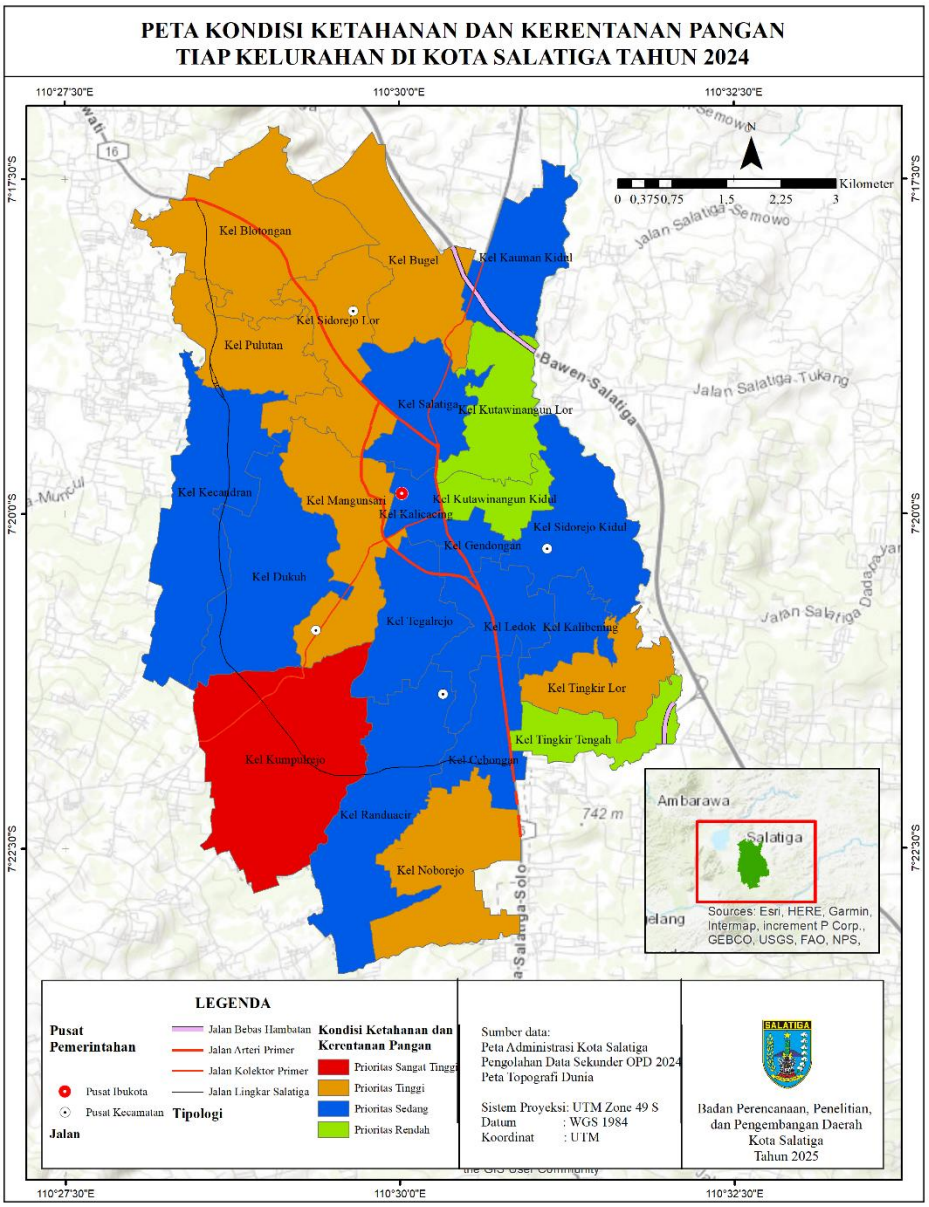
dalam konteks Indeks Harga Konsumen. Selain itu juga, IPH sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Perkembangan Harga di Kota Salatiga mengalami perjalanan yang naik turun sepanjang periode 12 yaitu tahun 2017-2024. Tercatat bahwa Indeks Perkembangan Harga di Kota Salatiga mengalami tiga kali kenaikan. Kenaikan pertama terjadi di tahun 2018 yang mana skor indeks menjadi 2,59 dan mengalami penurunan di tahun 2019 sampai 2021. Setelah itu, tren mengalami kenaikan sampai dengan skor 5,25 tahun 2022. Kenaikan skor tertinggi terjadi di tahun 202, bahkan menjadi skor tertinggi dalam kurun waktu 9 tahun terakhir dan kembali mengalami penurunan di tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat grafik Indeks Perkembangan di bawah ini.



Gambar 3. 28 Perkembangan Indeks Harga di Kota Salatiga

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

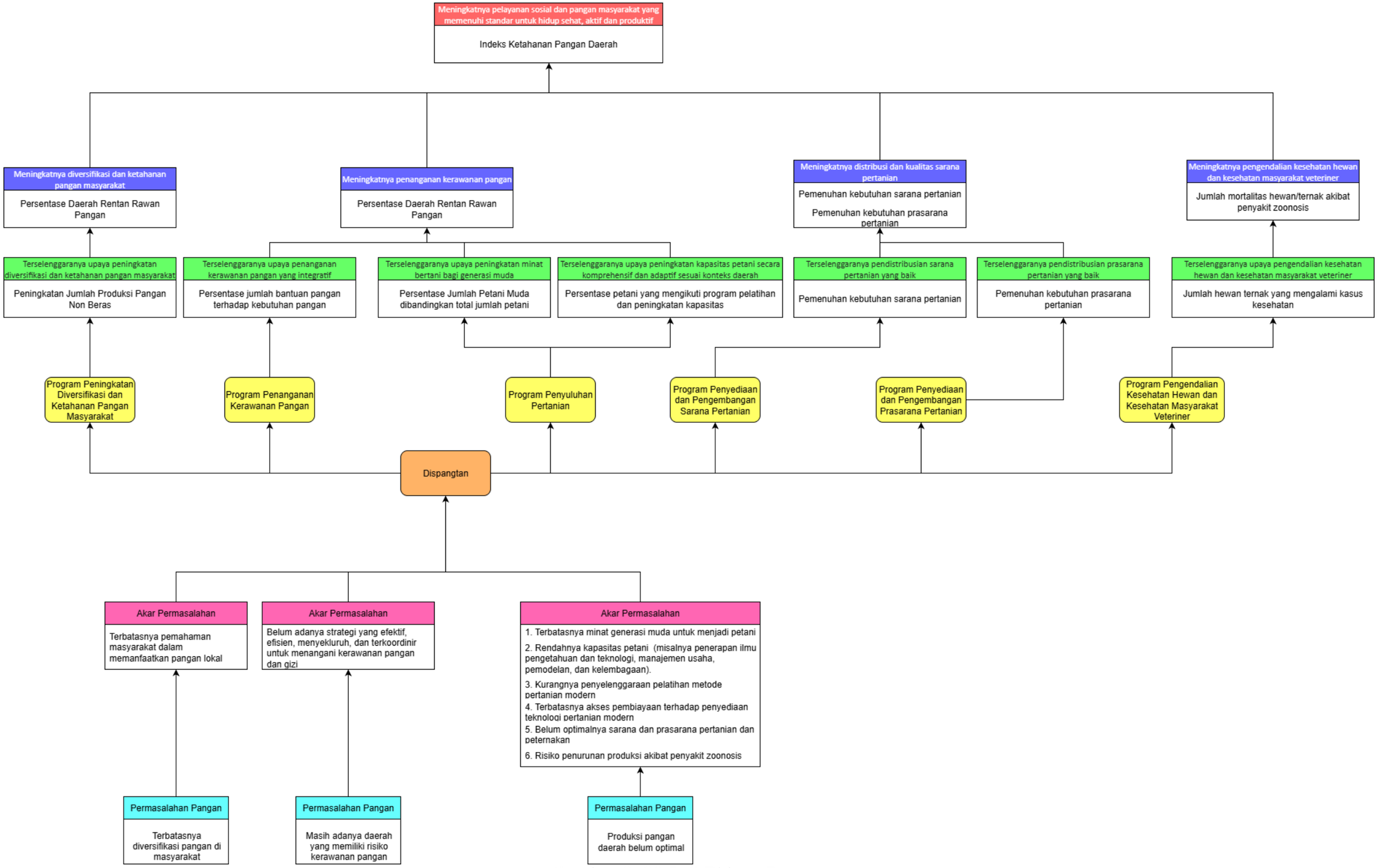
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 3. 29 Peta Kondisi Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Kota Salatiga

Sumber: FSVA Dispangtan Kota Salatiga, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 3. 30 ToC Bidang Pangan

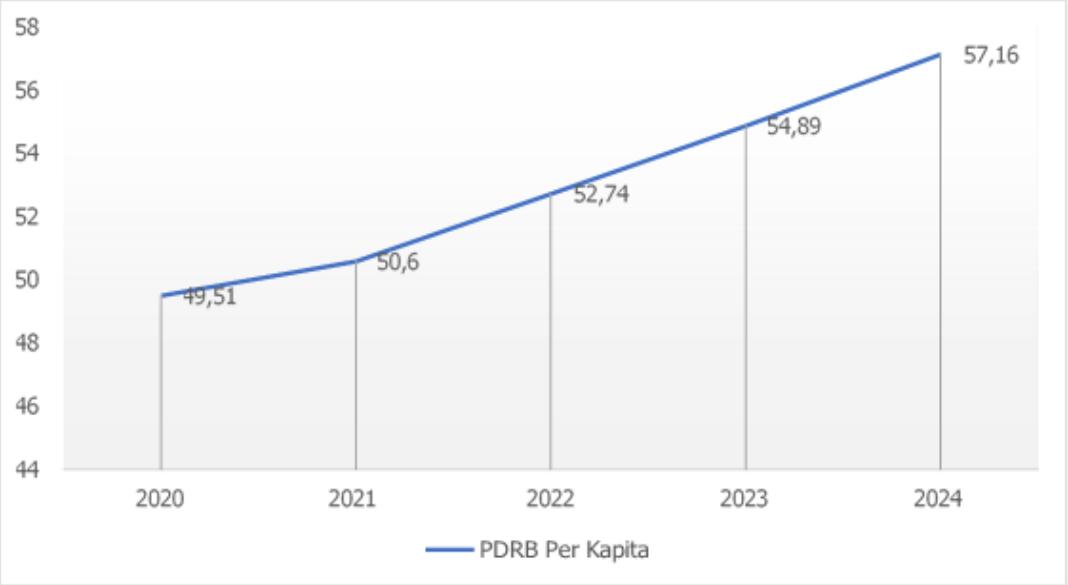
Sumber: Hasil Analisis FGD TKPK, Data Sekunder dari OPD, LP2KD, LKJIP, dan Renstra OPD, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3.4.8. Analisis Karateristik Permasalahan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan kesejahteraan masyarakat yang baik. Salah satu indikator lain yang berkaitan dengan PDRB dan dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan pendapatan rata-rata per orang yang diperoleh dari pembagian antara PDRB dan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. Indikator ini penting karena menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah serta menunjukkan kinerja dan hasil pembangunan.

Nilai PDRB per kapita Kota Salatiga selama periode 2020-2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat, dimulai dari tahun 2020 sebesar 49,51 juta rupiah dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 57,16 juta rupiah tahun 2024. Selama lima tahun terakhir. PDRB per kapita Kota Salatiga mengalami peningkatan sebesar 7,65 juta rupiah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

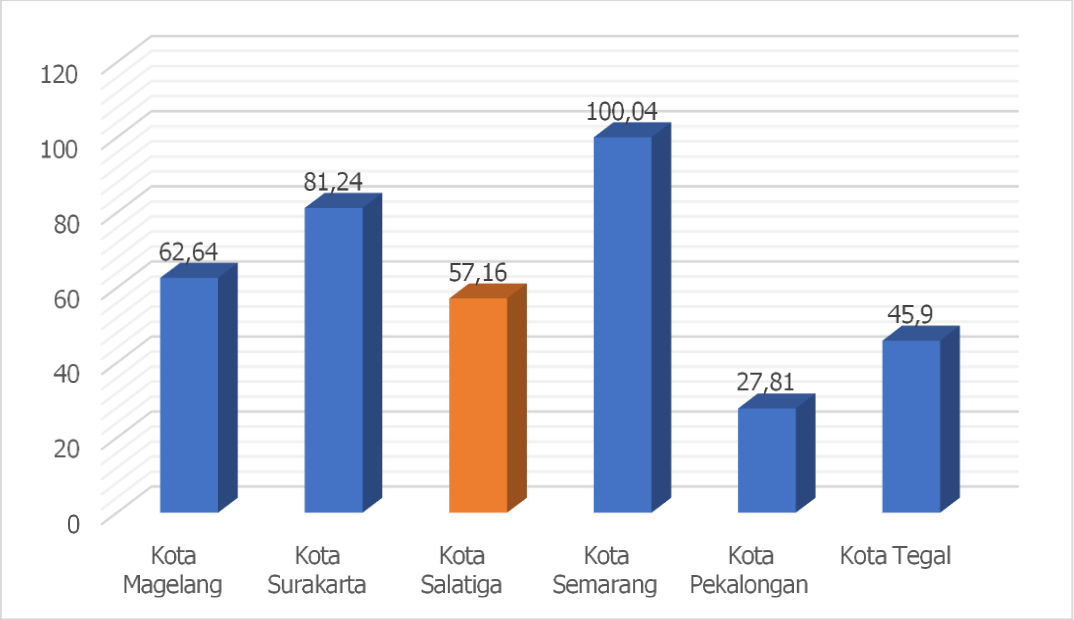


Gambar 3. 31 Perkembangan PDRB per kapita Kota Salatiga Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2025

Jika dibandingkan dengan Kota di Provinsi Jawa Tengah, PDRB per kapita Kota Salatiga berada di posisi lebih tinggi dibandingkan Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Namun lebih rendah dibandingkan Kota Magelang, Surakarta dan Semarang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

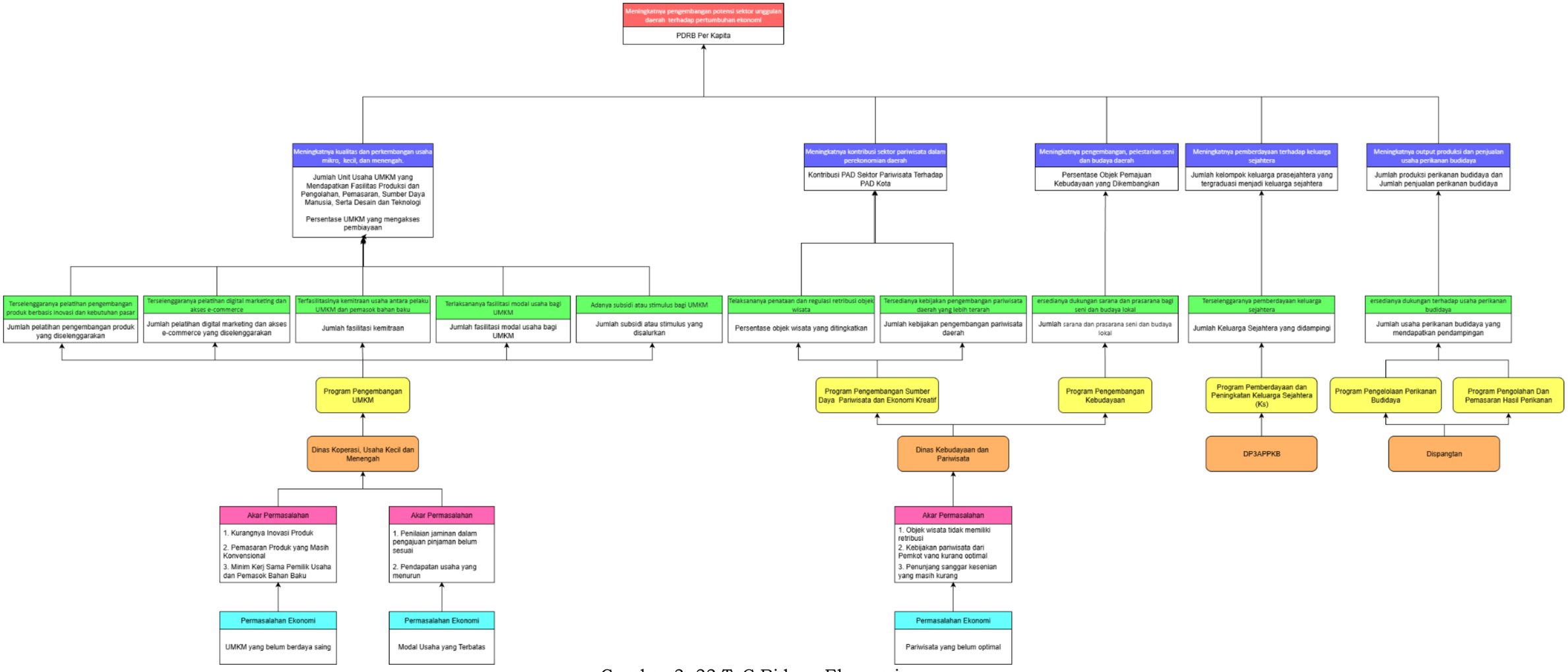
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 3. 32 Perbandingan PDRB per kapita Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 3. 33 ToC Bidang Ekonomi

Sumber: Hasil Analisis FGD TKPK, Data Sekunder dari OPD, LP2KD, LKJIP, dan Renstra OPD, 2025

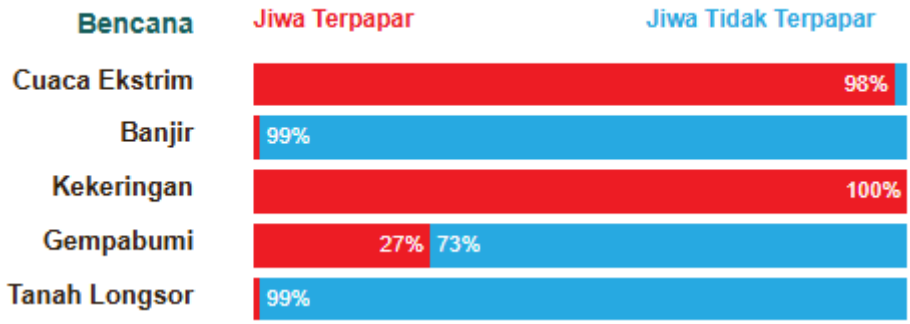
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3.4.9. Analisis Karateristik Permasalahan Kewilayahan

Bencana dan kemiskinan memiliki hubungan yang erat dan saling memperkuat *(interdependent and reinforcing)*. Masyarakat miskin cenderung menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak bencana karena keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya, tempat tinggal yang aman, serta perlindungan sosial. Mereka sering tinggal di lokasi rawan bencana seperti bantaran sungai, lereng curam, atau kawasan kumuh yang tidak memiliki infrastruktur memadai. Ketika bencana terjadi, kelompok ini biasanya mengalami kerugian paling besar, seperti kehilangan tempat tinggal, aset produktif, atau bahkan sumber penghidupan utama.

Kemiskinan juga meningkatkan kerentanan terhadap bencana. Keterbatasan ekonomi membuat masyarakat miskin sulit melakukan langkah mitigasi seperti memperkuat bangunan, menabung untuk keadaan darurat, atau mengakses layanan informasi dan sistem peringatan dini. Ketergantungan mereka terhadap sektor informal atau sektor yang rentan terhadap gangguan alam, seperti pertanian dan perikanan, membuat mereka semakin tidak siap menghadapi bencana. Interaksi antara kemiskinan dan bencana menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Bencana memperburuk kondisi kemiskinan, dan kemiskinan memperbesar risiko serta dampak dari bencana.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan penting dipahami kondisi kebencanaan sebagai bagian isu kewilayahan dalam penanggulangan kemiskinan. Berikut merupakan kondisi kebencanaan di Kota Salatiga.

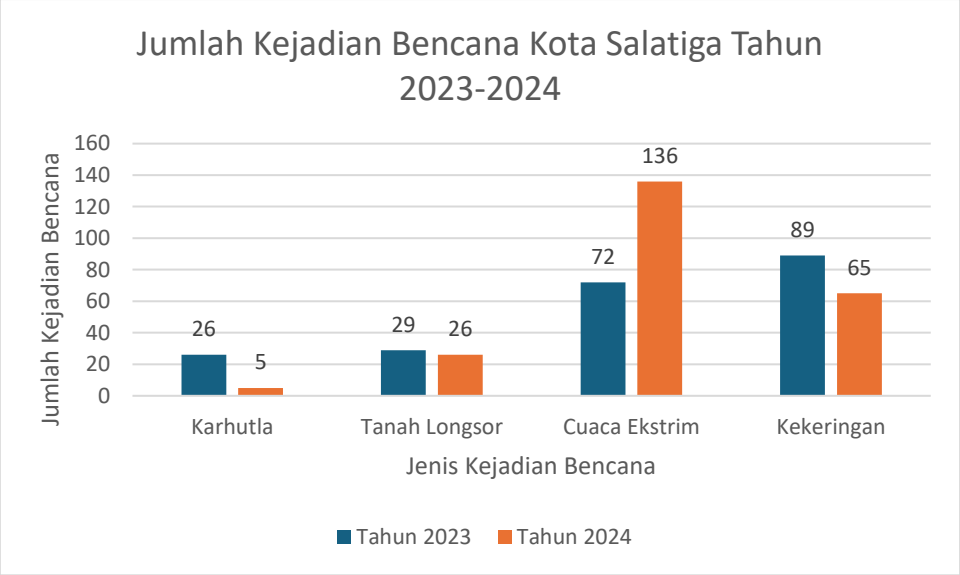


Gambar 3. 34 Kondisi Keterpaparan Masyarakat Kota Salatiga Terhadap Bahaya Bencana

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, (2025)

Berdasarkan data di atas dapat diamati bahwa sebagian besar masyarakat Kota Salatiga memiliki potensi terpapar akan bencana cuaca ekstrim dan kekeringan. Sedangkan, potensi bencana yang lain juga tidak dapat dipungkiri walaupun potensi keterpaparannya relatif rendah, namun bukan berarti bahaya bencana tersebut tidak ada. Selalu ada potensi dari bahanya bencana tersebut menyebabkan kerusakan yang dapat memperparah atau memperlambat upaya penanggulangan kemiskinan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 3. 35 Jumlah Kejadian Bencana Kota Salatiga

Sumber: Data Sekunder BPBD Kota Salatiga, (2025)

Secara lebih detail, sebagaimana jumlah populasi yang memiliki potensi keterpaparan, nilai jumlah kejadian bencana Kota Salatiga juga menunjukkan terkait cuaca ekstrim dan kekeringan memiliki frekuensi kejadian bencana yang paling tinggi dalam sekurangnya 2 tahun terakhir. Kondisi cuaca yang ekstrim dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur maupun hunian yang pada akhirnya dapat menjadi hambatan dalam perwujudan capaian penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur. Kondisi kekeringan yang cukup memiliki frekuensi yang tinggi juga menjadi hambatan dalam menyalurkan akses terhadap air bersih dan air minum yang vital bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat utamanya masyarakat miskin.



Gambar 3. 36 Tren Perkembangan dan Perbandingan Capaian Indeks Risiko Bencana

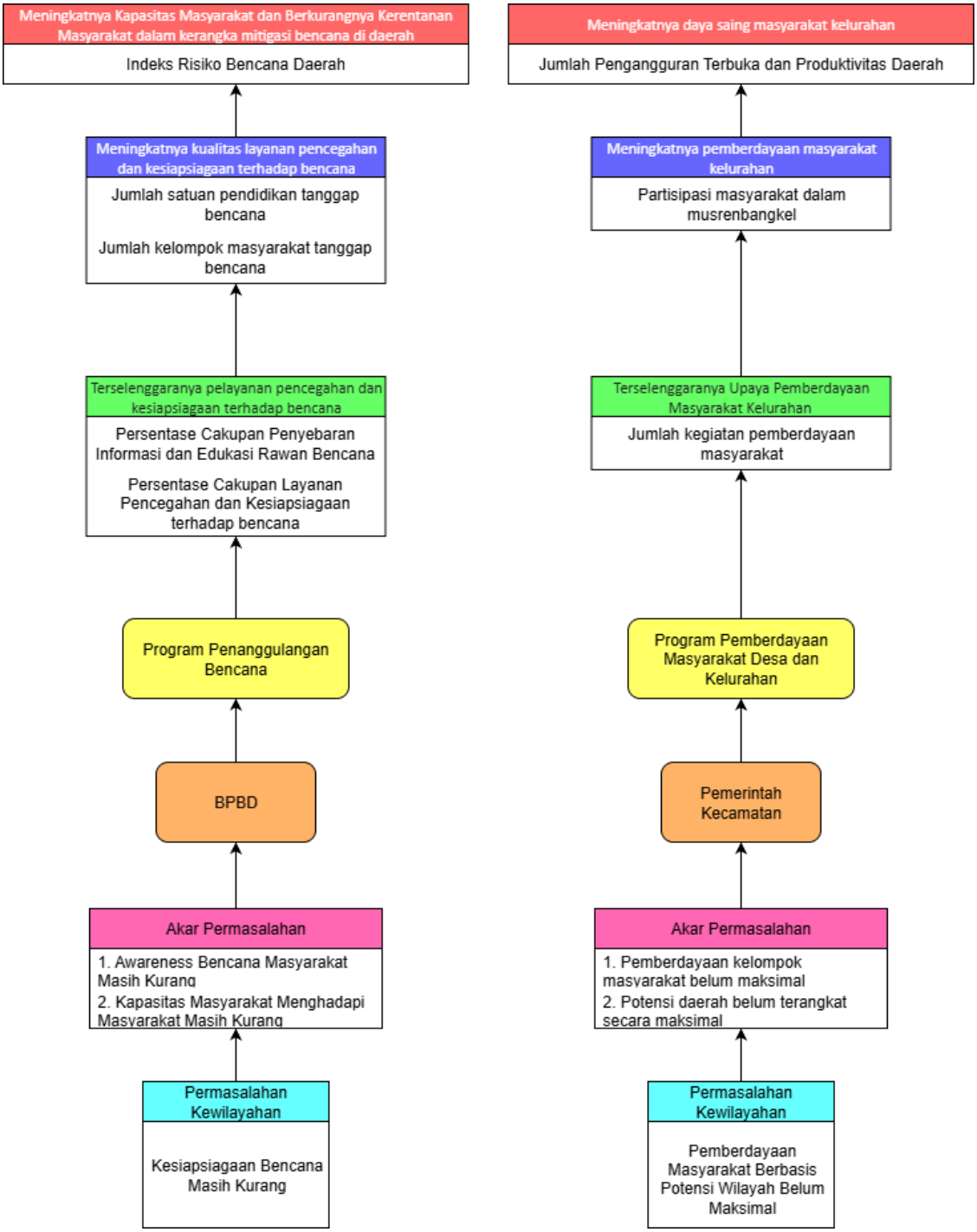
Sumber: Badan Naional Penanggulangan Bencana, 2025

Secara capaian pembangunan di bidang kebencanaan, Kota Salatiga memiliki nilai capaian yang lebih baik dibandingkan nasional dan provinsi. Hal ini dibuktikan nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Salatiga yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

secara konsisten dalam 6 tahun terakhir berada di bawah nilai provinsi dan nasional. Kota Salatiga sendiri juga dalam 6 tahun terakhir memiliki tren penurunan nilai IRB walaupun dalam *rate* yang lebih lambat dibandingkan nasional dan provinsi. Secara klasifikasi nasional selama 6 tahun terakhir Kota Salatiga masih masuk dalam kategori risiko sedang. Kondisi capaian IRB ini perlu dipahami bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan diperlukan juga upaya penurunan risiko bencana untuk mengurangi dampak bencana dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



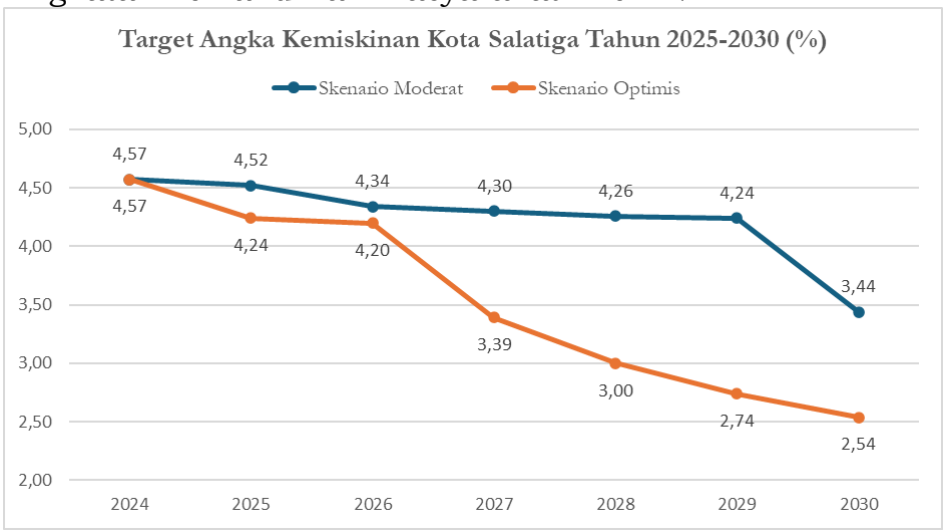
Gambar 3. 37 ToC Bidang Kewilayahan

Sumber: Hasil Analisis FGD TKPK, Data Sekunder dari OPD, LP2KD, LKJIP, dan Renstra OPD, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3.5 Target Kemiskinan Daerah

Penetapan target penurunan angka kemiskinan di Kota Salatiga merupakan bagian dari upaya sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam mengurangi angka kemiskinan secara bertahap dan terukur. Target ini bukan hanya bersifat kuantitatif yang berfokus pada penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi juga bersifat kualitatif yang menekankan pada perbaikan kualitas hidup, pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi, serta peningkatan kemandirian masyarakat miskin.



Gambar 3. 38 Target Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2025-2030
Sumber: Hasil Evaluasi RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029, 14 Agustus 2025

Target ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program perangkat daerah utamanya dalam penanggulangan kemiskinan pada periode tahun 2025-2030. Setiap perangkat daerah diharapkan dapat mengintegrasikan upaya penanggulangan kemiskinan ke dalam rencana kerja dan program prioritasnya, sehingga pelaksanaannya tidak bersifat sektoral semata, melainkan menjadi kerja lintas sektor yang saling mendukung dan memperkuat. Berikut merupakan target penurunan kemiskinan daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2030 dalam skenario moderat maupun optimis.

Tabel 3. 19 Target Penurunan Kemiskinan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2030

	Skenario	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Besaran Penuruan Angka Kemiskinan Tiap Tahun (persen)	Moderat	0,05	0,18	0,04	0,04	0,02	0,01
	Optimis	0,33	0,04	0,81	0,39	0,26	0,2

Sumber: Hasil Evaluasi Rancangan Akhir RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029, 2025

3.6 Tinjauan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan sebagaimana tercantum pada poin pertama Tujuan Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Berkelanjutan Agenda 2030 "*End poverty in all its forms everywhere*" (Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di manapun). Pada lingkup nasional, penanggulangan kemiskinan turut menjadi perhatian dan prioritas pemerintah baik pada perencanaan pembangunan yang bersifat jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 disebutkan bahwa salah satu sasaran utama visi Indonesia di tahun 2045 adalah kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, dengan tingkat kemiskinan berkisar 0,5 – 0,8 persen dan ketimpangan pada kisaran 0,29-0,32. Selain itu, upaya penanganan kemiskinan jangka panjang lain yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah menyusun Peta Jalan Pemberantasan Kemiskinan 2025-2045 dengan tujuan memberikan gambaran tentang capaian dan tantangan penanganan kemiskinan periode sebelumnya, serta sebagai inspirasi dan pijakan dalam penyusunan rencana pembangunan untuk menekan angka kemiskinan hingga 0 persen sebelum tahun 2045.

Selaras dengan RPJPN, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 – 2029 disampaikan juga bahwa pemberantasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita nomor 6 yaitu Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Pemberantasan kemiskinan juga menjadi salah satu dari 17 program Prioritas Presiden. Selain itu, upaya pemberantasan kemiskinan juga tercantum dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins)* yakni Melanjutkan dan menambah program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk mencapai Sasaran Utama Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 yang salah satunya adalah kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang. Pada tahun 2029 ditargetkan angka kemiskinan berada pada kisaran 4,5-5,0 persen (dengan tingkat kemiskinan ekstrim 0 persen di tahun kedua) dan Rasio Gini pada kisaran 0,372-0,375.

Pada tingkat nasional, upaya pemberantasan kemiskinan juga dilakukan melalui penguatan kelembagaan pada tingkat nasional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, pemerintah membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan dukungan percepatan pengentasan kemiskinan terpadu. Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemberantasan kemiskinan yang efektif adalah melalui pengembangan sistem dan basis Data Tunggal Kemiskinan Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Penanggulangan kemiskinan juga selalu menjadi prioritas dan perhatian pada rencana pembangunan tingkat provinsi, mengingat Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan yang selalu lebih tinggi dibandingkan nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 – 2029 disebutkan bahwa penurunan kemiskinan merupakan salah satu isu strategis daerah dan merupakan tantangan yang harus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

diselesaikan. Pada periode sebelumnya upaya-upaya penanggulangan kemiskinan juga telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan untuk mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Selain itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2024.

Sejalan dengan pemerintah provinsi, isu kemiskinan juga menjadi isu prioritas pembangunan di Kota Salatiga dari periode ke periode. Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Salatiga Tahun 2023-2027. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan meliputi:

1. Kebijakan untuk Meningkatkan Kesejahteraan
   Kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan diarahkan pada peningkatan keterjangkauan warga miskin terhadap kebutuhan dasar manusia, baik itu kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, air bersih dan sanitasi, rasa aman dan goncangan sosial serta bencana. Kebijakan ini juga mendorong peningkatan pendapatan warga miskin dengan memberikan peluang kesempatan kerja, dan usaha.
2. Kebijakan untuk Mengembangkan Kemandirian
   Upaya pengembangan kemandirian warga miskin dilakukan melalui berbagai kebijakan yang sifatnya memberdayakan masyarakat, meningkatkan produktifitas dan pengetahuan serta mendorong sinergi dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga
3. Kebijakan Mewujudkan Masyarakat yang Bermartabat
   Kebijakan mewujudkan masyarakat yang bermartabat dilakukan dengan berbagai langkah kebijakan dengan mendorong perilaku, budaya masyarakat menjunjung tinggi moral, religiusitas, memiliki akhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, prinsip kemasyarakatan dan menghormati kearifan lokal sehingga mempunyai jati diri dan mampu sejajar dan bersaing dengan daerah lain.

Selain itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029, kemiskinan dan kesenjangan merupakan salah satu isu strategis daerah. Isu kemiskinan masih menjadi persoalan yang harus ditangani lima tahun ke depan. Angka kemiskinan di Kota Salatiga relatif kecil, namun semakin kecil angka kemiskinan maka semakin besar tantangan penurunannya. Tingginya tingkat kesenjangan pendapatan penduduk menjadi persoalan utama kemiskinan di Kota Salatiga. Untuk itu, perlu pendekatan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai kelembagaan yang ada di Kota Salatiga, tidak hanya bertumpu pada perangkat daerah. Maka dari itu penanggulangan kemiskinan juga muncul

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dalam salah satu misi RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 yaitu Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pemerataan dan peningkatan kualitas. Harapannya pada akhir periode RPJMD, angka kemiskinan Kota Salatiga dapat berada pada kisaran 4,23-2,54 persen.

3.7 Tinjauan Kelembagaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, upaya penanggulangan kemiskinan pada level kabupaten/kota dilakukan oleh perangkat daerah dibantu oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut TKPK yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

TKPK Kota Salatiga mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya. TKPK Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a) Penyusunan RPKD dan rencana aksi Kota Salatiga;
b) Koordinasi penyusunan rancangan RKPD Kota Salatiga di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
c) Koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
d) Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
e) Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
f) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Keanggotaan TKPK Kota Salatiga terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang terbagi ke dalam Tim Koordinasi TKPK, Tim Pengelola Program, dan Sekretariat TKPK. Susunan keanggotaan TKPK Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 20 Susunan Keanggotaan TKPK Kota Salatiga

Jabatan dalam TKPK	Jabatan dalam Dinas/Unsur
Penaggung Jawab	Wali Kota
Ketua	Wakil Wali Kota
Sekretaris	Kepala Bappeda
Wakil Sekretaris	Kepala Dinas Sosial
Anggota	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Kepala DP3APPKB
	Inspektur
	Kepala BPKPD
	Kepala Dinas Pendidikan
	Kepala Dinas Kesehatan
	Kepala Dinas Sosial
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Jabatan dalam TKPK	Jabatan dalam Dinas/Unsur
	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
	Kepala Dinas Perdagangan
	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Kepala Pelaksana Harian (Kalaksha) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Salatiga
	Camat Tingkir
	Camat Argomulyo
	Camat Sidomukti
	Camat Sidorejo
	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
	Kepala Bagian Hukum Setda
	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda
	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda
	Kabid. Perencanaan Kesejahteraan Rakyat pada Bappeda
	Kabid. Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial
	Perencana pada Bappeda
	Unsur Perguruan Tinggi
	Unsur Tim Penggerak PKK Kota Salatiga
	Unsur Filantropi
	Unsur Perbankan
	Unsur Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)

Sumber: SK Walikota Salatiga tentang Tim TKPK

Terdapat 2 kelompok pengelola program TKPK yakni Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu serta Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Susunan keanggotaan Kelompok Pengelola Program TKPK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 21 Susunan Keanggotaan Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu

Jabatan dalam Pengelola Program TKPK	Jabatan dalam Dinas/Unsur
Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Ketua
Wakil Ketua	Kabid. Perencanaan Kesejahteraan Rakyat pada Wakil Ketua Bappeda
Anggota	Unsur pada Dinas Sosial
	Unsur pada Dinas Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	Unsur pada Dinas Pendidikan
	Unsur pada DP3AP2KB
	Perencana pada Bappeda
	Unsur Perguruan Tinggi
	Unsur Perbankan
	Unsur Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
	Unsur Lembaga Sosial Keagamaan
	Unsur Tim Penggerak PKK Kota Salatiga
	Pelaksana pada Bappeda

Sumber: SK Walikota Salatiga tentang Tim TKPK

Tabel 3. 22 Susunan Keanggotaan Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Jabatan dalam Pengelola Program TKPK	**Jabatan dalam Dinas/Unsur**
Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
Wakil Ketua	Kabid. Perencanaan Kesejahteraan Rakyat pada Bappeda
Anggota	Kabid. Perencanaan Pembangunan dan Ekonomi pada Bappeda
	Unsur DPUPR
	Unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Unsur Dinas Pangan dan Pertanian
	Unsur Dinas Kesehatan
	Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Unsur DP3P2KB
	Unsur Dinas Sosial
	Unsur Dinas Lingkungan Hidup
	Unsur Dinas Perdagangan
	Perencana pada Bappeda
	Unsur Perguruan Tinggi
	Unsur Perbankan
	Unsur Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
	Unsur Lembaga Sosial Keagamaan
	Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
	Unsur Tim Penggerak PKK
	Pelaksana pada Bappeda

Sumber: SK Walikota Salatiga tentang Tim TKPK

Susunan keanggotaan sekretariat TKPK Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 23 Susunan Skeretariat TKPK Kota Salatiga

Jabatan dalam Sekretariat TKPK	**Jabatan dalam Dinas/Unsur**
Kepala	Sekretaris Bappeda
Wakil Kepala	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
Anggota	Kabid. Perencanaan Kesejahteraan Rakyat pada Bappeda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Jabatan dalam Sekretariat TKPK	Jabatan dalam Dinas/Unsur
	Perencana pada Bappeda
	Unsur Dinas Sosial
	Unsur Dinas Kesehatan
	Unsur pada Dinas Pendidikan
	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Unsur Badan Pusat Statistik Kota Salatiga
	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika
	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Unsur Inspektorat Daerah
	Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Unsur Dinas Pangan dan Pertanian
	Unsur Dinas Lingkungan Hidup
	Unsur Dinas Perdagangan
	Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Unsur Perguruan Tinggi
	Pelaksana pada Bappeda

Sumber: SK Walikota Salatiga tentang Tim TKPK

Sedangkan dalam menunjang pelaksanaan tugas TKPK, Sekretariat TKPK Kota Salatiga mempunyai tugas:

a) Memberikan dukungan administrasi teknis;
b) Menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
c) Menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
d) Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kota Salatiga.

Berdasarkan susunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Salatiga, TKPK Kota Salatiga memiliki keunggulan strategis berupa pelibatan berbagai aktor atau pemangku kepentingan lintas sektor. Struktur keanggotaan TKPK tidak hanya terdiri dari unsur pemerintah daerah, akan tetapi juga melibatkan unsur perguruan tinggi, dunia usaha, hingga lembaga keuangan. Pendekatan multipihak ini tentu dapat membuka peluang terjadinya sinergi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Dengan keterlibatan berbagai pihak maka perspektif, sumberdaya, hingga inovasi dalam penanggulangan kemiskinan semakin variatif dan dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang diterapkan. Kedepannya diperlukan koordinasi lintas sektor terutama untuk penyelarasan terkait target, sasaran, dan basis data yang digunakan. Selain itu partisipasi yang lebih aktif dari unsur non-pemerintah perlu ditingkatkan dan memastikan bahwa RPKD menjadi dokumen yang benar-benar digunakan sebagai acuan penanggulangan kemiskinan. Dengan memanfaatkan keunggulan pelibatan multipihak secara maksimal, TKPK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kota Salatiga sangat berpotensi menjadi motor utama dalam penanggulangan kemiskinan yang lebih kolaboratif dan efektif di Kota Salatiga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM DAN ANGGARAN

4.1. Analisis APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah, sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan DPRD. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, APBD diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan di berbagai sektor.

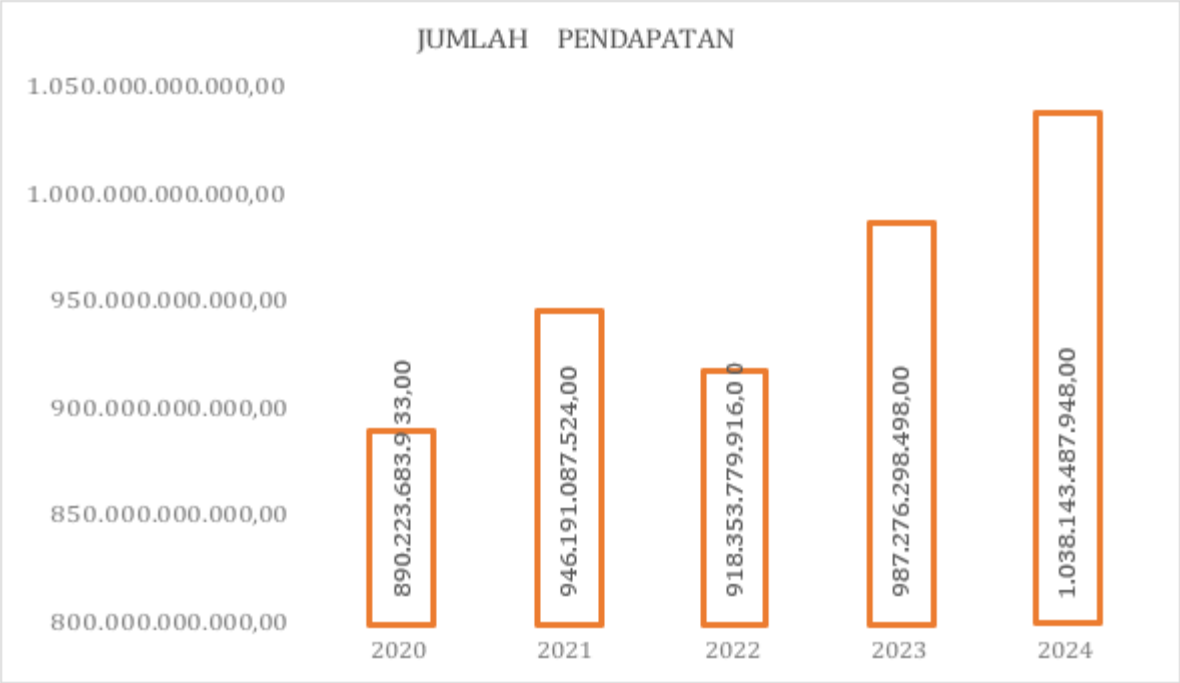
4.1.1 Kondisi Umum Fiskal Kota Salatiga

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain–lain pendapatan asli daerah yang sah.
b) Pendapatan Transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah.
c) Lain–lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi hibah, dana dana darurat dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan kelompok pendapatan yang sepenuhnya menjadi kewenangan daerah untuk mengelolanya sejak merencanakan hingga pengawasan, sedangkan untuk Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan untuk Kota Salatiga dengan penetapan pejabat yang berwenang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 4. 1 Perkembangan Pendapatan Kota Salatiga Tahun 2020-2024

Sumber: BPKPD Kota Salatiga, 2025

Pendapatan Daerah Kota Salatiga dalam kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan fluktuasi positif, dengan satu penurunan antara tahun 2021 dan 2022. Meskipun ada penurunan pada tahun 2022, secara umum terdapat tren yang positif dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 4,25 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Salatiga menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan pertumbuhan positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2020, PAD tercatat sebesar Rp219.539.400.332,00, yang meningkat signifikan sebesar 27,86 persen pada 2021 menjadi Rp280.684.937.797,00. Namun, pada 2022 terjadi penurunan sekitar 14,15 persen, dengan PAD menjadi Rp240.959.878.632,00, yang mungkin dipengaruhi oleh kondisi ekonomi atau faktor eksternal lainnya. Meski demikian, pada 2023 dan 2024 PAD kembali mengalami kenaikan yang stabil, masing-masing sebesar 18,08 persen dan 10,34 persen, mencapai Rp284.536.299.558,00 dan Rp313.963.680.987,00. Secara keseluruhan meskipun ada penurunan pada 2022, PAD Kota Salatiga menunjukkan konsistensi dalam pemulihan dan pertumbuhan, mencerminkan keberhasilan pengelolaan sumber daya daerah yang semakin baik dari tahun ke tahun.

Pendapatan Transfer Kota Salatiga menunjukkan tren yang cenderung positif dengan fluktuasi ringan sepanjang lima tahun terakhir. Pada 2020, pendapatan transfer tercatat sebesar Rp651.166.165.693,00, yang kemudian sedikit menurun pada 2021 menjadi Rp646.902.627.178,00, dengan penurunan sekitar 0,65 persen. Namun, pada 2022, Pendapatan Transfer mengalami kenaikan signifikan sebesar 4,7 persen menjadi Rp677.373.901.284,00, yang diikuti dengan tren pertumbuhan yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2023, Pendapatan Transfer

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

mencapai Rp702.479.913.243,00 (kenaikan 3,7 persen), dan di 2024 meningkat lagi menjadi Rp724.166.549.022,00 (kenaikan 3,1 persen). Secara keseluruhan, meskipun ada sedikit penurunan pada 2021, Pendapatan Transfer Kota Salatiga menunjukkan pertumbuhan stabil yang menunjukkan adanya kestabilan dalam aliran dana dari pusat atau sumber transfer lainnya, yang berkontribusi pada pendanaan pembangunan daerah.

Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah Kota Salatiga menunjukkan tren yang sangat fluktuatif dan tidak stabil sepanjang periode 2020 hingga 2024. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tahun 2020, di mana pendapatan tercatat mencapai sebesar Rp19.518.117.908,00, namun mengalami penurunan pada 2021 menjadi Rp18.603.522.549,00, dan secara signifikan, pada 2022 menurun menjadi hanya Rp20.000.000,00. Sementara itu, pada tahun 2023, terjadi lonjakan yang sangat tinggi mencapai Rp260.085.697,00, yang dapat mencerminkan adanya satu kali penerimaan luar biasa. Namun, pada tahun 2024, kembali terjadi penurunan drastis menjadi hanya Rp13.257.939,00. Pendapatan daerah Kota Salatiga terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan perkembangan selama kurun waktu tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



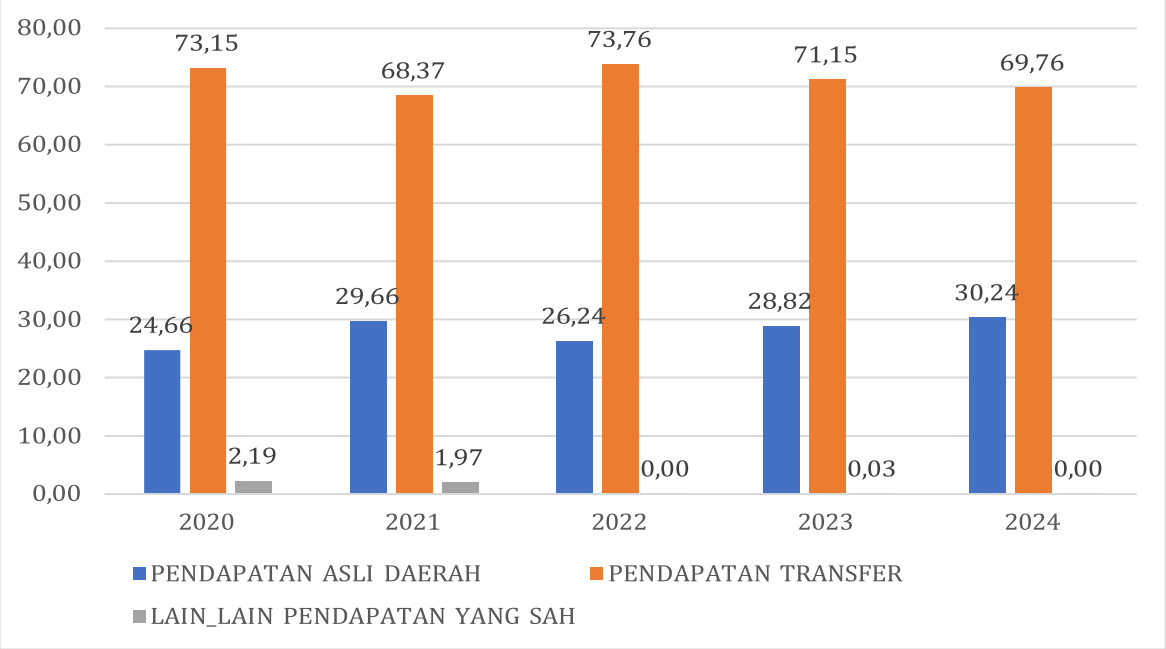
Gambar 4. 2 Perkembangan Unsur-Unsur Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

Sumber: BPKPD Kota Salatiga, 2025

Proporsi unsur Pendapatan Daerah Kota Salatiga terhadap total Pendapatan Daerah menunjukkan kecenderungan yang stabil namun dengan variasi antara tahun-tahun yang berbeda. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun kontribusinya relatif kecil, mengalami peningkatan secara bertahap dari 24,66 persen pada 2020 menjadi 30,24 persen pada 2024, mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada sumber lain. Sebaliknya, Pendapatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Transfer cenderung menurun sedikit dari 73,15 persen pada 2020 menjadi 69,76 persen pada 2024, meskipun tetap menjadi komponen dominan dalam total Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan, transfer dari pemerintah pusat atau sumber lainnya masih memainkan peran penting dalam pembiayaan daerah. Sementara itu, Lain-lain Pendapatan yang Sah menunjukkan kontribusi yang sangat kecil dan sangat fluktuatif, turun drastis dari 2,19 persen pada 2020 menjadi hanya 0,0013 persen pada 2024, yang menunjukkan bahwa sumber pendapatan ini tidak stabil dan sangat bergantung pada faktor-faktor tertentu yang bersifat insidental atau luar biasa. Secara keseluruhan, meskipun ada peningkatan dalam proporsi PAD, Kota Salatiga masih sangat bergantung pada Pendapatan Transfer untuk membiayai kebutuhan daerahnya. Perkembangan proporsi unsur-unsur Pendapatan Daerah terhadap total Pendapatan Daerah dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. 3 Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: BPKPD Kota Salatiga, 2025

Pendapatan Asli Daerah mencakup pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Transfer mencakup pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya. Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur Pendapatan Daerah selama tahun 2020-2024 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 1 Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2020- 2024 (Rupiah)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
I	**PENDAPATAN**	**890.223.683.933,00**	**946.191.087.524,00**	**918.353.779.916,00**	**987.276.298.498,00**	**1.038.143.487.948,00**
I.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**					
I.1.	Pendapatan Pajak Daerah	54.374.473.089,00	65.041.971.971,00	75.518.553.026,00	82.607.886.150,00	96.219.165.860,00
I.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	9.296.946.836,00	14.978.515.080,00	11.326.093.045,00	16.855.722.636,00	181.487.098.335,00
I.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.096.550.195,00	18.824.426.644,00	20.463.337.373,00	21.280.725.694,00	23.424.606.758,00
I.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	138.771.430.212,00	181.840.024.102,00	133.651.895.188,00	163.791.965.078,00	12.832.810.034,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**219.539.400.332,00**	**280.684.937.797,00**	**240.959.878.632,00**	**284.536.299.558,00**	**313.963.680.987,00**
I.2	**PENDAPATAN TRANSFER**					
1.2.1	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT (DANA PERIMBANGAN)**					
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	24.349.789.024,00	32.684.736.838,00	29.119.955.376,00	29.967.992.050,00	27.806.723.000,00
2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.185.175.973,00	2.277.317.037,00	3.059.574.254,00	1.865.352.243,00	1.353.371.000,00
3.	Dana Alokasi umum	425.080.208.000,00	418.013.566.000,00	417.175.271.746,00	440.735.874.040,00	463.728.380.299,00
4.	Dana Alokasi Khusus	70.427.412.444,00	81.270.963.188,00	99.125.896.908,00	104.675.010.769,00	119.308.170.745,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	**522.042.585.441,00**	**534.246.583.063,00**	**548.480.698.284,00**	**577.244.229.102,00**	**612.196.645.044,00**
I.2.2	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT (LAINNYA)**					
1.	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dana Penyesuaian	68.096.041.000,00	47.151.521.000,00	52.018.907.000,00	49.138.845.000,00	33.500.801.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**68.096.041.000,00**	**47.151.521.000,00**	**52.018.907.000,00**	**49.138.845.000,00**	**33.500.801.000,00**
I.2.3	**TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI**					
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	53.450.784.252,00	64.918.523.115,00	64.841.765.000,00	69.602.560.141,00	68.809.586.628,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil	7.576.755.000,00	586.000.000,00	12.032.531.000,00	6.494.279.000,00	9.659.516.350,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

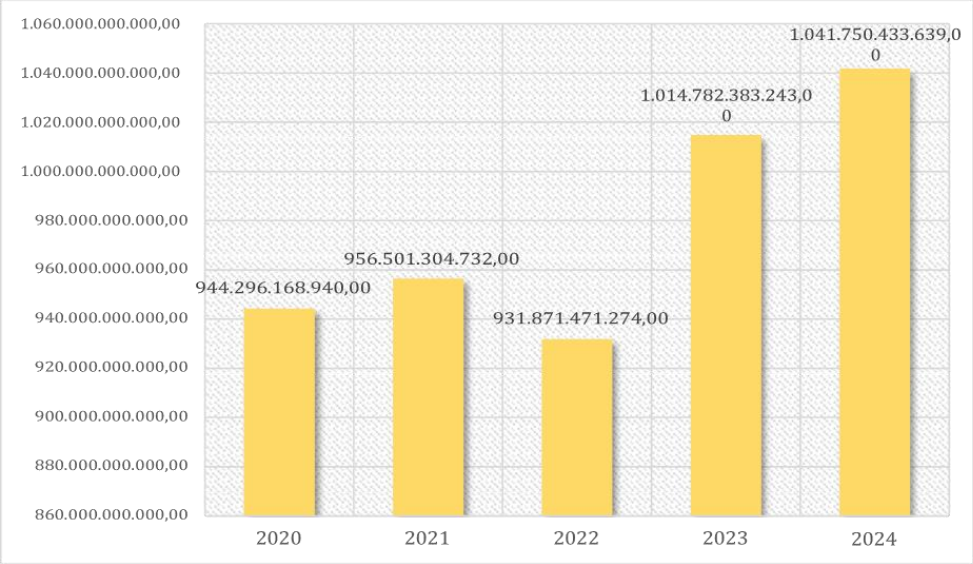
NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
	Lainnya					
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	**61.027.539.252,00**	**65.504.523.115,00**	**76.874.296.000,00**	**76.096.839.141,00**	**78.469.102.978,00**
I.3	**LAIN_LAIN PENDAPATAN YANG SAH**					
1.	Pendapatan Hibah	19.518.117.908,00	438.500.000,00	20.000.000,00	260.000.000,00	10.000.000,00
2.	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
3.	Pendapatan Lainnya	-	18.165.022.549,00	-	85.697,00	3.257.939,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	**19.518.117.908,00**	**18.603.522.549,00**	**20.000.000,00**	**260.085.697,00**	**13.257.939,00**

Sumber: BPKPD Kota Salatiga, 2025

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Struktur Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Tren Belanja Daerah Kota Salatiga dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil dengan kecenderungan peningkatan. Pada tahun 2020, Belanja Daerah tercatat sebesar Rp944.296.168.940,00, yang kemudian sedikit meningkat menjadi Rp956.501.304.732,00 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, Belanja Daerah mengalami penurunan menjadi Rp931.871.471.274,00. Meski demikian, pada tahun 2023 dan 2024, Belanja Daerah kembali meningkat signifikan, mencapai Rp1.014.782.383.243,00 pada 2023 dan naik menjadi Rp1.041.750.433.639,00 pada 2024. Peningkatan Belanja Daerah pada dua tahun terakhir mencerminkan adanya kebutuhan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan layanan publik di Kota Salatiga. Perkembangan Belanja Daerah Kota Salatiga tahun 2020-2024 terlihat pada gambar berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 4. 4 Perkembangan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2020- 2024 (Rupiah)

Sumber: BPKPD Kota Salatiga, 2025

Tren Belanja Operasi Kota Salatiga dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pola peningkatan yang konsisten, mencerminkan upaya daerah dalam meningkatkan kualitas layanan dan kegiatan operasional pemerintahan. Pada tahun 2020, Belanja Operasi tercatat sebesar Rp740.768.469.745,00, dan mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp826.013.079.878,00. Pada tahun 2022, Belanja Operasi kembali meningkat menjadi Rp853.696.161.143,00, diikuti dengan lonjakan yang lebih besar pada tahun 2023 yang mencapai Rp922.221.511.112,00. Pada tahun 2024, Belanja Operasi sedikit lebih tinggi mencapai Rp935.877.484.420,00. Kenaikan yang berkelanjutan ini menunjukkan adanya prioritas untuk meningkatkan kapasitas operasional pemerintah daerah guna mendukung berbagai program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk dalam penanggulangan kemiskinan.

Perkembangan Belanja Modal Kota Salatiga selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan penurunan yang tajam pada beberapa tahun dan pemulihan yang mulai terlihat pada tahun 2023. Pada tahun 2020, Belanja Modal tercatat sebesar Rp174.131.330.590,00, namun menurun drastis pada tahun 2021 dan pada tahun 2022, dengan Belanja Modal hanya mencapai Rp75.192.210.131,00. Namun sejak tahun 2023, Belanja Modal mulai mengalami pemulihan dengan angka Rp91.952.972.131,00, dan meningkat kembali menjadi Rp105.442.495.969,00 pada tahun 2024. Penurunan Belanja Modal pada beberapa tahun tersebut kemungkinan disebabkan oleh faktor ekonomi dan prioritas anggaran, sementara peningkatan di dua tahun terakhir mencerminkan upaya untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur serta mendukung pembangunan jangka panjang di Kota Salatiga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kondisi Belanja Tidak Terduga Kota Salatiga selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, dengan penurunan tajam setelah tahun 2020. Pada tahun 2021, Belanja Tidak Terduga meningkat signifikan, dan terus meningkat pada tahun 2022 hingga mencapai Rp2.983.100.000,00. Pada tahun 2023 dan 2024 Belanja Tidak Terduga menunjukkan angka yang lebih rendah lagi, masing-masing Rp607.900.000,00 dan Rp430.453.250,00, yang mencerminkan berkurangnya kebutuhan akan Belanja Tidak Terduga. Penurunan ini mengindikasikan bahwa Kota Salatiga telah berhasil mengelola ketidakpastian dengan lebih baik, sehingga kebutuhan untuk Belanja Tidak Terduga semakin menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur belanja daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 2 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (Rupiah)

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
II	**BELANJA**	**944.296.168.940,00**	**956.501.304.732,00**	**931.871.471.274,00**	**1.014.782.383.243,00**	**1.041.750.433.639,00**
II.1	**BELANJA OPERASI**					
1.	Belanja Pegawai	447.702.525.920,00	411.931.318.505,00	398.347.572.483,97	400.688.586.142,00	426.945.256.800,00
2.	Belanja Barang	271.830.957.825,00	399.357.950.409,00	431.031.608.280,03	486.763.958.738,00	472.770.420.733,00
3.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
4.	Belanja Subsidi	-	-	204.717.500,00	60.890.000,00	90.070.000,00
5.	Belanja Hibah	18.602.331.000,00	12.955.460.964,00	23.175.462.879,00	33.881.276.232,00	35.434.836.887,00
6.	Belanja Bantuan Sosial	2.632.655.000,00	1.768.350.000,00	936.800.000,00	826.800.000,00	636.900.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	**740.768.469.745,00**	**826.013.079.878,00**	**853.696.161.143,00**	**922.221.511.112,00**	**935.877.484.420,00**
II.2	**BELANJA MODAL**					
1.	Belanja Tanah	3.610.880.337,00	409.818.620,00	-	1.082.183.240,00	2.359.523.920,00
2.	Belanja Perlatan dan Mesin	61.715.928.045,00	43.567.605.306,00	19.089.458.206,00	34.307.626.051,00	38.714.376.504,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	47.553.365.500,00	60.425.196.643,00	23.051.423.031,00	17.402.770.950,00	28.209.975.585,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.103.396.512,00	24.731.543.900,00	31.216.974.647,00	36.831.079.856,00	34.066.477.100,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.585.157.696,00	182.158.040,00	1.722.875.662,00	2.196.462.134,00	2.034.937.660,00
6.	Belanja Aset Lainnya	562.602.500,00	960.756.400,00	111.478.585,00	132.849.900,00	57.205.200,00
	Jumlah Belanja Modal	**174.131.330.590,00**	**130.277.078.909,00**	**75.192.210.131,00**	**91.952.972.131,00**	**105.442.495.969,00**
II.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**					
1	Belanja Tidak Terduga	29.396.368.605,00	211.145.945,00	2.983.100.000,00	607.900.000,00	430.453.250,00
	Jumlah belanja Tidak Terduga	**29.396.368.605,00**	**211.145.945,00**	**2.983.100.000,00**	**607.900.000,00**	**430.453.250,00**
II.2	**TRANSFER**					
	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN LAINNYA					
1	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	658.043.964,00	-	200.000.000,00		-
	Jumlah Transfer/ Bantuan	**658.043.964,00**	**-**	**200.000.000,00**	**-**	**-**

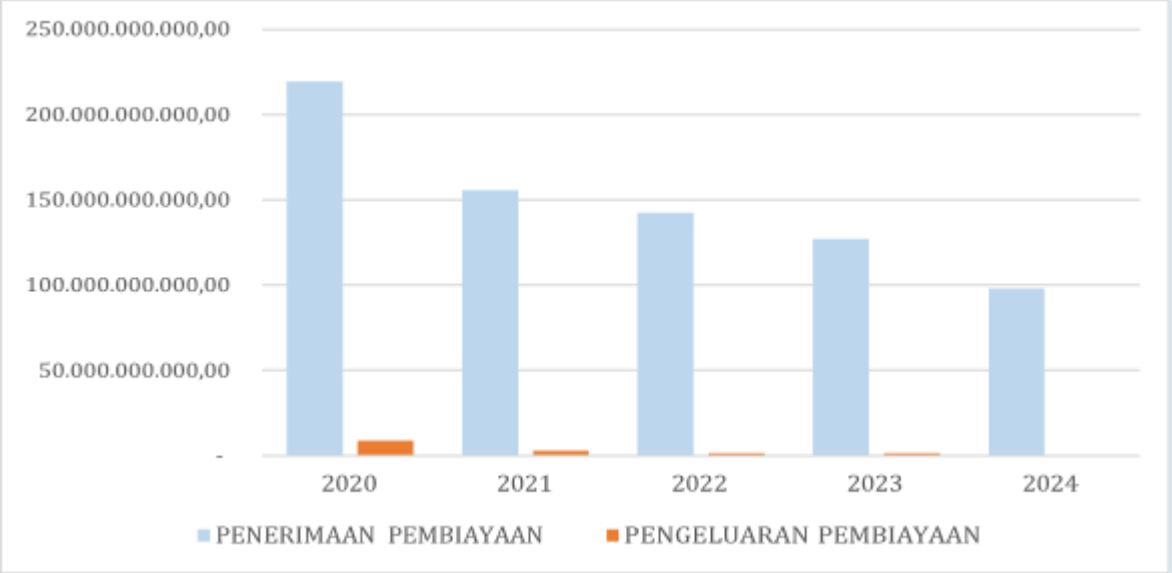
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	Keuangan Lainnya					
	SURPUS/ DEFISIT	**(54.730.528.971,00)**	**(10.310.217.208,00)**	**(13.717.691.358,00)**	**(27.506.084.745,00)**	**(3.606.945.691,00)**

Sumber: BPKPD Kota Salatiga, 2025

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Salatiga berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Salatiga menunjukkan penurunan dari sebesar Rp219.485.986.483,00 ditahun 2020 menjadi Rp98.153.002.474,00 ditahun 2024. Sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnnya.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Salatiga menunjukkan penurunan dari sebesar Rp9.000.000.000,00 menjadi Rp1.500.000.000,00 yang digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah. Perkembangan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah terlihat pada gambar berikut.



Gambar 4. 5 Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Sumber: BPKPD Kota Salatiga, 2025

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SILPA tahun berjalan di Kota Salatiga menunjukkan kecenderungan penurunan dari sebesar Rp155.755.457.512,00 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp94.546.056.783,00 pada tahun 2024. Kondisi ini

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan semakin baik, yang dipengaruhi oleh penyerapan anggaran belanja daerah semakin baik. Perkembangan Pembiayaan Daerah secara rinci tercantum pada tabel berikut.

Tabel 4. 3 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kota Salatiga Tahun 2020- 2024

(Rupiah)

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
III	**PEMBIAYAAN**					
III.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**					
1.	Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)	219.471.861.483,00	155.741.332.512,00	142.431.115.304,00	127.159.087.219,00	98.153.002.474,00
2.	Pencairan Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	14.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan	**219.485.986.483,00**	**155.741.332.512,00**	**142.431.115.304,00**	**127.159.087.219,00**	**98.153.002.474,00**
III.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**					
1.	Pembentukan Desa Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
3.	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran	**9.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**0,00**
III.3	**PEMBIAYAAN NETTO**	**210.485.986.483,00**	**152.741.332.512,00**	**140.931.115.304,00**	**125.659.087.219,00**	**98.153.002.474,00**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/ SILPA	**155.755.457.512,00**	**142.431.115.304,00**	**127.213.423.946,00**	**98.153.002.474,00**	**94.546.056.783,00**

Sumber: BPKPD Kota Salatiga, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4.1.2 Proyeksi Kondisi Fiskal Kota Salatiga

Dalam menentukan proyeksi keuangan daerah, selain berdasarkan hasil analisis atas gambaran keuangan pada periode sebelumnya perlu mempertimbangkan beberapa asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta potensi-potensi yang dimiliki oleh Kota Salatiga. Proyeksi APBD Kota Salatiga dilakukan dengan menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian nasional dan daerah berada pada pertumbuhan yang tinggi dengan laju inflasi pada angka yang stabil.
2. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan seiring dengan perbaikan pengelolaan pajak, peningkatan kinerja pengelolaan BUMD, dan peningkatan kinerja pengelolaan BLUD.
3. Pendapatan transfer pemerintah pusat tidak mengalami perubahan, sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah provinsi terutama berasal dari bagi hasil pajak mengalami peningkatan.

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2029 tercantum ada Tabel berikut ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 4. 4 Proyeksi Keuangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2026

NO	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**PENDAPATAN**	**1.011.082.764.640,00**	**1.042.341.063.915,54**	**1.073.599.363.191,08**	**1.104.857.662.466,61**	**1.136.115.961.742,15**	**1.166.700.055.567,69**
I.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**321.906.883.640,00**	**335.935.785.890,54**	**349.964.688.141,08**	**363.993.590.391,61**	**378.022.492.642,15**	**392.051.394.892,69**
1.	Pendapatan Pajak Daerah	109.263.327.376,00	116.649.528.306,62	124.035.729.237,24	131.421.930.167,85	138.808.131.098,47	146.194.332.029,09
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	176.728.889.664,00	182.030.756.353,92	187.332.623.043,84	192.634.489.733,76	197.936.356.423,68	203.238.223.113,60
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.744.935.000,00	23.427.283.050,00	24.109.631.100,00	24.791.979.150,00	25.474.327.200,00	26.156.675.250,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.169.731.600,00	13.828.218.180,00	14.486.704.760,00	15.145.191.340,00	15.803.677.920,00	16.462.164.500,00
I.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**689.175.881.000,00**	**706.405.278.025,00**	**723.634.675.050,00**	**740.864.072.075,00**	**758.093.469.100,00**	**774.648.660.675,00**
1.2.1	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**643.555.616.000,00**	**659.644.506.400,00**	**675.733.396.800,00**	**691.822.287.200,00**	**707.911.177.600,00**	**723.325.862.550,00**
1.2.1.1	**DANA PERIMBANGAN**	**45.620.265.000,00**	**659.644.506.400,00**	**675.733.396.800,00**	**691.822.287.200,00**	**707.911.177.600,00**	**723.325.862.550,00**
1.	Dana Bagi Hasil	35.089.157.000,00	35.966.385.925,00	36.843.614.850,00	37.720.843.775,00	38.598.072.700,00	39.475.301.625,00
2	Dana Alokasi umum	482.599.097.000,00	494.664.074.425,00	506.729.051.850,00	518.794.029.275,00	530.859.006.700,00	542.923.984.125,00
3	Dana Alokasi Khusus Fisik	29.640.219.000,00	30.381.224.475,00	31.122.229.950,00	31.863.235.425,00	32.604.240.900,00	33.345.246.375,00
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	87.237.737.000,00	89.418.680.425,00	91.599.623.850,00	93.780.567.275,00	95.961.510.700,00	98.142.454.125,00
5	Insentif Fiskal	8.989.406.000,00	9.214.141.150,00	9.438.876.300,00	9.663.611.450,00	9.888.346.600,00	9.438.876.300,00
I.3	**TRANSFER ANTAR DAERAH**	**45.620.265.000,00**	**46.760.771.625,00**	**47.901.278.250,00**	**49.041.784.875,00**	**50.182.291.500,00**	**51.322.798.125,00**
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	45.620.265.000,00	46.760.771.625,00	47.901.278.250,00	49.041.784.875,00	50.182.291.500,00	51.322.798.125,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-	-	-	-
I.4	**LAIN_LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
2.	Pendapatan Dana Darurat						
3.	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	
II.	**BELANJA**	**1.047.089.121.157,00**	**1.078.347.420.432,54**	**1.109.605.719.708,08**	**1.140.864.018.983,61**	**1.172.122.318.259,15**	**1.202.706.412.084,69**
II.1	**BELANJA OPERASI**	931.505.931.461,00	**958.242.336.473,59**	**985.653.509.702,17**	**1.013.064.682.930,76**	**1.040.475.856.159,34**	**1.067.887.029.387,93**
1.	Belanja Pegawai	427.366.748.499,00	438.050.917.211,48	448.735.085.923,95	459.419.254.636,43	470.103.423.348,90	480.787.592.061,38
2.	Belanja Barang dan Jasa	477.914.414.746,00	494.641.419.262,11	511.368.423.778,22	528.095.428.294,33	544.822.432.810,44	561.549.437.326,55
3.	Belanja Bunga						
4.	Belanja Subsidi	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
5.	Belanja Hibah	24.656.918.216,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00
6.	Belanja Bantuan Sosial	1.417.850.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
II.2	**BELANJA MODAL**	112.583.189.696,00	**117.105.083.958,95**	**120.952.210.005,91**	**124.799.336.052,86**	**128.646.462.099,81**	**131.819.382.696,76**
1.	Belanja Tanah	1.604.899.115,00	1.669.359.751,80	1.724.201.413,37	1.779.043.074,94	1.833.884.736,52	1.879.115.445,22
2.	Belanja Perlatan dan Mesin	37.736.888.834,00	39.252.587.772,54	40.542.110.376,73	41.831.632.980,91	43.121.155.585,10	44.184.690.489,11
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	33.183.067.192,00	34.515.862.270,62	35.649.774.380,03	36.783.686.489,44	37.917.598.598,85	38.852.793.610,18
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.029.190.855,00	39.556.630.079,42	40.856.141.055,06	42.155.652.030,70	43.455.163.006,35	44.526.935.828,52
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.902.373.400,00	1.978.782.066,22	2.043.788.842,79	2.108.795.619,36	2.173.802.395,93	2.227.416.792,19
6.	Belanja Aset Lainnya	126.770.300,00	131.862.018,34	136.193.937,92	140.525.857,49	144.857.777,07	148.430.531,55

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
II.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	3.000.000.000,00	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**
1	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	SURPUS/ DEFISIT	**-36.006.356.517,00**	**-36.006.356.517,00**	**-36.006.356.517,00**	**-36.006.356.517,00**	**-36.006.356.517,00**	**-36.006.356.517,00**
III	**PEMBIAYAAN**						
III.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**36.006.356.517,00**	**36.006.356.517,00**	**36.006.356.517,00**	**36.006.356.517,00**	**36.006.356.517,00**	**36.006.356.517,00**
1.	Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)	36.006.356.517,00	36.006.356.517,00	36.006.356.517,00	36.006.356.517,00	36.006.356.517,00	36.006.356.517,00
2.	Pencairan Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
III.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.	Pembentukan Desa Cadangan	-	-	-	-	-	-
2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-
3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
III.3	**PEMBIAYAAN NETTO**	**36.006.356.517,00**	**36.006.356.517,00**	**36.006.356.517,00**	**36.006.356.517,00**	**36.006.356.517,00**	**36.006.356.517,00**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/ SILPA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber: RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4.1.3 Kemandirian Fiskal Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Salah satu konsekuensi dari otonomi daerah yaitu pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat dan dalam melaksanakan pembangunan daerah, sehingga otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan fiskal daerah. Faktor dalam meningkatkan kemampuan fiskal daerah yaitu perluasan desentralisasi fiskal. Dengan adanya desentralisasi fiskal, kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkuat dan diperluas. Hal ini diatur dan disahkan pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang diharapkan terdapat peningkatan dalam kemandirian fiskal daerah.

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, tanpa tergantung pada bantuan dari luar termasuk dari pemerintah pusat. Adapun kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan. Oleh karena itu kemandirian fiskal dipandang perlu agar kemandirian fiskal daerah dapat dipetakan. Dengan dilimpahkannya sebagian besar kewenangan keuangan kepada pemerintah Daerah, termasuk kewenangan keuangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka setiap daerah didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai kebijakan dan strategi yang dikembangkan secara transparan dan akuntabel. Pemberian kewenangan dalam bidang perpajakan dan retribusi daerah dihadapkan dapat mendorong kemandirian fiskal daerah yang diperlukan untuk membiayai pelayanan dan pembangunan daerah dan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana Pemerintah Kota Salatiga mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah yang relatif kecil menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi PAD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 4. 5 Perkembangan PAD Kota Salatiga Tahun 2020-2024

No.	APBD	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pajak Daerah	54.374.473.089	65.041.971.971	75.518.553.026	82.607.886.150	96.219.165.860
2.	Retribusi Daerah	9.296.946.836	14.978.515.080	11.326.093.045	16.855.722.636	181.487.098.335
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	17.096.550.195	18.824.426.644	20.463.337.373	21.280.725.694	23.424.606.758
4.	Lain-lain PAD yang sah	138.771.430.212	181.840.024.102	133.651.895.188	163.791.965.078	12.832.810.034
Jumlah		**219.539.400.332**	**280.684.937.797**	**240.959.878.632**	**284.536.299.558**	**313.963.680.987**

Sumber: BPKPD Kota Salatiga, 2025

Berdasarkan data tersebut terjadi peningkatan kemandirian fiskal yaitu kemampuan Pemerintah Kota Salatiga untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar. Pemerintah daerah dalam hal ini setidaknya memiliki posisi tawar untuk dapat meningkatkan porsi penerimaan yang daerah kumpulkan dan diiringi dengan terjadinya peningkatan belanja lebih cepat dibandingkan di tingkat pusat. Hal ini diartikan Kota Salatiga memiliki peran PAD yang cukup baik daripada dana transfer Pemerintah Pusat dan dapat benar benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Angka indeks kapasitas Kota Salatiga menunjukkan kategori sedang. Artinya Kota Salatiga mengalami peningkatan untuk mendanai belanja prioritas terutama belanja para pihak untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Adapun APBD disalurkan untuk Pemerintah Daerah Urusan perlindungan sosial, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar dan pangan.

4.1.4 Alokasi Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tidak akan dapat dilaksanakan tanpa dukungan perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada warga miskin. Perencanaan anggaran yang berpihak pada warga miskin perlu koordinasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Alokasi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan (*pro poor budgeting*) tersebut berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kota Salatiga dan DBHCHT.

Tabel 4. 6 Realisasi Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2020-2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Angaran Program Penanggulangan Kemiskinan	106.991.336.500,00	144.941.788.000,00	107.971.708.500,00	202.133.330.250,00	111.014.502.600,00
Realisasi Belanja Daerah	944.296.168.940,00	956.501.304.732,00	931.871.471.274,00	1.014.782.383.243,00	1.041.750.433.639,00
Persentase	11 %	15 %	12 %	20 %	11 %

Sumber: BPKPD Kota Salatiga, 2025

Terkait dengan realisasi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan Kota Salatiga dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 alokasi dana program penanggulangan kemiskinan mencapai Rp106.991.336.500, dan pada tahun 2021 terdapat kenaikan menjadi Rp144.941.788.000, kenaikan ini berkaitan dengan upaya penanganan Covid-19 beserta dampak sosial dan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Pada tahun 2022 anggaraan untuk penanggulangan dan pengentasan kemiskinan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp107.971.708.500, dan pada tahun 2023 terdapat kenaikan anggaran yang cukup signifikan menjadi Rp202.133.330.250.

Tahun 2024 terjadi penurunan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 111.014.502.600, penurunan tersebut disebabkan karena adanya autotagging melalui SIPD yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga program dan anggaran yang tidak masuk dalam *tagging* SIPD dianggap bukan merupakan program yang mendukung pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Sehingga dari data di atas juga dapat diketahui bahwa kinerja pelaksanaan APBD Kota Salatiga untuk Penanggulangan Kemiskinan Salatiga Tahun 2020-2024 menunjukkan kinerja yang fluktuatif dengan alokasi terbesar pada tahun 2020 yakni mencapai 20 persen dari total belanja daerah.

Selain itu pada tahun 2024, Kota Salatiga mendapatkan anggaran dari APBN dalam bentuk Dana Insentif Fiskal (DIF) khusus untuk penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp5.908.190.000. Insentif ini sebagai bentuk dukungan dan apresiasi pemerintah terhadap kabupaten/kota yang telah berkomitmen dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Proses penangggaran bagi program penanggulangan kemiskinan harus dan sudah memperhatikan prinsip-prinsip dalam *pro poor budgeting*, yaitu:

(1) Sasaran adalah warga/kelompok miskin

Dalam *pro poor budgeting* terutama ditujukan kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem maupun warga yang secara tidak langsung mempunyai potensi menjadi warga miskin. Hal ini sejalan dengan prinsip *pro poor budgeting*, dimana orang miskin ditargetkan untuk mendapat perhatian khusus, sehingga proporsi orang miskin yang menerima manfaat lebih besar dari proporsi orang miskin dalam populasi.

(2) Fokus pada akar masalah kemiskinan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Selain itu, dapat diketahui pula bahwa sejatinya pengelompokan kluster atau kelompok program (Pokgram) dalam Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu upaya untuk menemukenali akar masalah dari kemiskinan, serta memberikan kemampuan pada orang miskin agar dapat mengakses dan menggunakan sumber daya yang dapat membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan.

(3) Memaksimal manfaat bagi orang miskin.

Penguatan program penanggulangan kemiskinan melalui *pro poor budgeting* yang merujuk pada akar permasalahan penyebab kemiskinan tersebut diharapkan juga akan memaksimalkan manfaaat bagi warga miskin. Kemanfaatan tersebut didasarkan pada data yang dimilik oleh Pemerintah Kota Salatiga, setelah dilakukan validasi dan verifikasi.

(4) Melibatkan partisipasi/peran serta warga miskin.

Proses keterlibatan warga miskin diawali dalam proses Musrenbang, meskipun keterlibatan dalam proses tersebut tidak dilakukan secara langsung.

Dengan menggunakan data proyeksi kondisi fiskal Kota Salatiga dan rencana kerangka pendanaan program pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029, maka dapat dirumuskan estimasi proporsi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Berikut merupakan tabel estimasi proporasi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan.

Tabel 4. 7 Estimasi Proporsi Anggaran untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2026-2030

Komponen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pagu Program Penanggulangan Kemiskinan	96.873.325.049	122.967.224.741,00	186.477.521.606,00	121.570.286.053,00	149.291.361.707,00	115.310.387.816,00
Proyeksi Belanja Daerah	1.047.089.121.157,00	1.078.347.420.432,54	1.109.605.719.708,08	1.140.864.018.983,61	1.172.122.318.259,15	1.202.706.412.084,69
Persentase	9,16 %	11 %	17 %	11 %	13 %	10 %

Sumber: RPJMD Kota Salatiga 2025-2029

Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa proporsi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga kurang dari 20 persen dari total alokasi belanja daerah. Bahkan pada tahun 2030 proporsi anggaran penanggulangan kemiskinan hanya 10 persen dari total belanja daerah. Hal ini selaras dengan asumsi bahwa pada tahun 2030 jumlah penduduk miskin Kota Salatiga menurun atau dengan kata lain lebih sedikit dibandingkan saat ini.

4.2. Isu Strategis

Secara angka, kemiskinan di Kota Salatiga pada tahun 2024 sebesar 4,57 persen dan tergolong rendah jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 9,71 persen serta angka kemiskinan Nasional yang mencapai 7,09 persen. Akan tetapi semakin kecil angka kemiskinan maka semakin besar tantangan penurunannya terutama terkait dengan peningkatan kualitas hidup kelompok miskin dan berpendapatan rendah. Kemiskinan di Kota Salatiga merupakan permasalahan kompleks dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

multidimensi. Kemiskinan tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan secara ekonomi, akan tetapi juga dalam berbagai aspek. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga, isu-isu strategis dirumuskan dengan mempertimbangkan analisis data sektoral, masukan dalam forum FGD, serta hasil analisis pendekatan *Theory of Change* (ToC). Penyusunan isu strategis ini bertujuan untuk menjadi dasar dalam penyusunan strategi dan prioritas penanggulangan kemiskinan daerah secara lebih terukur dan fokus dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Berikut beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga:

1) Kualitas Sumber Daya Manusia

Kemiskinan erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Masih terdapat kelompok masyarakat miskin yang memiliki tingkat pendidikan rendah serta derajat kesehatan yang juga rendah, yang sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pola hidup sehat dan kesadaran pentingnya pendidikan juga turut memperkuat siklus kemiskinan. Dari sisi ketenagakerjaan, masih adanya kasus pengangguran juga mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Rendahnya keterampilan dan kompetensi kerja menjadi penghambat mobilitas ekonomi masyarakat miskin, sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan serta berpotensi dalam meningkatkan keparahan dan kedalaman kemiskinan.

2) Pemanfaatan Potensi Ekonomi Lokal

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor pariwisata merupakan sektor ekonomi yang berpotensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun hingga saat ini, pengembangan sektor tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan akses terhadap permodalan, rendahnya kapasitas produksi dan manajerial, serta rendahnya daya saing dan akses pasar dari produk yang dihasilkan. Di sisi lain, potensi pariwisata Kota Salatiga juga belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perekonomian lokal dan membuka lapangan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi lokal masih belum sepenuhnya dioptimalkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

3) Infrastruktur dan Kebutuhan Dasar

Kemiskinan di Kota Salatiga juga ditandai oleh keterbatasan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak. Masih ditemukannya rumah tidak layak huni, terbatasnya akses terhadap air minum yang aman, sanitasi dan drainase yang belum memadai, serta masih adanya kawasan permukiman kumuh menjadi indikator lemahnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok masyarakat miskin. Di samping itu, keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar berupa pangan bergizi dan barang kebutuhan pokok lainnya juga masih menjadi permasalahan. Permasalahan ini diperparah oleh tingginya fluktuasi harga serta minimnya diversifikasi dan produksi pangan lokal, yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan ekonomi rumah tangga miskin.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) juga menjadi salah satu isu strategis penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga. Hal ini mengingat masih tingginya jumlah kelompok PPKS, layanan sosial yang belum optimal, serta perlunya optimalisasi kelembagaan dan unsur pendukung. Di sisi lain, jumlah PPKS berpotensi bertambah dengan adanya ancaman terhadap kejadian bencana. Hal ini tentu dapat diperparah dengan kondisi kesiapsiagaan terhadap bencana di Kota Salatiga yang masih rendah.

4.3. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga memerlukan strategi yang terpadu, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika pembangunan. Sub bab ini menguraikan strategi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam menanggulangi kemiskinan, dengan mengacu pada kondisi aktual, potensi daerah, serta sinergi antara prioritas pembangunan pusat dan daerah. Strategi Penanggulangan Kemiskinan merujuk pada berbagai peraturan perundangan di aras pusat, dengan 3 (tiga) Strategi Utama Penanggulangan Kemiskinan (termasuk penghapusan kemiskinan ekstrim) sebagai berikut:

a. Strategi Pertama: Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, yaitu upaya bantuan sosial berbasis keluarga dan individu, meliputi: memenuhi hak dasar, pengurangan beban hidup, perbaikan kualitas hidup keluarga miskin dan penduduk miskin.
b. Strategi Kedua: Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, yaitu upaya pemberdayaan masyarakat, yaitu mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas keluarga miskin dan penduduk miskin.
c. Strategi Ketiga: Mengurangi kantong kemiskinan melalui sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah, yaitu program-program lainnya dan sinergitas program penanggulangan kemiskinan, meliputi baik secara langsung baik tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan pusat, provinsi dan kota.

Ketiga Strategi Utama tersebut telah dirancang untuk mencakup seluruh dimensi kemiskinan. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga, Ketiga Strategi Utama tersebut dijabarkan ke dalam beberapa strategi penanganan lokal yang lebih operasional dan implementatif berdasarkan empat isu strategis penanggulangan kemiskinan Kota Salatiga yang meliputi: (1) Sumber daya manusia, (2) Potensi ekonomi lokal, (3) Infrastruktur dan kebutuhan dasar, serta (4) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dengan menggunakan pendekatan ini, setiap strategi lokal yang disusun untuk menanggapi isu strategis tentu tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari kerangka Tiga Strategi Utama. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan Kota Salatiga berada dalam satu garis dengan kebijakan Provinsi dan Nasional, sekaligus tetap mempertahankan relevansi dan spesifikasi terhadap konteks lokal Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Salatiga. Perumusan strategi lokal ini mengacu pada pendekatan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) untuk memastikan keberhasilan implementasi secara terukur dan berkelanjutan. Berikut merupakan matriks strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Salatiga tahun 2025–2029.

Tabel 4. 8 Matriks Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2025–2029.

Isu Strategis Daerah	Strategi Utama	Strategi Lokal	Indikator
1. Kualitas Sumber Daya Manusia	Strategi 1: Mengurangi beban pengeluaran	Meningkatkan kualitas kesehatan	Usia Harapan Hidup 78,73 pada tahun 2030
		Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah 11,53 di tahun 2030
	Strategi 2: Meningkatkan kemampuan & pendapatan	Meningkatkan kompetensi dan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,41-3,11 di tahun 2030
2. Pemanfaatan Potensi Ekonomi Lokal	Strategi 2: Meningkatkan kemampuan & pendapatan	Meningkatkan potensi ekonomi lokal	PDRB per Kapita 213,43-226,11 Juta Rupiah pada Tahun 2030
3. Infrastruktur dan Kebutuhan Dasar	Strategi 3: Mengurangi kantong kemiskinan	Meningkatkan kualitas permukiman dan infrastruktur dasar	Indeks Infrastruktur Wilayah 51,19 pada tahun 2030
		Meningkatkan akses terhadap pangan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Ketahanan Pangan Daerah 94,85 pada tahun 2030
4. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Strategi 1: Mengurangi beban pengeluaran	Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial	Cakupan PPKS tertangani sebesar 95,23 persen pada tahun 2030
		Peningkatan penanganan dan kesiapsiagaan bencana	Cakupan PPKS tertangani sebesar 95,23 persen pada tahun 2030
	Strategi 3: Mengurangi kantong kemiskinan		Indeks Risiko Bencana Daerah di tahun 2030

Selain itu, ketiga strategi utama tersebut selanjutnya secara makro akan didukung oleh program yang berkaitan dengan ketiga strategi utama tersebut. Secara umum beberapa aktivitas riil tersebut antara lain sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1. Penurunan beban pengeluaran masyarakat. Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, antara lain:
   a. Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai dan Kartu Sembako.
   b. Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
   c. Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas, maupun korban bencana alam.
2. Peningkatan pendapatan masyarakat. Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan dalam berbagai aktivitas riil sebagai upaya peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:
   a. Peningkatan akses pekerjaan, melalui program padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana.
   b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan.
   c. Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan.
   d. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan.
   e. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.
   f. Pengembangan potensi pariwisata, seni, dan budaya terutama yang memiliki potensi nilai ekonomi.
3. Mengurangi kantong kemiskinan melalui sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah. Strategi ini adalah sinergi kebijakan program yang mendukung pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan dengan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:
   a. Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak.
   b. Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.
   c. Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagai wadah sinkronisasi program penegntasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem

4.4. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan

Rencana Aksi Daerah (RAD) merupakan rencana intervensi prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan. RAD penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah diprioritaskan pada 9 bidang yang merupakan penjabaran dari 3 strategi penanggulangan kemiskinan. Dalam pencapaian rencana aksi ini perlu menjadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

catatan bahwa kolaborasi menjadi poin penting. Peran multi aktor dan transdisiplin menjadi kunci. Utamanya bagi aktor non-pemerintah. Susunan rencana aksi yang ada dapat menjadi acuan dan instrumen kerja sama dengan pihak non pemerintah yang memiliki perhatian pada bidang dan strateg penanggulangan kemiskinan yang relevan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4.4.1 RAD pada Bidang Konsumsi

Difokuskan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan penting serta menjaga stabilitas distribusinya

Tabel 4. 9 RAD Bidang Konsumsi

Strategi	Bidang	OPD	Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	Sumber Pendanaan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Konsumsi	Dinas Perdagangan	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Meningkatnya stabilitas harga pangan	Terselenggaranya pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting secara terintegrasi dan *up to date*	Program Stabilisasi Harga barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	APBD
Meningkatkan Pendapatan	Konsumsi	Dinas Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Meningkatnya kualitas distribusi perdagangan	Terselenggaranya penyediaan dan perawatan sarana distribusi perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	APBD
Meningkatkan Pendapatan	Konsumsi	Dinas Perdagangan	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Meningkatnya kualitas distribusi perdagangan	Terselenggaranya pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	APBD

Sumber: Hasil Analisis FGD TKPK, Data Sekunder dari OPD, LP2KD, LKJIP, dan Renstra OPD, 2025

4.4.2 RAD pada Bidang Ketenagakerjaan

Difokuskan untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan meningkatkan kesempatan kerja dan serapan tenaga kerja

Tabel 4. 10 RAD Bidang Ketenagakerjaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Strategi	Bidang	OPD	Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	Sumber Pendanaan
Meningkatkan Pendapatan	Ketenagakerjaan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Turunnya Angka Pengangguran	Terselenggaranya fasilitasi dan promosi peluang kerja bagi pencari kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	APBD
Meningkatkan Pendapatan	Ketenagakerjaan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Turunnya Angka Pengangguran	Terselenggaranya penempatan tenaga kerja (dalam dan luar negeri)	Program Penempatan Tenaga Kerja	APBD
Meningkatkan Pendapatan	Ketenagakerjaan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Turunnya Angka Pengangguran	Terselenggaranya pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	APBD
Meningkatkan Pendapatan	Ketenagakerjaan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Turunnya Angka Pengangguran	Terselenggaranya kegiatan motivasi dan pembinaan karir untuk generasi muda	Program Penempatan Tenaga Kerja	APBD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Strategi	Bidang	OPD	Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	Sumber Pendanaan
Meningkatkan Pendapatan	Ketenagakerjaan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Terselenggaranya pelatihan kerja dengan sasaran kelompok rentan dan penganggur terbuka	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	APBD
Meningkatkan Pendapatan	Ketenagakerjaan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Terselenggaranya kegiatan pelatihan kerja dengan materi pembuatan NIB	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	APBD
Meningkatkan Pendapatan	Ketenagakerjaan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya kampanye edukasi pelatihan berbasis keterampilan (bukan insentif)	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	APBD

Sumber: Hasil Analisis FGD TKPK, Data Sekunder dari OPD, LP2KD, LKJIP, dan Renstra OPD, 2025

4.4.3 RAD pada Bidang Kesehatan

Difokuskan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dilihat dari usia harapan hidup masyarakat Kota Salatiga

Tabel 4. 11 RAD Bidang Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Strategi	Bidang	OPD	Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	Sumber Pendanaan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Kesehatan	Puskesmas Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Meningkatnya layanan kesehatan promotif dan preventif pada level kelurahan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	APBD
Mengurangi Beban Pengeluaran	Kesehatan	Puskesmas Tegalrejo pada Dinas Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Terselenggaranya revitalisasi posyandu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	APBD
Mengurangi Beban Pengeluaran	Kesehatan	Puskesmas Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Terselenggaranya edukasi PHBS	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	APBD
Mengurangi Beban Pengeluaran	Kesehatan	Puskesmas Mangunsari pada Dinas Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan	Terselenggaranya kegiatan kampanye bebas ODF	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	APBD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Strategi	Bidang	OPD	Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	Sumber Pendanaan
				dan masyarakat		Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
Mengurangi Beban Pengeluaran	Kesehatan	Puskesmas Cebongan pada Dinas Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Terselenggaranya pemberantasan sarang nyamuk	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	APBD
Mengurangi Beban Pengeluaran	Kesehatan	Puskesmas Kalicacing pada Dinas Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Terselenggaranya skrinning TB aktif dan pengobatan tuntas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	APBD
Mengurangi Beban Pengeluaran	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Terselenggaranya kegiatan deteksi dini penyakit degeneratif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	APBD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Strategi	Bidang	OPD	Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	Sumber Pendanaan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Tersedianya layanan konseling remaja	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	APBD
Mengurangi Beban Pengeluaran	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Terselenggaranya kegiatan pemberian tablet tembah darah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	APBD
Mengurangi Beban Pengeluaran	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Terselenggaranya edukasi kesehatan reproduksi dan seksual di sekolah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	APBD
Mengurangi Beban Pengeluaran	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan	Terselenggaranya penyuluhan gizi pada tingkat keluarga	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	APBD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Strategi	Bidang	OPD	Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	Sumber Pendanaan
				dan masyarakat		Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
Meningkatkan Pendapatan	Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Terselenggaranya edukasi pengasuhan anak yang tepat	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	APBD
Meningkatkan Pendapatan	Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Terselenggaranya kampanye pencegahan pernikahan dibawah umur	Program Pembinaan KB	APBD

Sumber: Hasil Analisis FGD TKPK, Data Sekunder dari OPD, LP2KD, LKJIP, dan Renstra OPD, 2025

4.4.4 RAD pada Bidang Pendidikan

Difokuskan untuk meningkatkan partisipasi di bidang pendidikan dilihat dari rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Salatiga

Tabel 4. 12 RAD Bidang Pendidikan

Strategi	Bidang	OPD	Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	Sumber Pendanaan
Penurunan Jumlah	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Meningkatnya Derajat	Meningkatnya partisipasi	Turunnya angka putus	Program Pengelolaan Pendidikan	APBD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kantong Kemiskinan			Pendidikan Masyarakat	anak usia sekolah	sekolah akibat alasan finansial		

Sumber: Hasil Analisis FGD TKPK, Data Sekunder dari OPD, LP2KD, LKJIP, dan Renstra OPD, 2025

4.4.5 RAD pada Bidang Infrastruktur Dasar

Difokuskan untuk meningkatkan distribusi infrastruktur secara merata dan berkualitas

Tabel 4. 13 RAD Bidang Infrastruktur Dasar

Strategi	Bidang	OPD	Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	Sumber Pendanaan
Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah yang merata	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Meningkatnya penyediaan drainase dengan kondisi baik yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	APBD
Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah yang merata	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Meningkatnya sistem penyediaan air minum berbasis jaringan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	APBD
Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah yang merata	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Meningkatnya Edukasi tentang sanitasi di masyarakat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	APBD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Strategi	Bidang	OPD	Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	Sumber Pendanaan
Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah yang merata	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Meningkatnya Operasional IPAL Komunal yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	APBD
Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah yang merata	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Meningkatnya Pemasangan Jamban Sehat dan Layak untuk Hunian	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	APBD
Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Infrastruktur	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah yang merata	Meningkatnya Cadangan Perumahan Publik	Meningkatnya Cadangan Perumahan Publik untuk Kebutuhan Khusus	Program Pengembangan Perumahan	APBD
Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Infrastruktur	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah yang merata	Meningkatnya Cadangan Perumahan Publik	Meningkatnya Cadangan Perumahan Publik untuk Kebutuhan Khusus	Program Kawasan Permukiman	APBD
Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Infrastruktur	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah yang merata	Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	APBD
Penurunan Jumlah	Infrastruktur	Dinas Perumahan dan	Meningkatnya pembangunan infrastruktur	Meningkatnya pengelolaan kawasan	Terselenggaranya perbaikan rumah tidak layak huni	Program Perumahan dan Kawasan	APBD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Strategi	Bidang	OPD	Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	Sumber Pendanaan
Kantong Kemiskinan		Kawasan Permukiman	daerah yang merata	kumuh perkotaan		Permukiman Kumuh	

Sumber: Hasil Analisis FGD TKPK, Data Sekunder dari OPD, LP2KD, LKJIP, dan Renstra OPD, 2025

4.4.6 RAD pada Bidang Pangan

Difokuskan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan daerah dilihat dari Indeks Ketahanan Pangan masyarakat Kota Salatiga

Tabel 4. 14 RAD Bidang Pangan

Strategi	Bidang	OPD	Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	Sumber Pendanaan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	Meningkatnya ketahanan pangan dan masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	APBD
Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	APBD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Strategi	Bidang	OPD	Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	Sumber Pendanaan
Meningkatkan Pendapatan	Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	APBD
Meningkatkan Pendapatan	Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	APBD
Meningkatkan Pendapatan	Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	APBD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Strategi	Bidang	OPD	Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	Sumber Pendanaan
Meningkatkan Pendapatan	Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	APBD
Meningkatkan Pendapatan	Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya Ketangguhan Petani Menghadapi Bencana	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	APBD
Meningkatkan Pendapatan	Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya Kapasitas Petani	Program Penyuluhan Pertanian	APBD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Strategi	Bidang	OPD	Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	Sumber Pendanaan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	APBD

Sumber: Hasil Analisis FGD TKPK, Data Sekunder dari OPD, LP2KD, LKJIP, dan Renstra OPD, 2025

4.4.7 RAD pada Bidang Sosial

Difokuskan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dilihat dari cakupan penanganan PPKS.

Tabel 4. 15 RAD Bidang Sosial

Strategi	Bidang	OPD	Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	Sumber Pendanaan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Sosial	Dinas Sosial	Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Terselenggaranya bimbingan teknis bagi PSKS dan Pekerja Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	APBD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Strategi	Bidang	OPD	Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	Sumber Pendanaan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Sosial	Dinas Sosial	Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Terselenggaranya peningkatan kompetensi bagi pekerja sosial	Program Rehabilitasi Sosial	APBD
Mengurangi Beban Pengeluaran	Sosial	Dinas Sosial	Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Tersalurkannya upaya perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	APBD
Mengurangi Beban Pengeluaran	Sosial	Dinas Sosial	Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Terpenuhinya perlindungan sosial bagi korban bencana	Program Penanganan Bencana	APBD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Strategi	Bidang	OPD	Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	Sumber Pendanaan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Sosial	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya peran keluarga sejahtera dalam pengurangan kemiskinan	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	APBD

Sumber: Hasil Analisis FGD TKPK, Data Sekunder dari OPD, LP2KD, LKJIP, dan Renstra OPD, 2025

4.4.8 RAD pada Bidang Ekonomi

Difokuskan untuk meningkatkan produktivitas perekonomian daerah dilihat dari angka PDRB per kapita masyarakat Kota Salatiga

Tabel 4. 16 RAD Bidang Ekonomi

Strategi	Bidang	OPD	Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	Sumber Pendanaan
Meningkatkan Pendapatan	Ekonomi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Terlaksananya fasilitasi modal usaha bagi UMKM	Program Pengembangan UMKM	APBD
Meningkatkan Pendapatan	Ekonomi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Adanya subsidi atau stimulus bagi UMKM	Program Pengembangan UMKM	APBD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Strategi	Bidang	OPD	Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	Sumber Pendanaan
			pertumbuhan ekonomi				
Meningkatkan Pendapatan	Ekonomi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Terfasilitasinya kemitraan usaha antara pelaku UMKM dan pemasok bahan baku	Program Pengembangan UMKM	APBD
Meningkatkan Pendapatan	Ekonomi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya daya saing UMKM	Terselenggaranya pelatihan pengembangan produk berbasis inovasi dan kebutuhan pasar	Program Pengembangan UMKM	APBD
Meningkatkan Pendapatan	Ekonomi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya daya saing UMKM	Terselenggaranya pelatihan digital marketing dan akses e-commerce	Program Pengembangan UMKM	APBD
Meningkatkan Pendapatan	Ekonomi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Tersedianya dukungan sarana bagi seni dan budaya lokal	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	APBD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Strategi	Bidang	OPD	Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	Sumber Pendanaan
Meningkatkan Pendapatan	Ekonomi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tersedianya dukungan prasarana bagi seni dan budaya lokal	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	APBD
Meningkatkan Pendapatan	Ekonomi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Terselenggaranya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pelaku kesenian dan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	APBD
Meningkatkan Pendapatan	Ekonomi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Tersedianya kebijakan pengembangan pariwisata daerah yang lebih terarah	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	APBD

Sumber: Hasil Analisis FGD TKPK, Data Sekunder dari OPD, LP2KD, LKJIP, dan Renstra OPD, 2025

4.4.9 RAD pada Bidang Kewilayahan

Difokuskan untuk kesiapsiagaan terhadap bencana dilihat dari penurunan Indeks Risiko Bencana Daerah Kota Salatiga

Tabel 4. 17 RAD Bidang Kewilayahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Strategi	Bidang	OPD	Tujuan	Prioritas Intervensi Jangka Menengah	Prioritas Intervensi Jangka Pendek	Program	Sumber Pendanaan
Mengurangi Beban Pengeluaran	Kewilayahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dan Berkurangnya Kerentanan Masyarakat dalam kerangka mitigasi bencana di daerah	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatnya cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	APBD
Mengurangi Beban Pengeluaran	Kewilayahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dan Berkurangnya Kerentanan Masyarakat dalam kerangka mitigasi bencana di daerah	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatnya Cakupan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	APBD

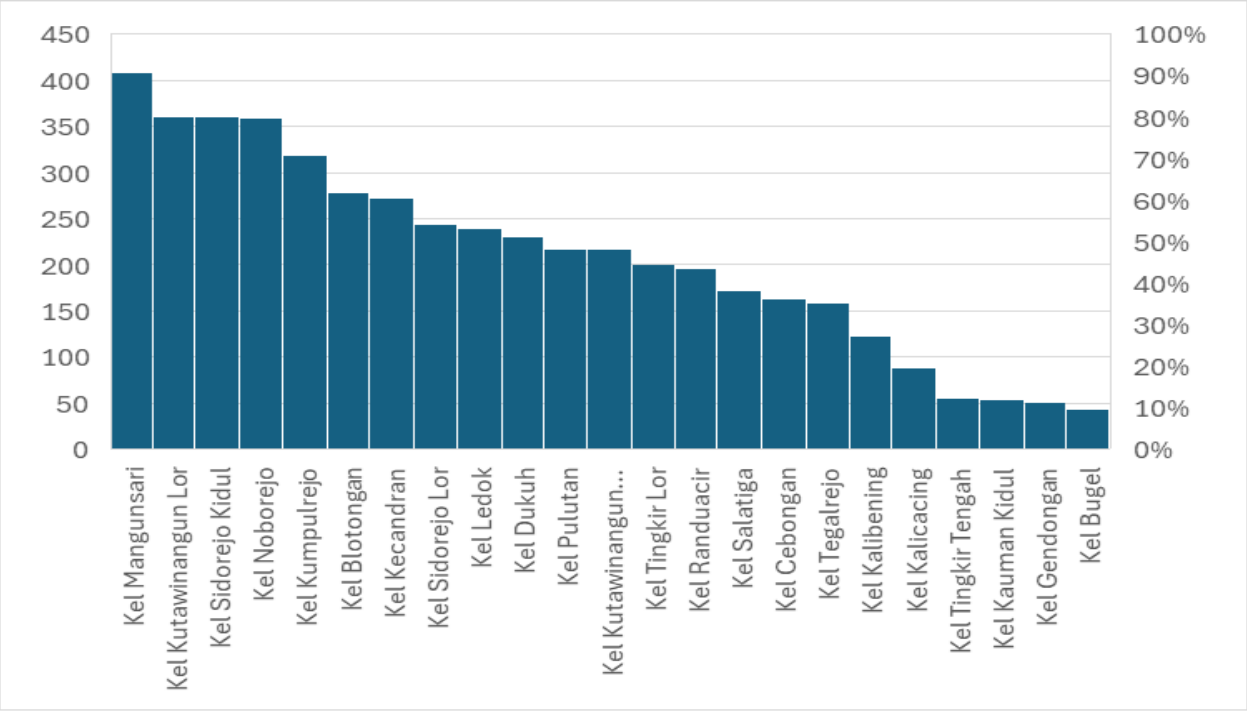
Sumber: Hasil Analisis FGD TKPK, Data Sekunder dari OPD, LP2KD, LKJIP, dan Renstra OPD, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB V
LOKASI PRIORITAS

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan kewilayahan di Kota Salatiga. Program penanggulangan kemiskinan sebagai amanat dari prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah juga termasuk didalamnya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Salatiga. Penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga difokuskan pada Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tingkat kelurahan dengan memperhatikan sebarannya secara kewilayahan. Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem juga memperhatikan jumlah penduduk miskin serta wilayah yang berpotensi menjadi kantong kemiskinan tingkat kelurahan di Kota Salatiga sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 5. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tiap Kelurahan di



Kota Salatiga

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Hasil analisis prioritas upaya P3KE kemudian terbagi menjadi 3 prioritas yaitu prioritas Tinggi, Sedang dan Rendah sebagaimana pada tabel berikut:

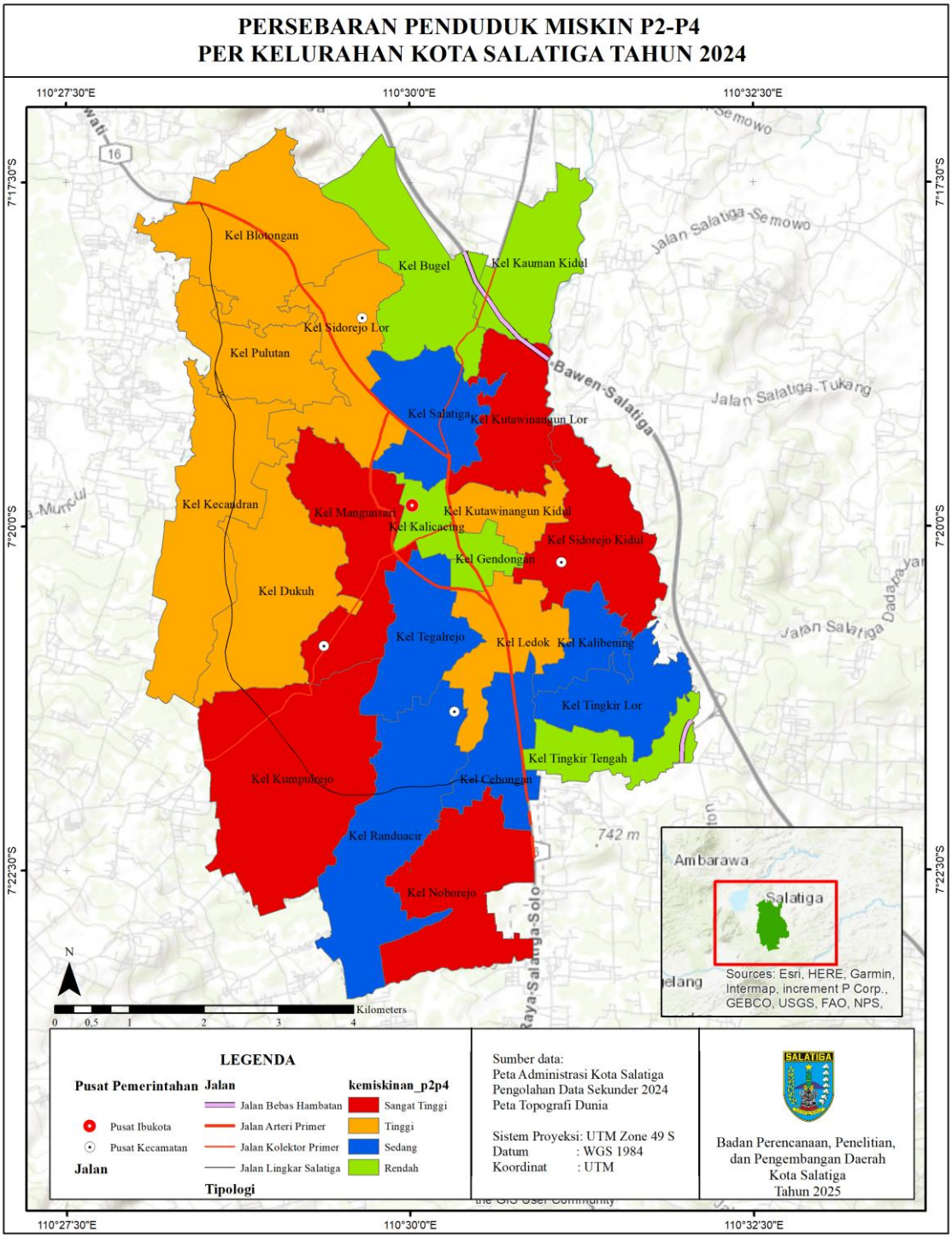
Tabel 5. 1 Sebaran Prioritas P3KE tingkat Kelurahan di Kota Salatiga

Kelas	Kelurahan
(Sangat Tinggi)	Kutowinangun Lor, Sidorejo Kidul, Mangunsari, Kumpulrejo, dan Noborejo.
(Tinggi)	Blotongan, Kecandran, Pulutan, Sidorejo Lor, Dukuh, Kutawinangun Kidul, dan Ledok.
(Sedang)	Bugel, Cebongan, Salatiga, Randuacir, Tingkir Lor, Tegalrejo, Kauman Kidul, Kalicacing, Gendongan, Kalibening, dan Tingkir Tengah.
(Rendah)	Bugel, Kauman Kidul, Kalicacing, Gendongan, dan Tingkir Tengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sumber: Hasil Analisis, 2025.

Berdasarkan tabel 5.1 di atas, prioritas upaya P3KE secara kewilayahan tersebar merata di setiap sisi kota dan berasosiasi dengan beberapa koridor jalan di Kota Salatiga. Adapun sebaran secara kewilayahan tiap kelurahan dengan prioritas P3KE dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



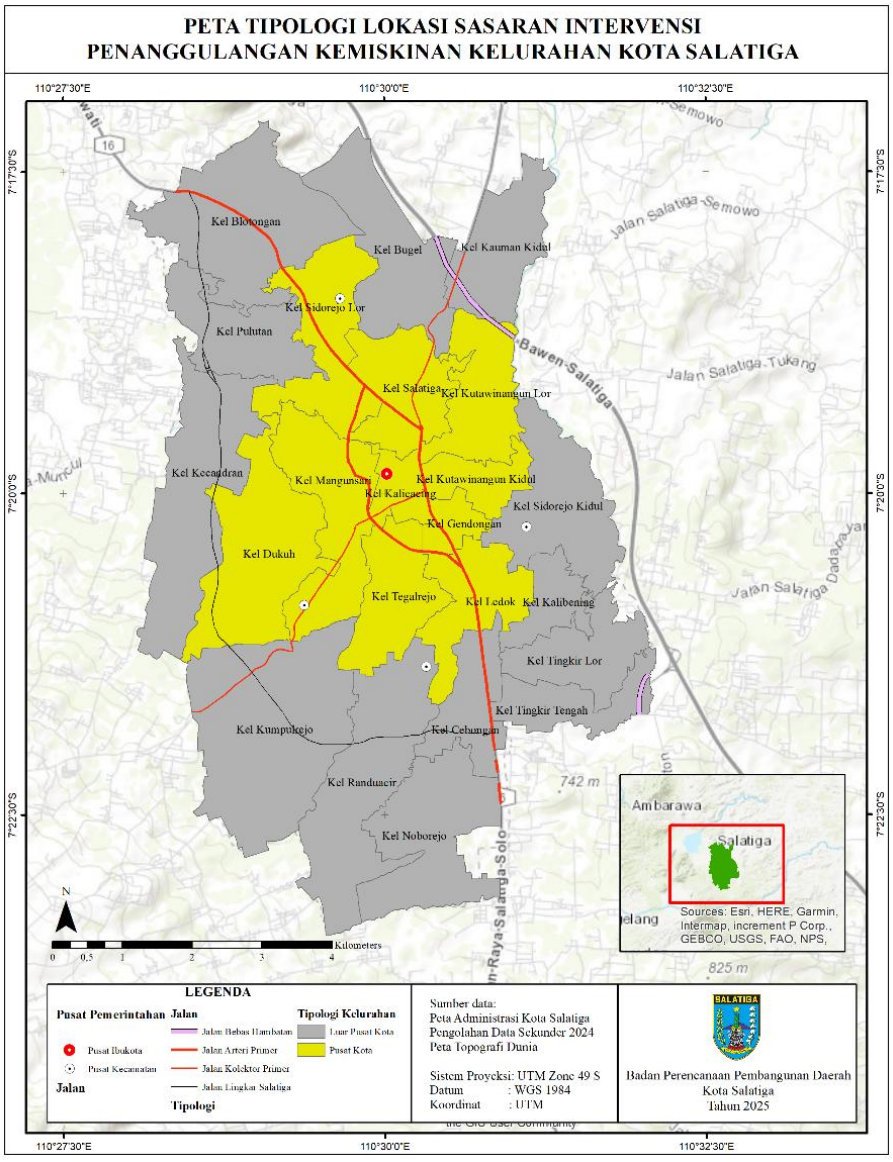
Gambar 5. 2 Sebaran Prioritas P3KE tingkat Kelurahan di Kota Salatiga
Sumber: Data Hasil Padupadan DTKS, 2024

Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem juga ditinjau berdasarkan karakteristik wilayah dan struktur keruangan yang ada di Kota Salatiga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dengan mengacu pada tipologi wilayah yang terbagi menjadi Pusat Kota dan Luar Pusat Kota. Berdasarkan sebarannya, sebagian besar kelurahan dengan kemiskinan ekstrem berada di luar pusat kota. Sementara itu, terdapat 2 kelurahan yang termasuk tipologi pusat kota dengan kondisi kemiskinan ekstrem serta menjadi prioritas tinggi yaitu berada di Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Kutawinangun Lor dengan masing-masing jumlah penduduk miskin sebanyak 409 jiwa (8,5 persen) dan 361 jiwa (7,5 persen).

Adapun peta Tipologi Lokasi Sasaran Intervensi Penanggulangan Kemiskinan tingkat kelurahan di Kota Salatiga dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar 5. 3 Tipologi Sasaran Intervensi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Kota Salatiga

Sumber: Hasil Analisis tim Review RPKD, 2025

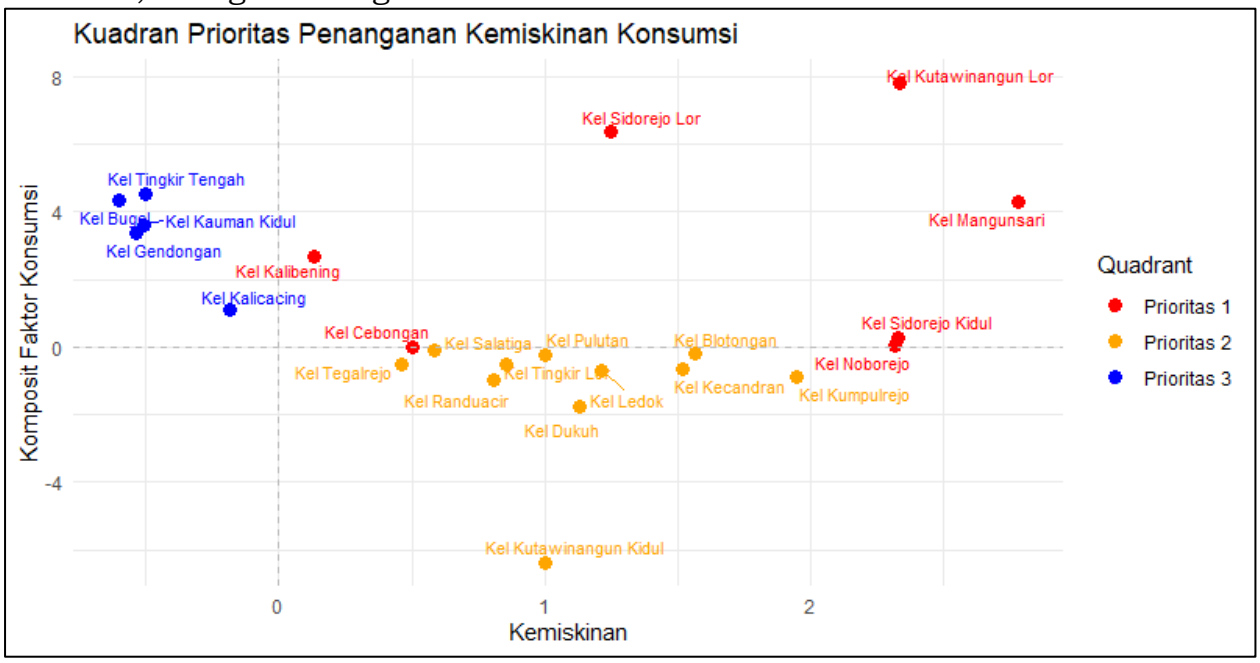
Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kota Salatiga juga memperhatikan analisis kewilayahan yang didasarkan pada bidang penanggulangan kemiskinan. Analisis tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan prioritas dari intervensi program/kegiatan yang diarahkan dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

fokus permasalahan pada tiap bidang di wilayah tersebut. Analisis pada tiap bidang diantaranya bidang Konsumsi, bidang Ketenagakerjaan, bidang Kesehatan, bidang Pendidikan, bidang Infrastruktur Dasar, bidang Ketahanan Pangan serta komposit dari seluruh bidang penanggulangan kemiskinan. Adapun analisis wilayah intervensi program penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga adalah sebagaimana berikut:

5.1. Prioritas Wilayah Bidang Konsumsi

Pemetaan Prioritas wilayah dalam penanggulangan kemiskinan bidang konsumsi dilakukan dengan menghitung nilai komposit dari komponen faktor konsumsi yang terdiri dari data jumlah penerima bantuan pangan, jumlah masyarakat berpenghasilan rendah, dan jumlah penerima PKH (Program Keluarga Harapan) serta nilai kemiskinan pada tiap kelurahan di Kota Salatiga tahun 2024. Hasil analisis prioritas intervensi terbagi dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 5. 4 Kuadran Prioritas Penanganan Kemiskinan Konsumsi

Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025

Berdasarkan gambar 5.4 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi berdasarkan bidang konsumsi di Kota Salatiga terbagi ke dalam 3 prioritas. Adapun jika ditinjau berdasarkan tipologi wilayah tiap kelurahan, sebaran wilayah intervensi dianalisis sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5. 2 Wilayah Prioritas Intervensi bidang Konsumsi menurut Tipologi Wilayah Tingkat Kelurahan di Kota Salatiga

Prioritas Intervensi	**Tipologi Wilayah**	
	Pusat Kota	**Luar Pusat Kota**
Prioritas I	Kelurahan Mangunsari, Sidorejo Lor, dan Kelurahan Kutawinangun Lor	Kelurahan Cebongan, Noborejo, Kalibening, dan Kelurahan Sidorejo Kidul.
Prioritas II	Kelurahan Tegalrejo, Ledok, Dukuh, Kutawinangun	Kelurahan Kumpulrejo, Randuacir, Kecandran,

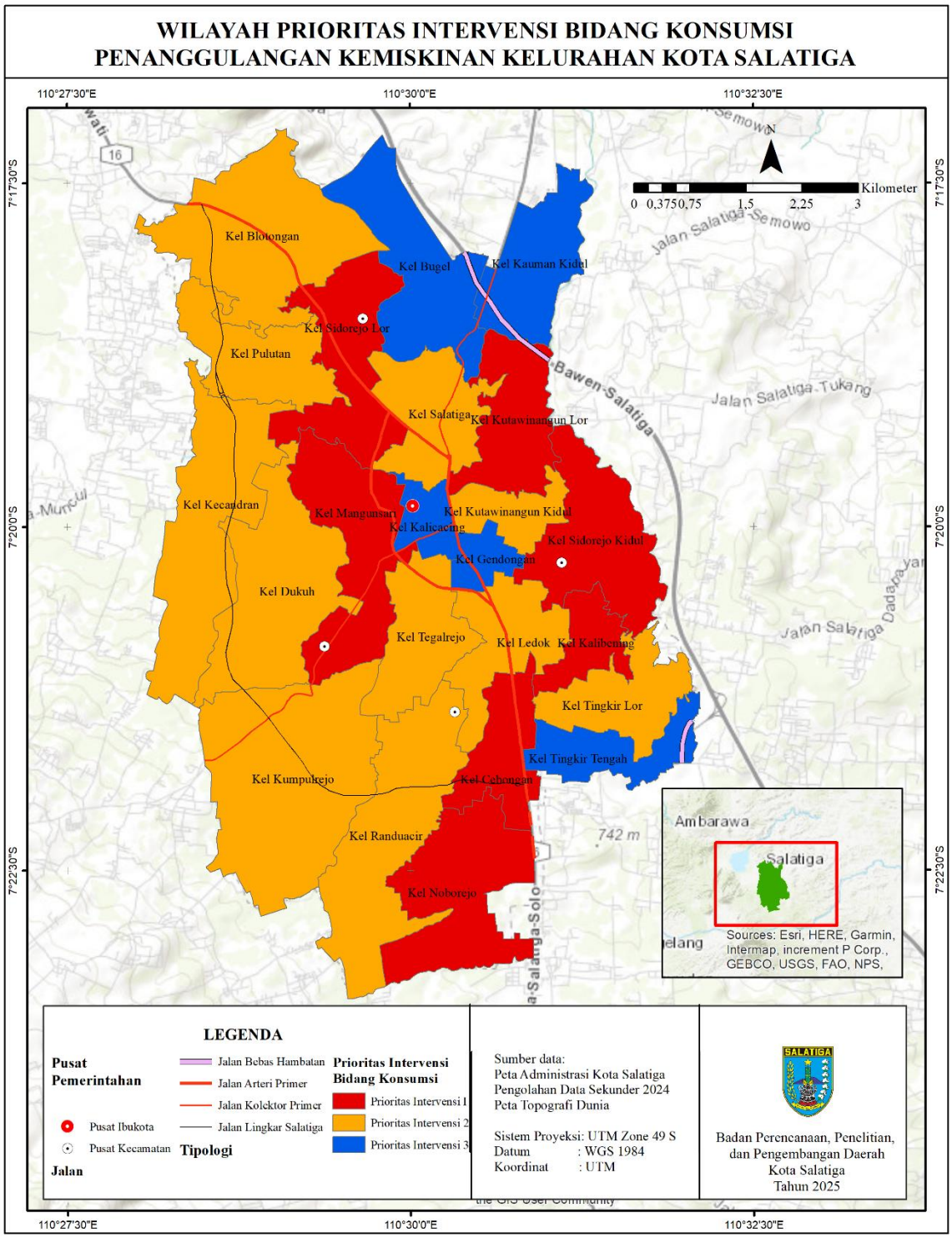
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	Kidul, dan Kelurahan Salatiga.	Blotongan, Pulutan, dan Kelurahan Tingkir Lor
Prioritas III	Kelurahan Kalicacing dan Kelurahan Gendongan	Kelurahan Bugel, Kauman Kidul, dan Kelurahan Tingkir Tengah
Prioritas IV		

Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025

Berdasarkan Tabel 5.2 tersebut, didapati bahwa sebaran wilayah prioritas intervensi pada bidang konsumsi dianalisis menurut tipologi wilayah pada tiap kelurahan di Kota Salatiga sebagaimana divisualisasikan pada peta berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 5. 5 Peta Wilayah Prioritas Intervensi Bidang Konsumsi Penanggulangan Kemiskinan tiap Kelurahan Kota Salatiga

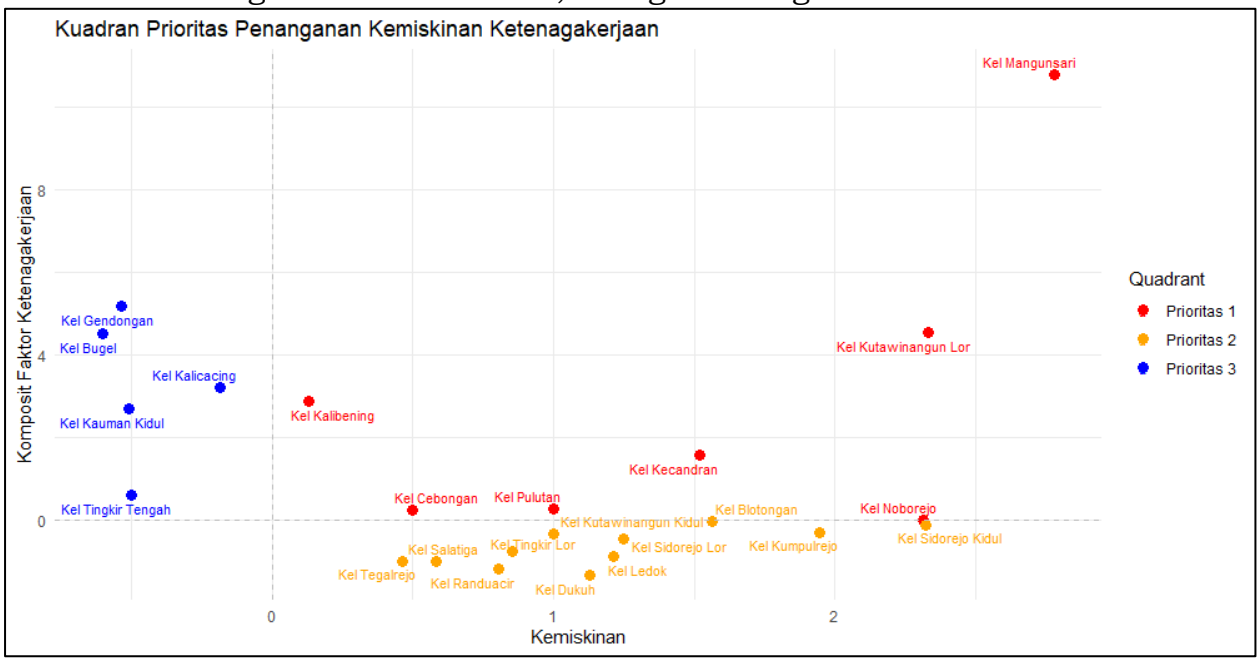
Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025

5.2. Prioritas Wilayah Bidang Ketenagakerjaan

Pemetaan prioritas wilayah dalam penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan dilakukan dengan menghitung nilai komposit dari faktor ketenagakerjaan yang mencakup nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dan jumlah pencari kerja yang kemudian dianalisis dengan nilai kemiskinan pada tiap kelurahan di Kota Salatiga tahun 2024. Hasil analisis prioritas intervensi terbagi dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 5. 6 Kuadran Prioritas Penanganan Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan
di Kota Salatiga Tahun 2024

Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025

Berdasarkan gambar 5.6 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi berdasarkan bidang ketenagakerjaan di Kota Salatiga terbagi ke dalam 3 prioritas. Jika ditinjau berdasarkan tipologi wilayah tiap kelurahan, sebaran wilayah intervensi dianalisis sebagaimana pada tabel berikut:

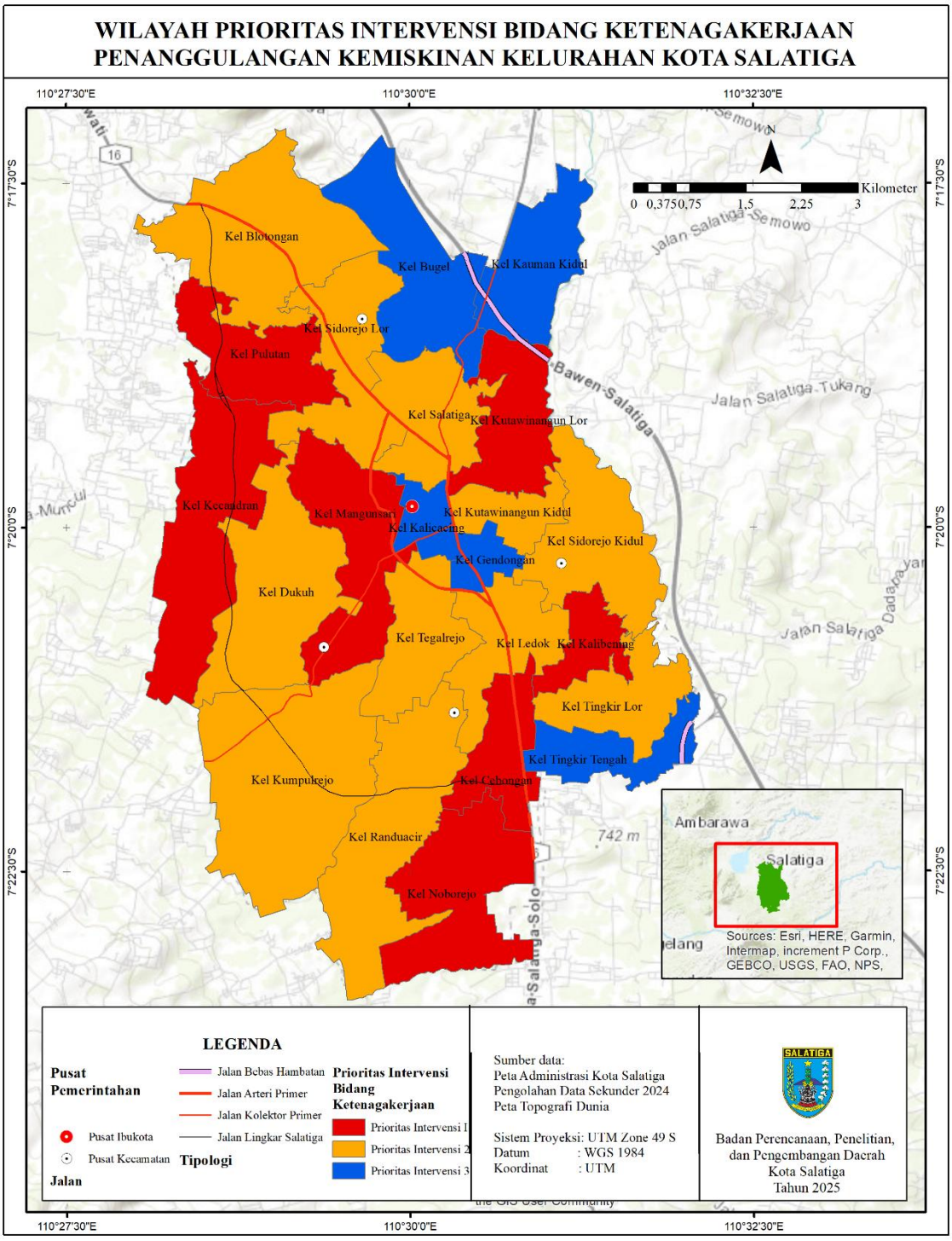
Tabel 5. 3 Wilayah Prioritas Intervensi bidang Ketenagakerjaan menurut Tipologi Wilayah
Tingkat Kelurahan Kelurahan di Kota Salatiga

Prioritas Intervensi	**Tipologi Wilayah**	
	Pusat Kota	**Luar Pusat Kota**
Prioritas I	Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Kutawinangun Lor.	Kelurahan Cebongan, Noborejo, Kecandran, Pulutan, dan Kelurahan Kalibening.
Prioritas II	Kelurahan Ledok, Tegalrejo, Dukuh, Sidorejo Lor, Salatiga, dan Kelurahan Kutawinangun Kidul.	Kelurahan Kumpulrejo, Randuacir, Blotongan, Tingkir Lor, dan Kelurahan Sidorejo Kidul.
Prioritas III	Kelurahan Kalicacing dan Kelurahan Gendongan	Kelurahan Bugel, Kauman Kidul, dan Kelurahan Tingkir Tengah.
Prioritas IV		

Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025.

Berdasarkan Tabel 5.3 tersebut, didapati bahwa sebaran wilayah prioritas intervensi pada bidang ketenagakerjaan dianalisis menurut tipologi wilayah pada tiap kelurahan di Kota Salatiga sebagaimana divisualisasikan pada peta berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 5. 7 Peta Wilayah Prioritas Intervensi Bidang Ketenagakerjaan Penanggulangan Kemiskinan tiap Kelurahan di Kota Salatiga

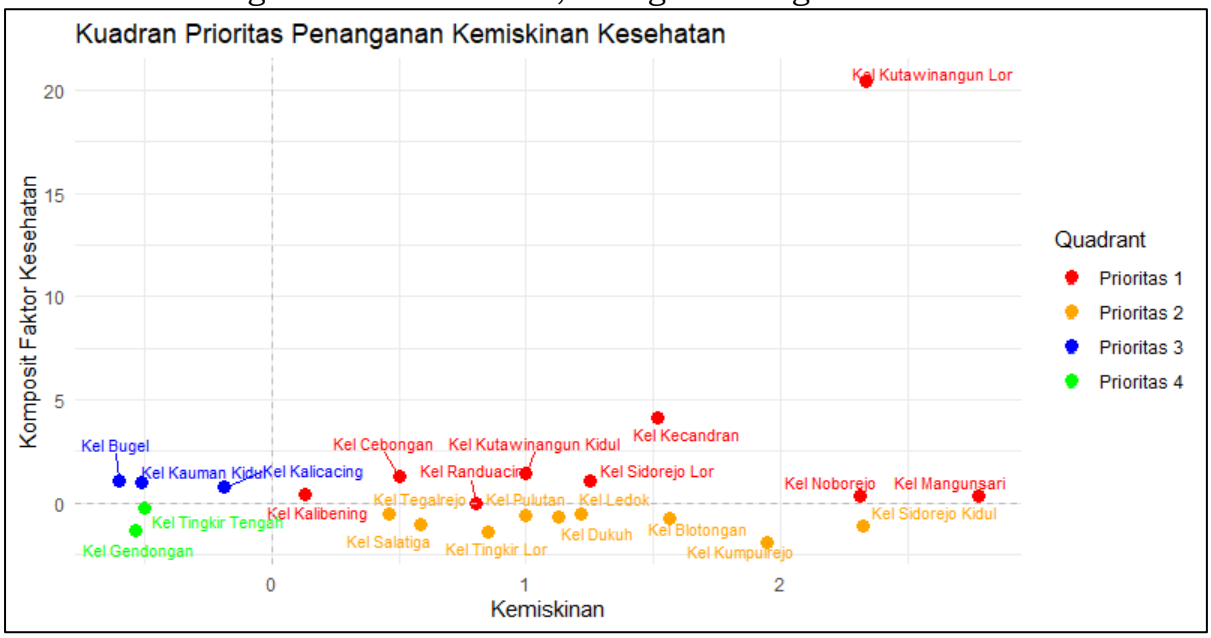
Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025

5.3. Prioritas Wilayah Bidang Kesehatan

Pemetaan prioritas wilayah dalam penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan dilakukan dengan menghitung nilai komposit dari komponen faktor kesehatan yang terdiri dari nilai prevalensi stunting, jumlah kematian ibu, jumlah bayi meninggal, balita meninggal, nilai prevalensi gizi buruk, nilai prevalensi Demam Berdarah Dengue (DBD), jumlah posyandu dan jumlah tenaga kerja yang kemudian dianalisis dengan angka kemiskinan pada tiap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kelurahan di Kota Salatiga tahun 2024. Adapun hasil analisis prioritas intervensi terbagi dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 5. 8 Kuadran Prioritas Penanganan Kemiskinan Bidang Kesehatan di Kota Salatiga

Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025

Berdasarkan gambar 5.8 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi berdasarkan bidang kesehatan di Kota Salatiga terbagi ke dalam 4 prioritas. Jika ditinjau berdasarkan tipologi wilayah tiap kelurahan, sebaran wilayah intervensi dianalisis sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5. 4 Wilayah Prioritas Intervensi bidang Kesehatan menurut Tipologi Wilayah
Tingkat Kelurahan di Kota Salatiga

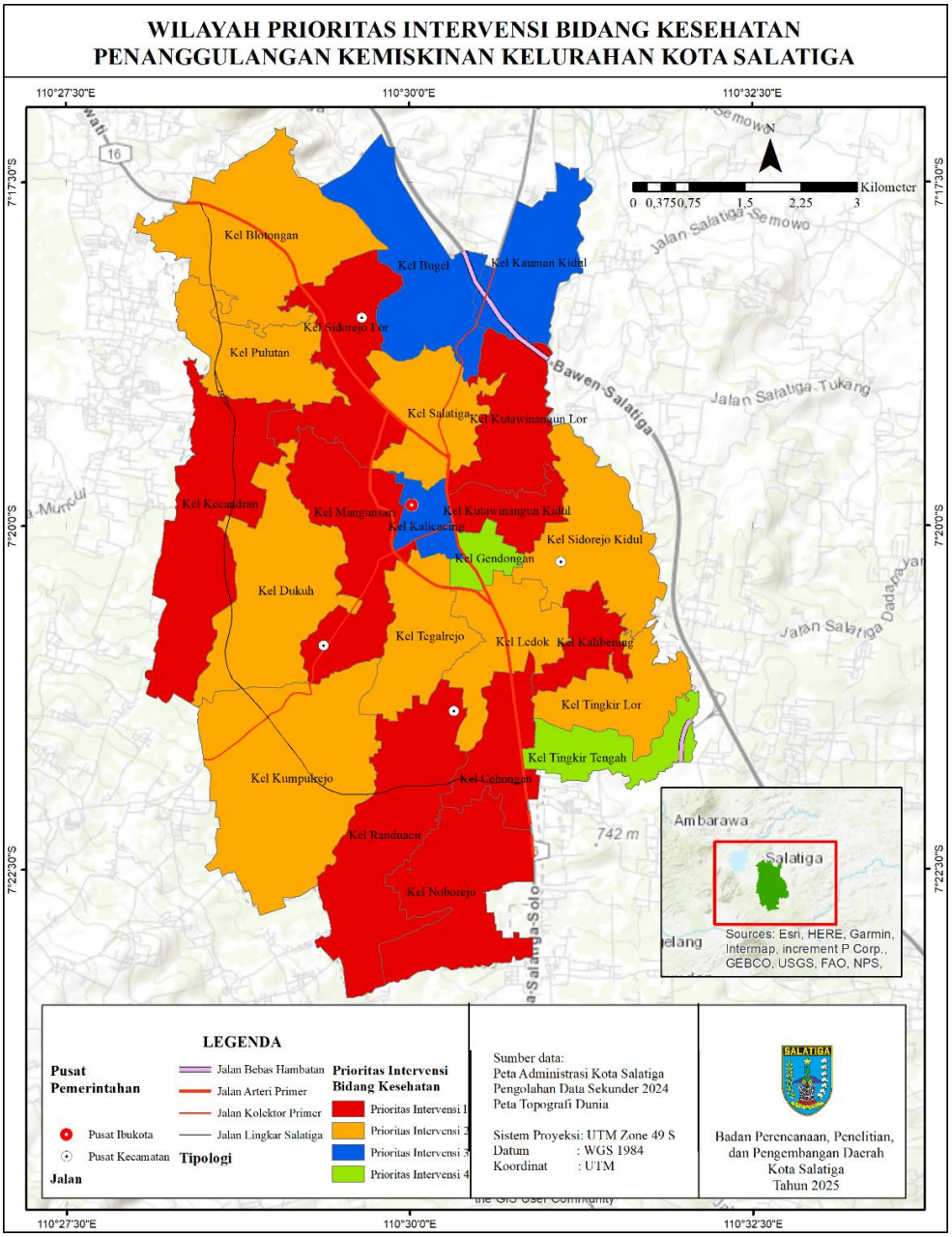
Prioritas Intervensi	**Tipologi Wilayah**	
	Pusat Kota	**Luar Pusat Kota**
Prioritas I	Kelurahan Sidorejo Lor, Mangunsari, Kutawinangun Lor, dan Kelurahan Kutawinangun Kidul.	Kelurahan Cebongan, Randuacir, Noborejo, Kecandran, dan Kelurahan Kalibening.
Prioritas II	Kelurahan Tegalrejo, Dukuh, dan Kelurahan Salatiga.	Kelurahan Blotongan, Pulutan, Tingkir Lor, dan Kelurahan Sidorejo Kidul.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Prioritas III	Kelurahan Cacing.	Kelurahan Bugel, dan Kelurahan Kauman Kidul.
Prioritas IV	Kelurahan Gendongan.	Kelurahan Tingkir Tengah.

Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025.

Berdasarkan Tabel 5.4 tersebut, didapati bahwa sebaran wilayah prioritas intervensi pada bidang kesehatan dianalisis menurut tipologi wilayah pada tiap kelurahan di Kota Salatiga sebagaimana divisualisasikan pada peta berikut:



Gambar 5. 9 Peta Wilayah Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan tiap Kelurahan di Kota Salatiga

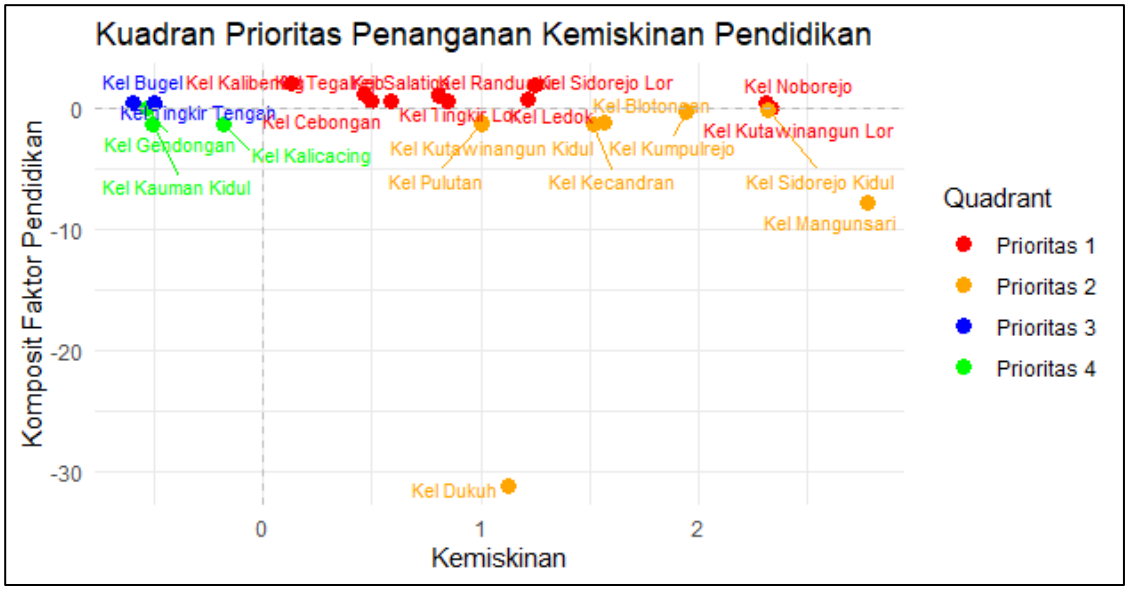
Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025

5.4. Prioritas Wilayah Bidang Pendidikan

Pemetaan prioritas wilayah dalam penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan dilakukan dengan menghitung nilai komposit dari komponen faktor pendidikan yang terdiri dari jumlah putus sekolah, jumlah penduduk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

usia sekolah yang tidak bersekolah, nilai kondisi Sekolah Dasar (SD), dan nilai kondisi Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang kemudian dianalisis dengan angka kemiskinan pada tiap kelurahan di Kota Salatiga tahun 2024. Adapun hasil analisis prioritas intervensi terbagi dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 5. 10 Kuadran Prioritas Penanganan Kemiskinan Bidang Pendidikan di Kota Salatiga

Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025

Berdasarkan gambar 5.10 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi berdasarkan bidang pendidikan di Kota Salatiga terbagi ke dalam 4 prioritas. Jika ditinjau berdasarkan tipologi wilayah tiap kelurahan, sebaran wilayah intervensi dianalisis sebagaimana pada tabel berikut:

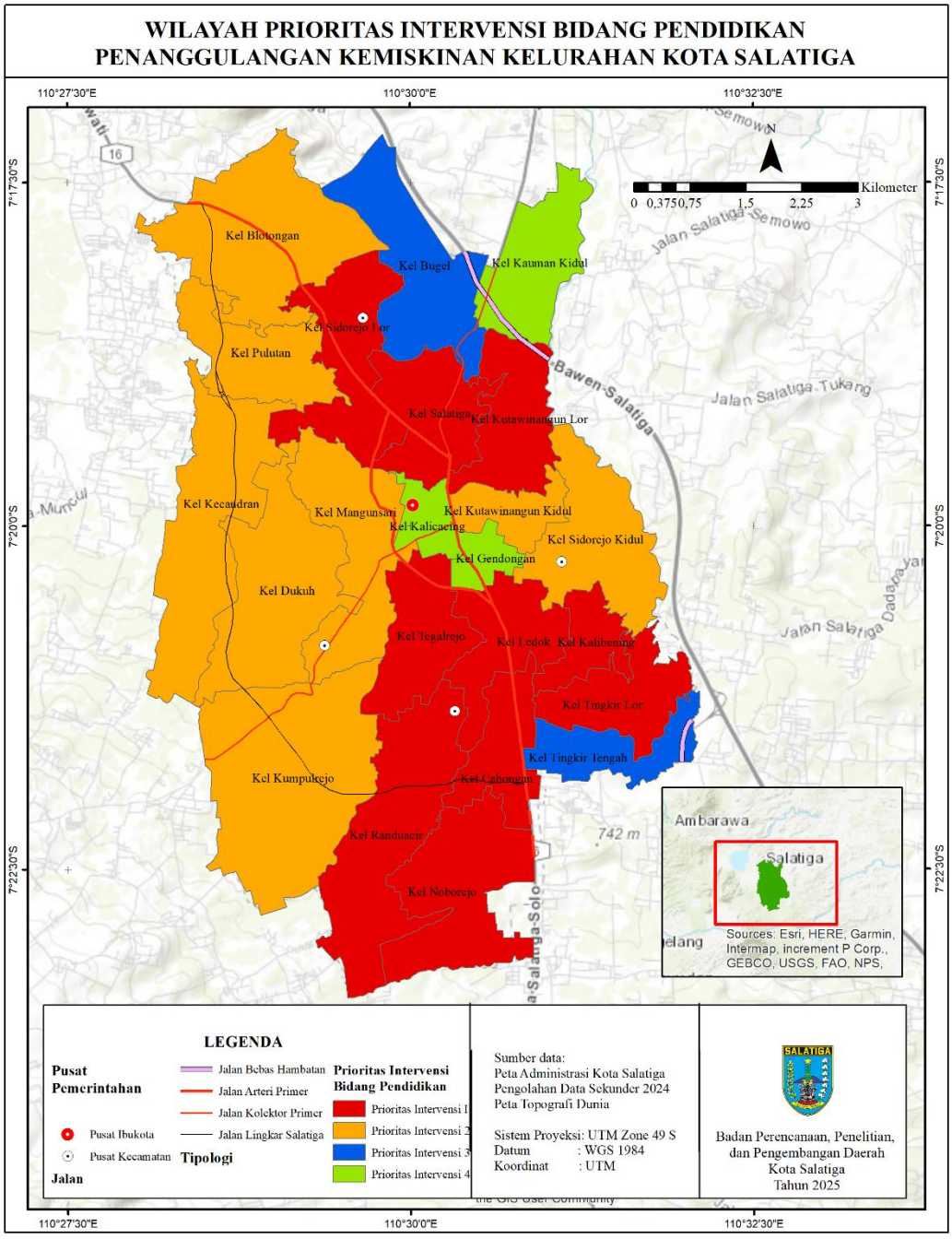
Tabel 5. 5 Wilayah Prioritas Intervensi bidang Pendidikan menurut Tipologi Wilayah Tingkat Kelurahan Kelurahan di Kota Salatiga

Prioritas Intervensi	Tipologi Wilayah	
	Pusat Kota	Luar Pusat Kota
Prioritas I	Kelurahan Ledok, Tegalrejo, Sidorejo Lor, Salatiga, dan Kelurahan Kutawinangun Lor.	Kelurahan Cebongan, Randuacir, Noborejo, Tingkir Lor, dan Kelurahan Kalibening.
Prioritas II	Kelurahan Dukuh, Mangunsari, dan Kelurahan Kutawinangun Kidul.	Kelurahan Kumpulrejo, Kecandran, Blotongan, Pulutan, dan Kelurahan Sidorejo Kidul.
Prioritas III		Kelurahan Bugel, dan Kelurahan Tingkir Tengah.
Prioritas IV	Kelurahan Kalicacing, dan Kelurahan Gendongan.	Kalurahan Kauman Kidul.

Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025.

Berdasarkan Tabel 5.5 tersebut, didapati bahwa sebaran wilayah prioritas intervensi pada bidang pendidikan dianalisis menurut tipologi wilayah pada tiap kelurahan di Kota Salatiga sebagaimana divisualisasikan pada peta berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



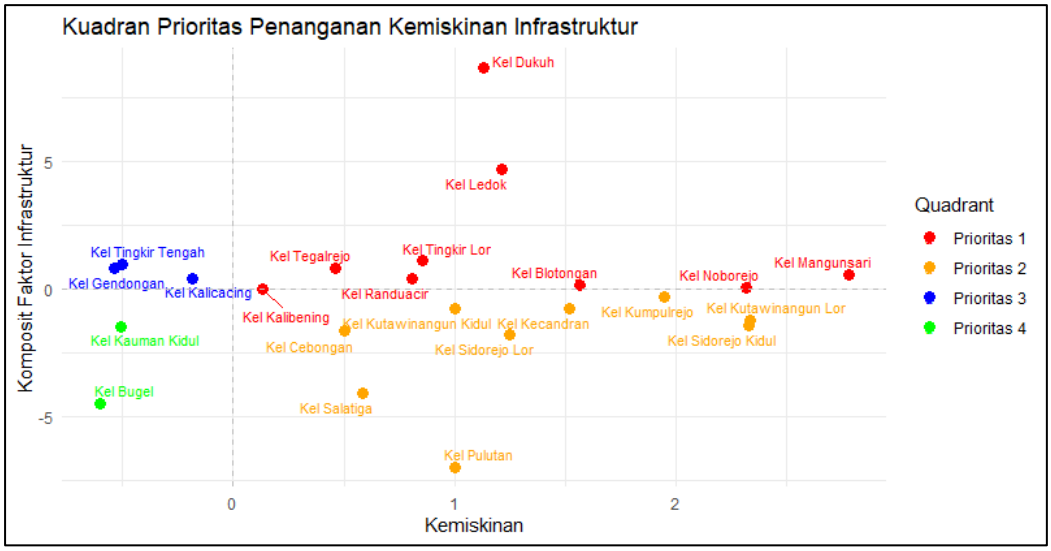
Gambar 5. 11 Peta Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan Penanggulangan Kemiskinan tiap Kelurahan di Kota Salatiga

Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5.5. Prioritas Wilayah Bidang Infrastruktur Dasar

Pemetaan prioritas wilayah dalam penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar dilakukan dengan menghitung nilai komposit dari komponen faktor infrastruktur yang terdiri dari jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), data kondisi dan status bangunan, data status lahan, data sumber air minum, data jumlah penerangan, jumlah kepemilikan Listrik, kepemilikan bahan bakar masak, ketersediaan fasilitas jamban, serta ketersediaan pengelolaan limbah rumah tangga yang kemudian dianalisis dengan angka kemiskinan pada tiap kelurahan di Kota Salatiga tahun 2024. Adapun hasil analisis prioritas intervensi terbagi dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 5. 12 Kuadran Prioritas Penanganan Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar di Kota Salatiga

Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025.

Berdasarkan gambar 5.12 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi berdasarkan bidang infrastruktur dasar di Kota Salatiga terbagi ke dalam 4 prioritas. Jika ditinjau berdasarkan tipologi wilayah tiap kelurahan, sebaran wilayah intervensi dianalisis sebagaimana pada tabel berikut:

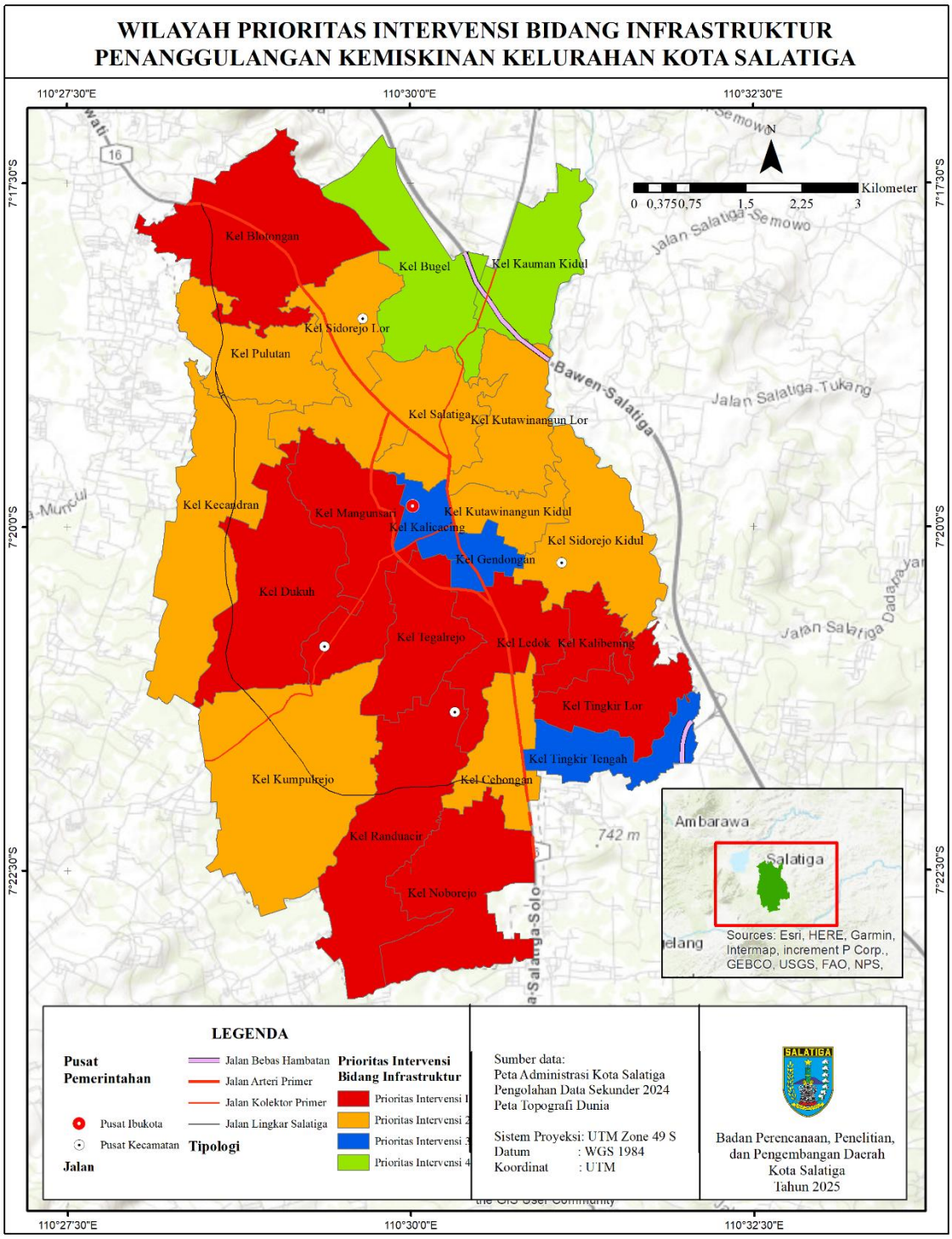
Tabel 5. 6 Wilayah Prioritas Intervensi bidang Infrastruktur Dasar menurut Tipologi Wilayah Tingkat Kelurahan Kelurahan di Kota Salatiga

Prioritas Intervensi	**Tipologi Wilayah**	
	Pusat Kota	**Luar Pusat Kota**
Prioritas I	Kabupaten Ledok, Tegalrejo, Dukuh, dan Kelurahan Mangunsari.	Kelurahan Randuacir, Noborejo, Blotongan, Tingkir Lor, dan Kelurahan Kalibening.
Prioritas II	Kelurahan Sidorejo Lor, Salatiga, Kutawinangun Lor,	Kelurahan Cebongan, Kumpulrejo, Kecandran, Pulutan, dan Kelurahan Sidorejo Kidul.
Prioritas III	Kelurahan Kalicacing, dan Kelurahan Gendongan.	Kelurahan Tingkir Tengah.
Prioritas IV		Kelurahan Bugel, dan Kelurahan Kauman Kidul.

Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Berdasarkan Tabel 5.6 tersebut, didapati bahwa sebaran wilayah prioritas intervensi pada bidang infrastruktur dasar dianalisis menurut tipologi wilayah pada tiap kelurahan di Kota Salatiga sebagaimana divisualisasikan pada peta berikut:



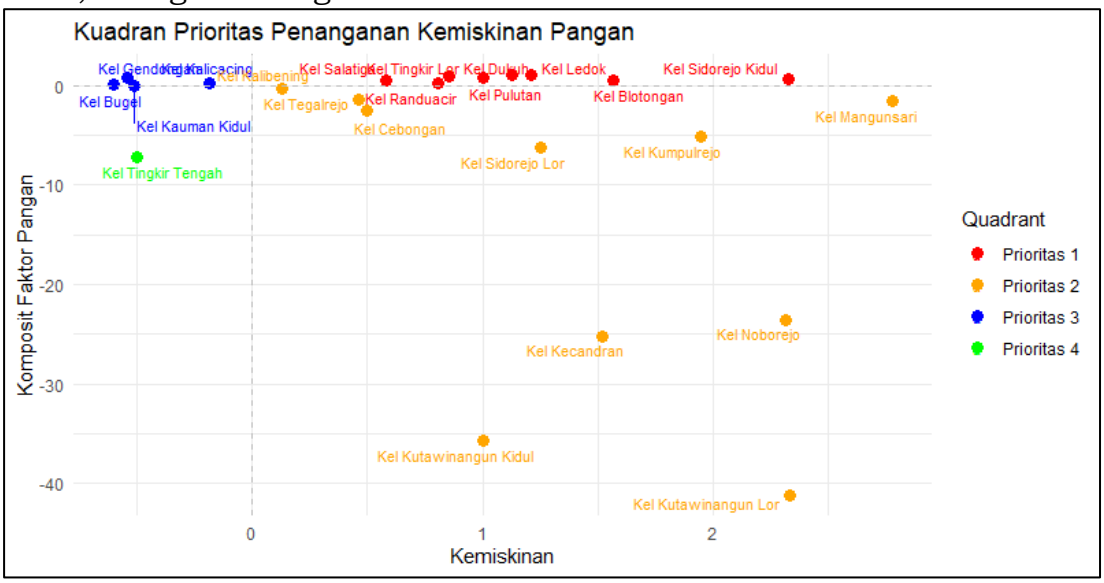
Gambar 5. 13 Peta Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar Penanggulangan Kemiskinan tiap Kelurahan di Kota Salatiga

Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5.6. Prioritas Wilayah Bidang Ketahanan Pangan

Pemetaan prioritas wilayah dalam penanggulangan kemiskinan bidang ketahanan pangan dilakukan dengan menghitung nilai komposit dari komponen faktor pangan yang terdiri dari nilai sarana dan prasarana pangan, nilai prevalensi kerawanan pangan, serta jumlah kelompok tani yang kemudian dianalisis dengan angka kemiskinan pada tiap kelurahan di Kota Salatiga tahun 2024. Adapun hasil analisis prioritas intervensi terbagi dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut



Gambar 5. 14 Kuadran Prioritas Penanganan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan di Kota Salatiga

Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025

Berdasarkan gambar 5.14 dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi berdasarkan bidang ketahanan pangan di Kota Salatiga terbagi ke dalam 4 prioritas. Jika ditinjau berdasarkan tipologi wilayah tiap kelurahan, sebaran wilayah intervensi dianalisis sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5. 7 Wilayah Prioritas Intervensi bidang Ketahanan Pangan menurut Tipologi Wilayah Tingkat Kelurahan Kelurahan di Kota Salatiga

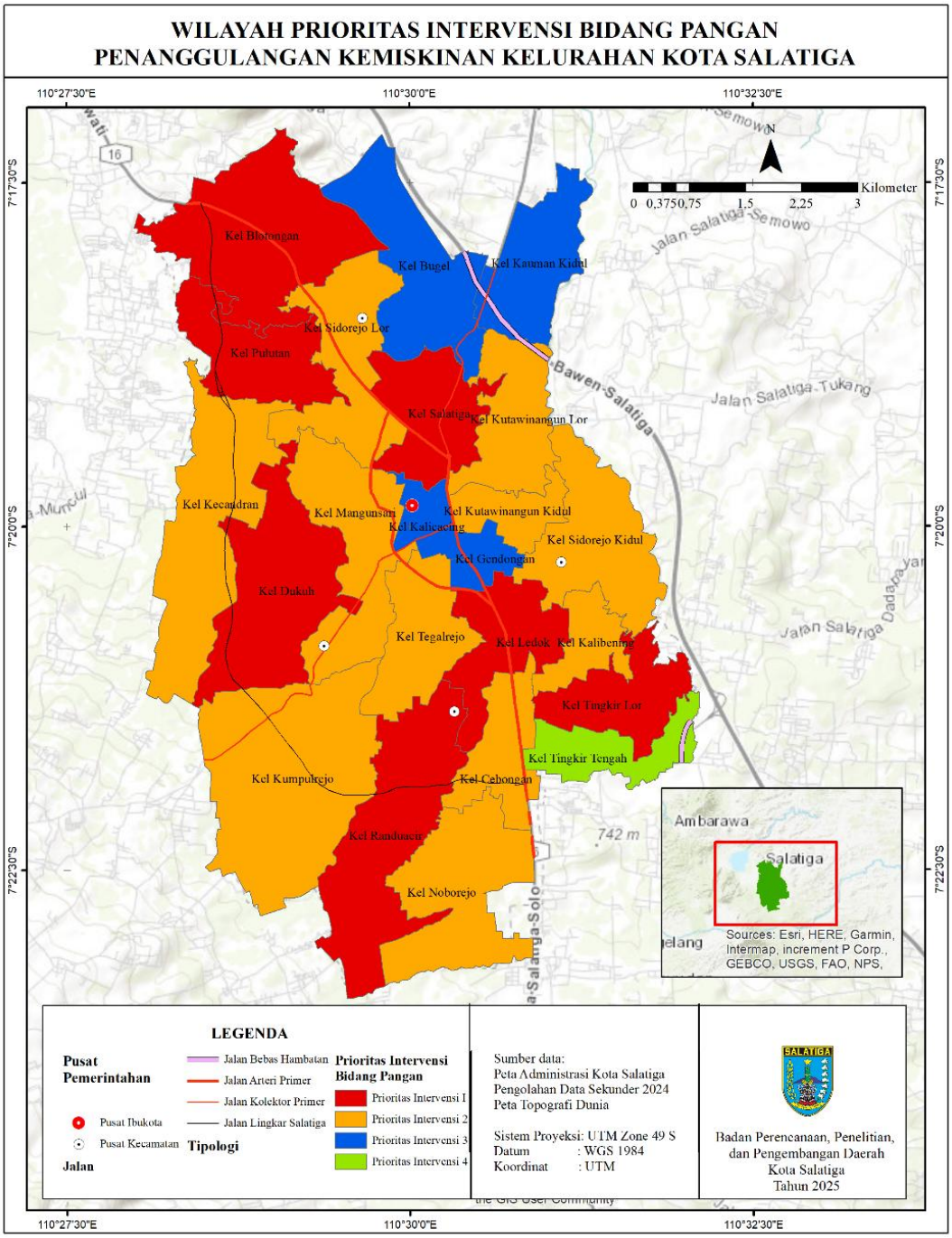
Prioritas Intervensi	Tipologi Wilayah	
	Pusat Kota	**Luar Pusat Kota**
Prioritas I	Kelurahan Ledok, Dukuh, dan Kelurahan Salatiga.	Kelurahan Randuacir, Blotongan, Pulutan, dan Kelurahan Tingkir Lor.
Prioritas II	Kelurahan Tegalrejo, Sidorejo Lor, Mangunsari, Kutawinangun Lor, dan Kelurahan Kutawinangun Kidul.	Kelurahan Cebongan, Kumpulrejo, Noborejo, Kecandran, Kalibening, dan Kelurahan Sidorejo Kidul.
Prioritas III	Kelurahan Kalicacing, dan Kelurahan Gendongan.	Kelurahan Bugel, dan Kelurahan Kauman Kidul.
Prioritas IV		Kelurahan Tingkir Tengah.

Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025

Berdasarkan Tabel 5.7 tersebut, didapati bahwa sebaran wilayah prioritas intervensi pada bidang ketahanan pangan dianalisis menurut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

tipologi wilayah pada tiap kelurahan di Kota Salatiga sebagaimana divisualisasikan pada peta berikut:



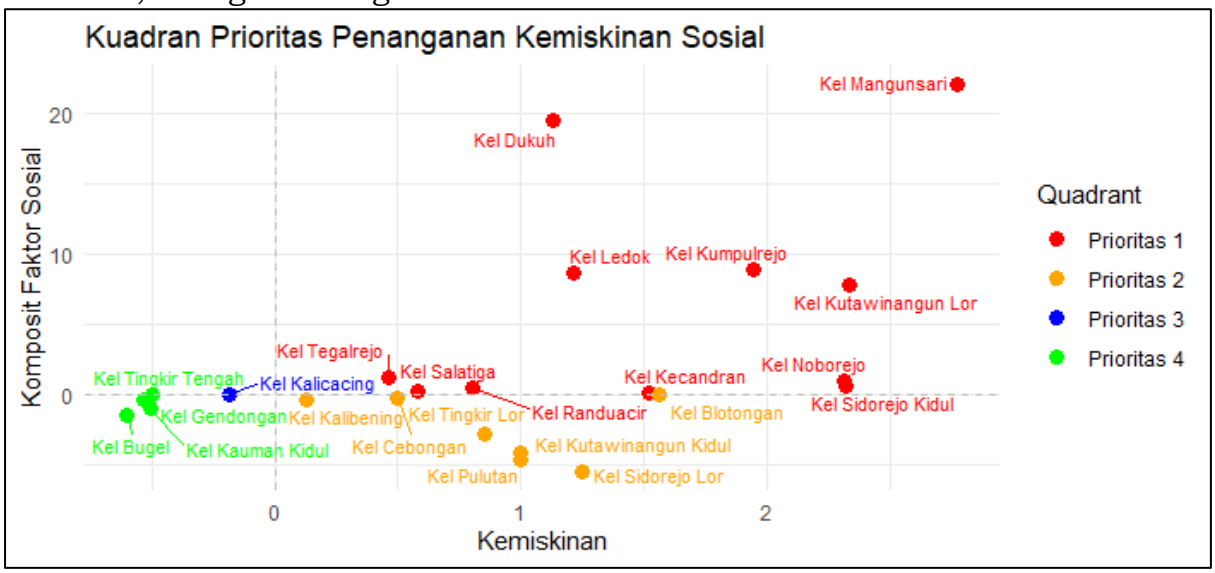
Gambar 5. 15 Peta Wilayah Prioritas Intervensi Bidang Ketahanan Pangan Penanggulangan Kemiskinan tiap Kelurahan di Kota Salatiga.
Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025

5.7. Prioritas Wilayah Bidang Sosial

Pemetaan prioritas wilayah dalam penanggulangan kemiskinan bidang sosial dilakukan dengan menghitung nilai komposit dari komponen faktor sosial yang terdiri dari nilai jumlah PMKS, PPKS Fakir, PPKS Non Fakir, Difabel, Lansia Terlantar, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang kemudian dianalisis dengan angka kemiskinan pada tiap kelurahan di Kota Salatiga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

tahun 2024. Adapun hasil analisis prioritas intervensi terbagi dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut



Gambar 5. 16 Kuadran Prioritas Penanganan Kemiskinan Bidang Sosial di Kota Salatiga

Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi berdasarkan bidang sosial di Kota Salatiga terbagi ke dalam 4 prioritas. Adapun jika ditinjau berdasarkan tipologi wilayah tiap kelurahan, sebaran wilayah intervensi dianalisis sebagaimana pada tabel berikut:

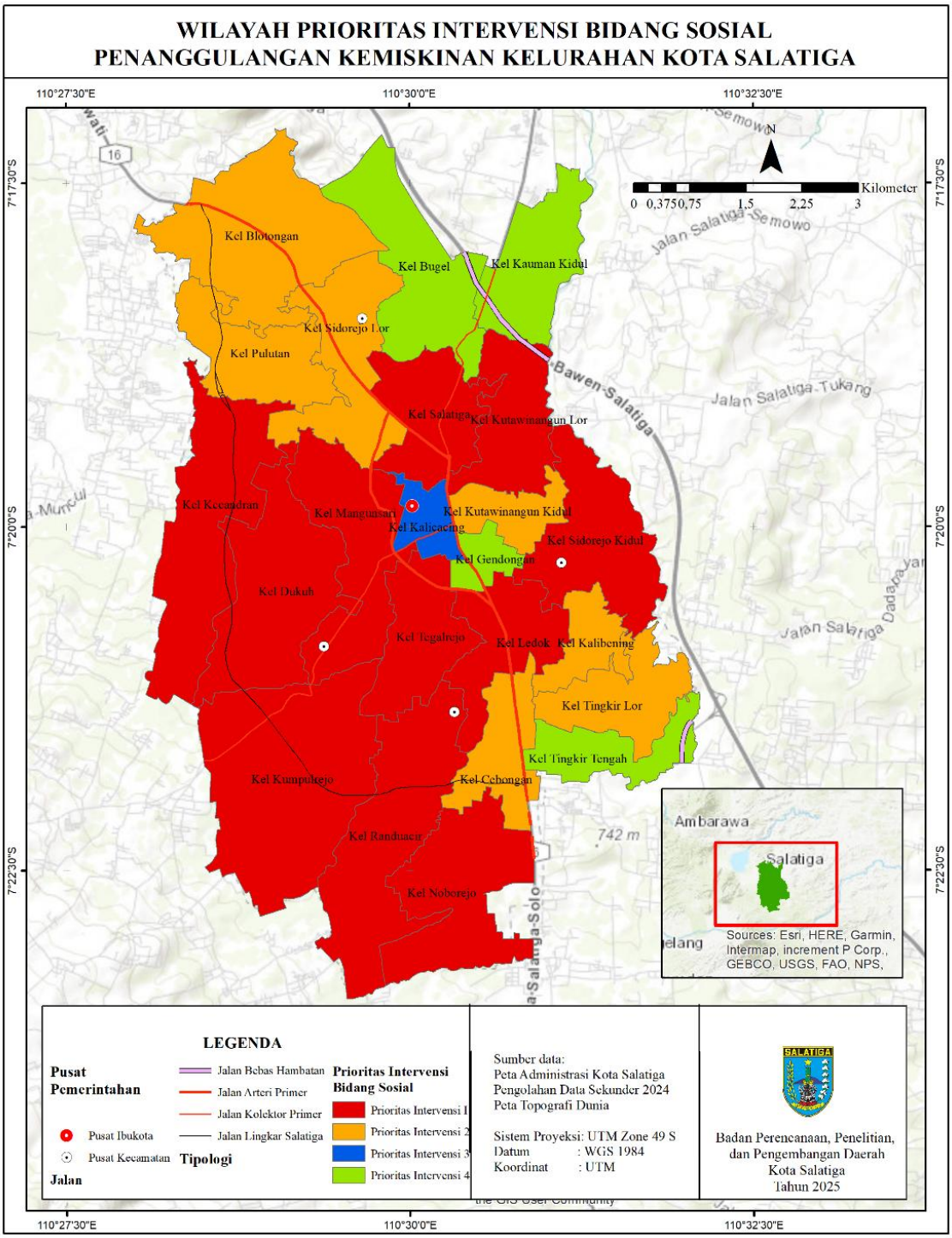
Tabel 5. 8 Wilayah Prioritas Intervensi bidang Sosial menurut Tipologi Wilayah Tingkat Kelurahan Kelurahan di Kota Salatiga

Prioritas Intervensi	**Tipologi Wilayah**	
	Pusat Kota	**Luar Pusat Kota**
Prioritas I	Ledok, Tegalrejo, Dukuh, Mangunsari, Salatiga, Kutowinangun Lor	Kumpulrejo, Noborejo, Randuacir, Kecandran, Sidorejo Kidul
Prioritas II	Sidorejo Lor, Kutowinangun Kidul	Cebongan, Blotongan, Pulutan, Kalibening, Tingkir Lor
Prioritas III	Kalicacing	
Prioritas IV	Gendongan	Tingkir Tengah, Bugel, Kauman Kidul,

Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025

Berdasarkan Tabel tersebut, didapati bahwa sebaran wilayah prioritas intervensi pada bidang sosial dianalisis menurut tipologi wilayah pada tiap kelurahan di Kota Salatiga sebagaimana divisualisasikan pada peta berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



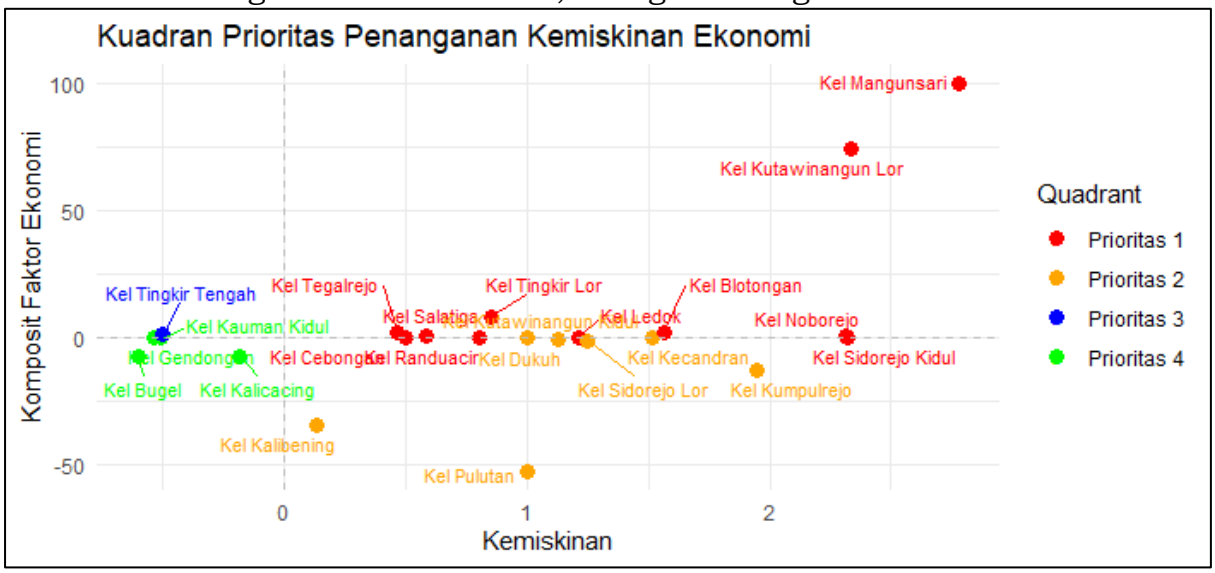
Gambar 5. 17 Peta Wilayah Prioritas Intervensi Bidang Sosial Penanggulangan Kemiskinan tiap Kelurahan di Kota Salatiga.
Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025

5.8. Prioritas Wilayah Bidang Ekonomi

Pemetaan prioritas wilayah dalam penanggulangan kemiskinan bidang ekonomi dilakukan dengan menghitung nilai komposit dari komponen faktor ekonomi yang terdiri dari jumlah umkm, jumlah pokdarwis, jumlah kelompok

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kebudayaan yang kemudian dianalisis dengan angka kemiskinan pada tiap kelurahan di Kota Salatiga tahun 2024. Adapun hasil analisis prioritas intervensi terbagi dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 5. 18 Kuadran Prioritas Penanganan Kemiskinan Bidang Ekonomi di Kota Salatiga

Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi berdasarkan bidang ekonomi di Kota Salatiga terbagi ke dalam 4 prioritas. Adapun jika ditinjau berdasarkan tipologi wilayah tiap kelurahan, sebaran wilayah intervensi dianalisis sebagaimana pada tabel berikut:

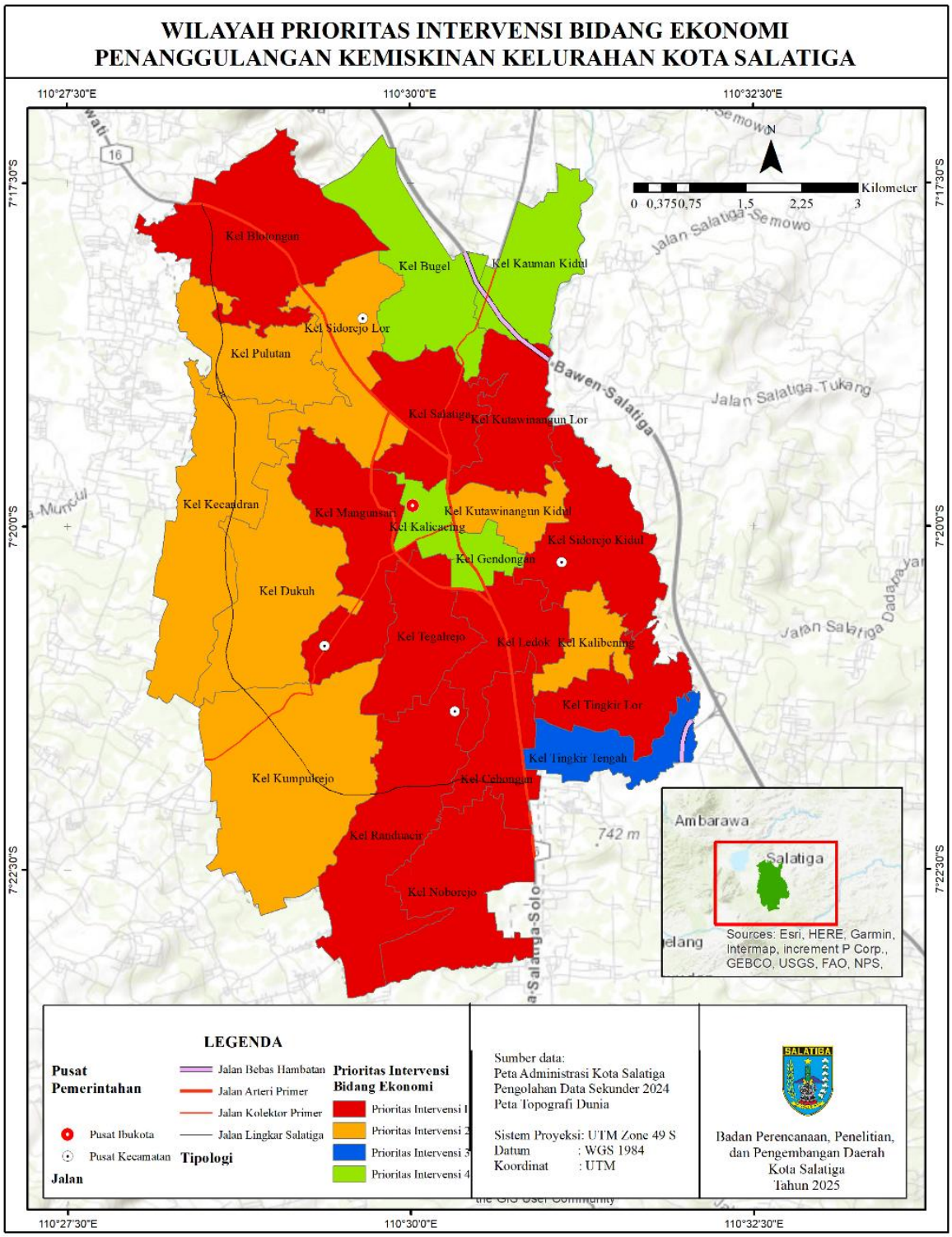
Tabel 5. 9 Wilayah Prioritas Intervensi bidang Ekonomi menurut Tipologi Wilayah Tingkat Kelurahan Kelurahan di Kota Salatiga

Prioritas Intervensi	**Tipologi Wilayah**	
	Pusat Kota	**Luar Pusat Kota**
Prioritas I	Ledok, Tegalrejo, Mangunsari, Salatiga, Kutowinangun Lor	Cebongan, Noborejo, Randuacir, Blotongan, Sidorejo Kidul, Tingkir Lor
Prioritas II	Dukuh, Sidorejo Lor, Kutowinangun Kidul	Kumpulrejo, Kecandran, Pulutan, Kalibening
Prioritas III		Tingkir Tengah
Prioritas IV	Kalicacing,Gendongan	Bugel, Kauman Kidul

Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025

Berdasarkan Tabel tersebut, didapati bahwa sebaran wilayah prioritas intervensi pada bidang ekonomi dianalisis menurut tipologi wilayah pada tiap kelurahan di Kota Salatiga sebagaimana divisualisasikan pada peta berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

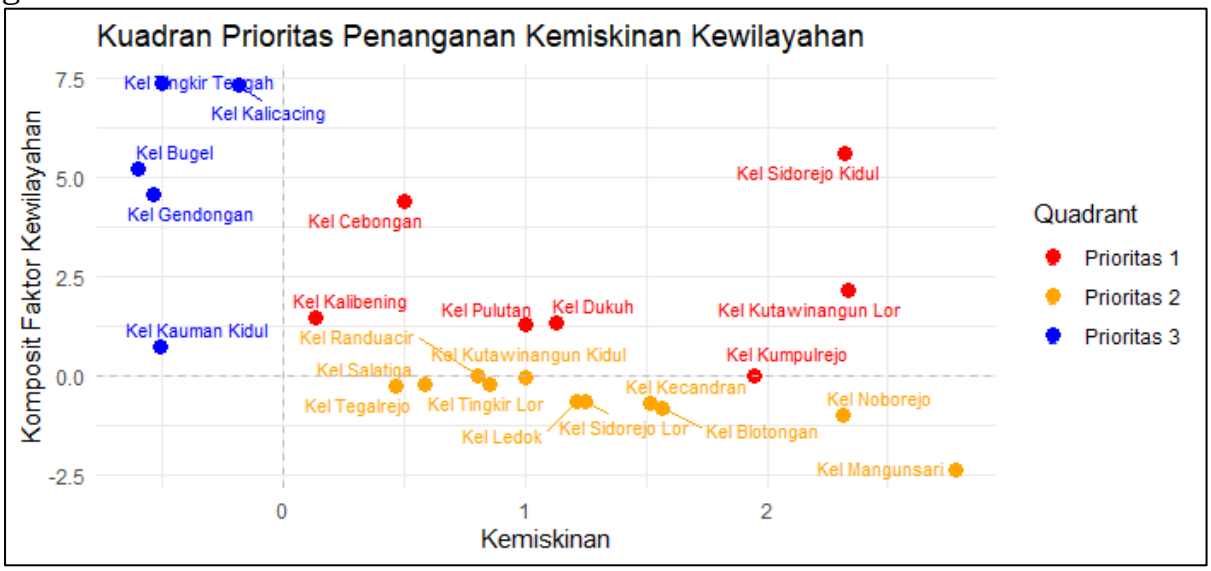


Gambar 5. 19 Peta Wilayah Prioritas Intervensi Bidang Ekonomi Penanggulangan Kemiskinan tiap Kelurahan di Kota Salatiga.
Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5.9. Prioritas Wilayah Bidang Kewilayahan

Pemetaan prioritas wilayah dalam penanggulangan kemiskinan bidang ekonomi dilakukan dengan menghitung nilai komposit dari komponen faktor ekonomi yang terdiri dari risiko bencana multidimensi (banjir, longsor, kekeringan, kebakaran, cuaca ekstrem) yang kemudian dianalisis dengan angka kemiskinan pada tiap kelurahan di Kota Salatiga tahun 2024. Adapun hasil analisis prioritas intervensi terbagi dalam 4 kuadran, sebagaimana gambar berikut



Gambar 5. 20 Kuadran Prioritas Penanganan Kemiskinan Bidang Kewilayahan di Kota Salatiga

Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi berdasarkan bidang kewilayahan di Kota Salatiga terbagi ke dalam 3 prioritas. Adapun jika ditinjau berdasarkan tipologi wilayah tiap kelurahan, sebaran wilayah intervensi dianalisis sebagaimana pada tabel berikut:

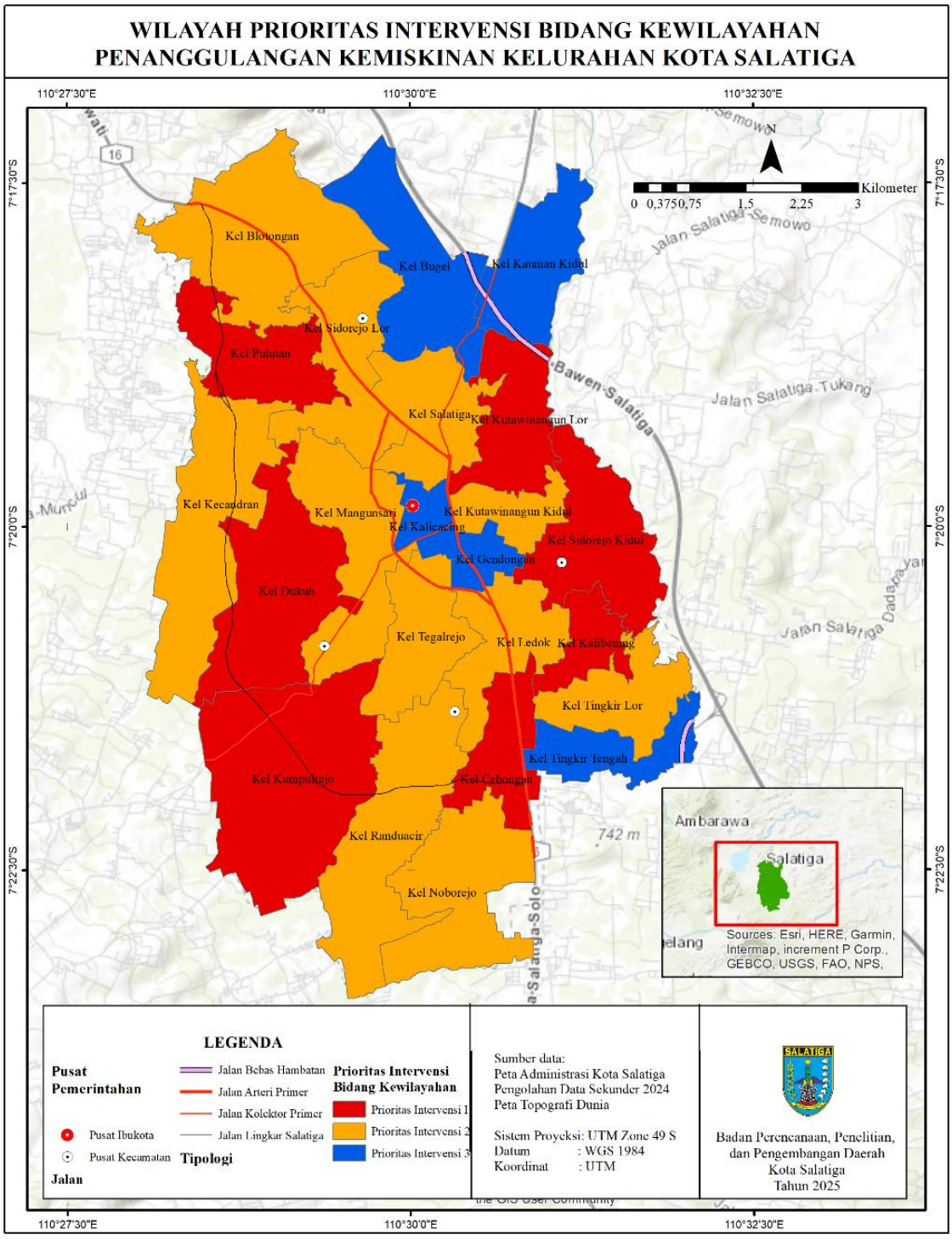
Tabel 5. 10 Wilayah Prioritas Intervensi bidang Kewilayahan menurut Tipologi Wilayah Tingkat Kelurahan Kelurahan di Kota Salatiga

Prioritas Intervensi	**Tipologi Wilayah**	
	Pusat Kota	**Luar Pusat Kota**
Prioritas I	Dukuh, Kutowinangun Lor	Cebongan, Kumpulrejo, Pulutan, Kalibening, Sidorejo Kidul
Prioritas II	Ledok, Tegalrejo, Mangunsari, Salatiga, Sidorejo Lor, Kutowinangun Kidul	Noborejo, Randuacir, Kecandran, Blotongan, Tingkir Lor
Prioritas III	Kalicacing, Gendongan	Bugel, Kauman Kidul, Tingkir Tengah
Prioritas IV		

Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025

Berdasarkan Tabel tersebut, didapati bahwa sebaran wilayah prioritas intervensi pada bidang kewilayahan dianalisis menurut tipologi wilayah pada tiap kelurahan di Kota Salatiga sebagaimana divisualisasikan pada peta berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



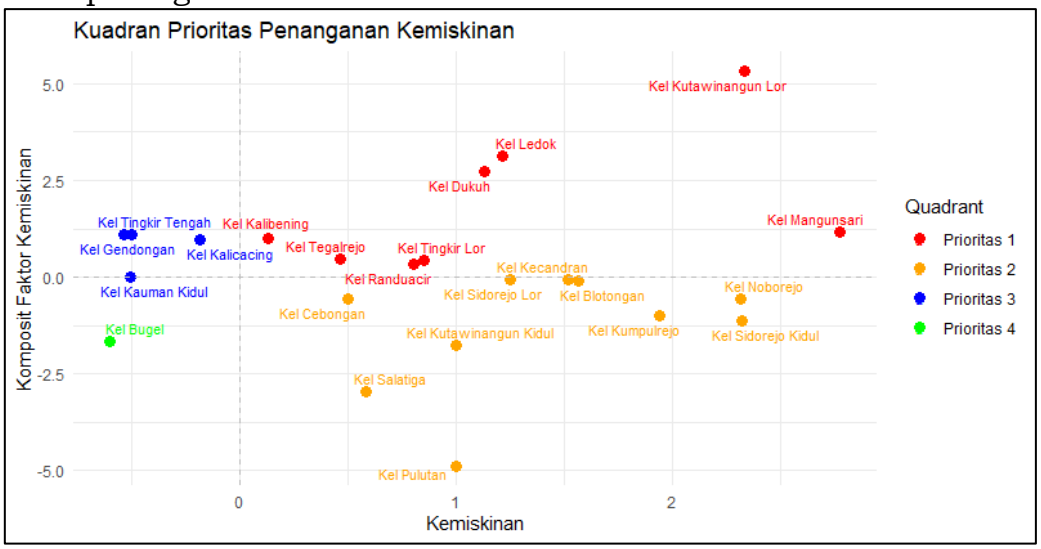
Gambar 5. 21 Peta Wilayah Prioritas Intervensi Bidang Kewilayahan Penanggulangan Kemiskinan tiap Kelurahan di Kota Salatiga.

Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5.10. Prioritas Komposit

Pemetaan wilayah prioritas intervensi di Kota Salatiga yang didasarkan pada perhitungan tiap bidang penanangan kemiskinan kemudian dihitung secara komposit dari keseluruhan bidang yang kemudian diolah dengan data angka kemiskinan tiap wilayah kelurahan di Kota Salatiga Tahun 2024. Adapun hasil analisis prioritas komposit terbagi menjadi 4 kuadran sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 5. 22 Kuadran Prioritas Penanganan Kemiskinan di Kota Salatiga

Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025

Berdasarkan gambar 5.16 dapat diketahui bahwa nilai perhitungan komposit seluruh bidang menghasilkan 4 kuadran prioritas yang tersebar secara merata kecuali pada kuadran 4 yang hanya terdiri dari 1 kelurahan yaitu Kelurahan Bugel. Adapun jika ditinjau berdasarkan tipologi wilayah tiap kelurahan, sebaran wilayah intervensi dianalisis sebagaimana tabel berikut:

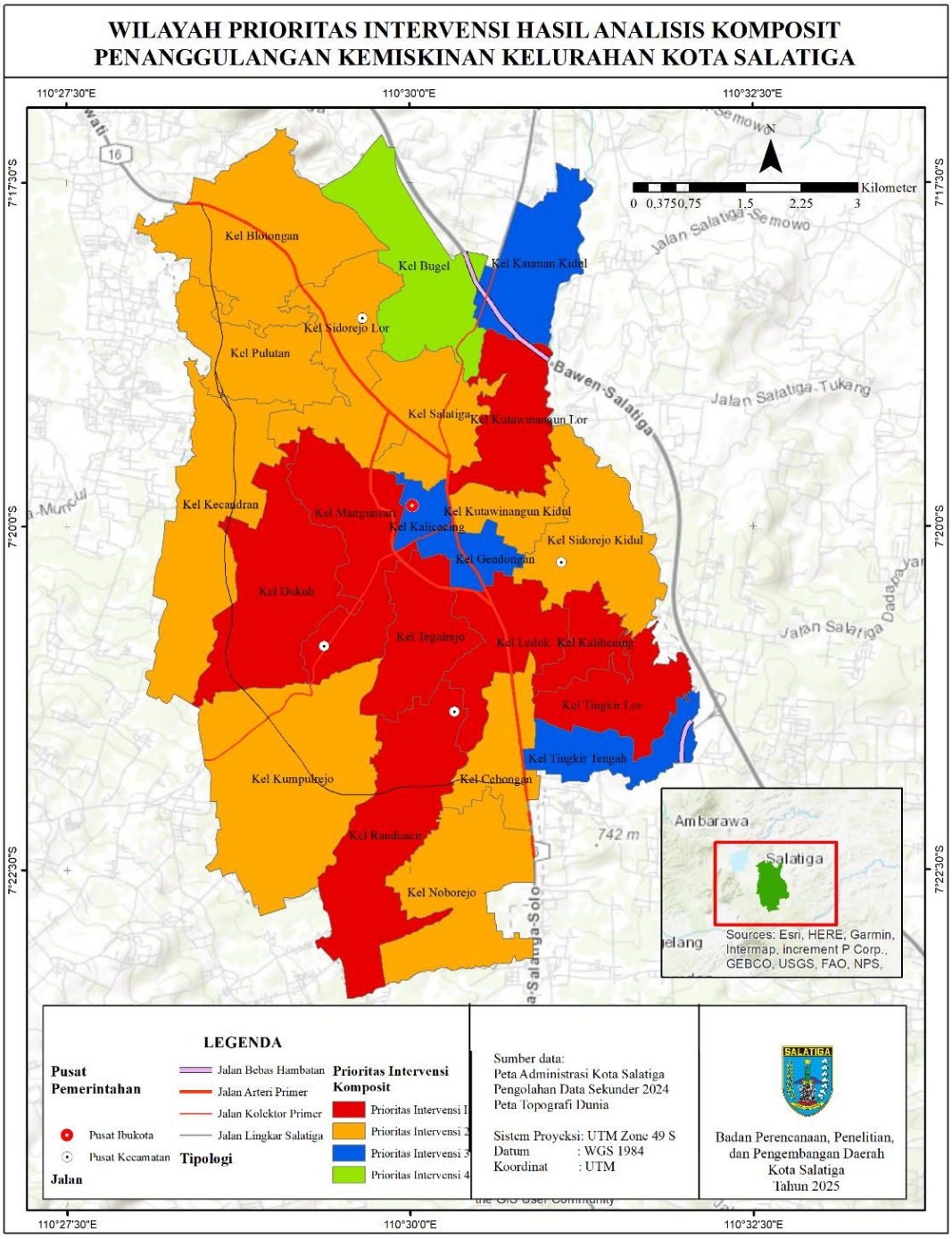
Tabel 5. 11 Wilayah Prioritas menurut Tipologi Wilayah Tingkat Kelurahan Kelurahan di Kota Salatiga

Prioritas Intervensi	**Tipologi Wilayah**	
	Pusat Kota	**Luar Pusat Kota**
Prioritas I	Kelurahan Mangunsari, Kutawinangun Lor, Ledok, Tegalrejo, dan Kelurahan Dukuh.	Kelurahan Kalibening, Randuacir, dan Kelurahan Tingkir Lor
Prioritas II	Kelurahan Sidorejo Lor, Salatiga, dan Kelurahan Kutawinangun Kidul.	Kelurahan Cebongan, Noborejo, Kecandran, Pulutan, Kumpulrejo, Blotongan, dan Kelurahan Sidorejo Kidul.
Prioritas III	Kelurahan Kalicacing dan Kelurahan Gendongan	Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan Tingkir Tengah
Prioritas IV		Kelurahan Bugel

Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025.

Secara keseluruhan, wilayah prioritas dengan intervensi pada komposit bidang penanggulangan kemiskinan tersebar merata dengan fokus tiap bidang yang berbeda-beda, sebagaimana divisualisasikan pada peta berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 5. 23 Peta Wilayah Prioritas Komposit Penanggulangan Kemiskinan tiap Kelurahan di Kota Salatiga.

Sumber: Analisis data sekunder OPD, 2025

BAB VI
SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi implementasi rencana penanggulangan kemiskinan daerah dibutuhkan sebagai upaya untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan ketepatan, keakuratan dan kelengkapan

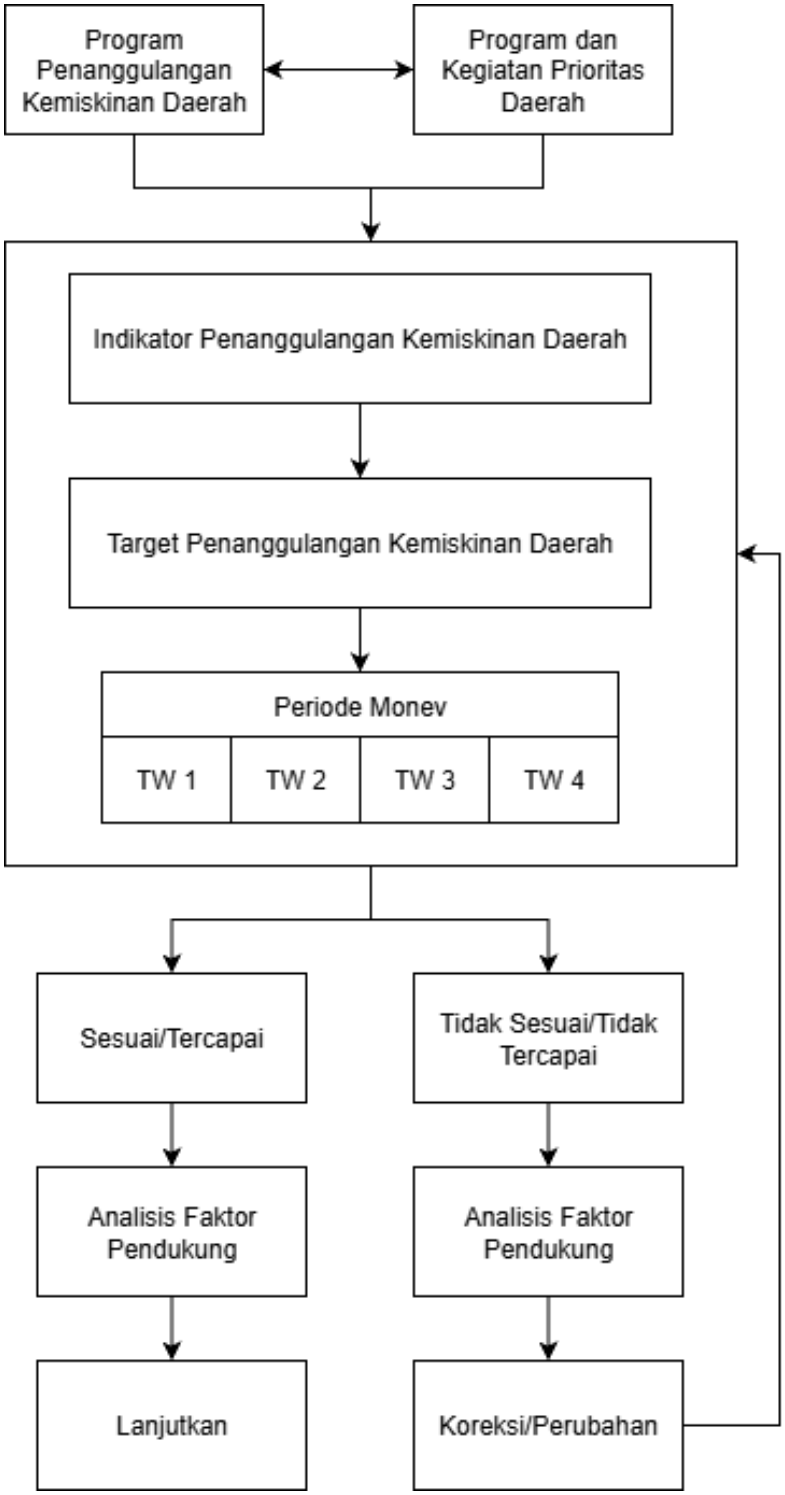
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

data dan informasi. Tujuan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kemajuan maupun kualitas pelaksanaan program kegiatan, selain itu juga untuk mengidentifikasi masalah maupun potensi masalah yang dapat terjadi, serta untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan baik dari sisi keluaran (*output*), kegunaan dan dampaknya, serta menilai capaian kinerja penanggulangan kemiskinan. Monitoring diartikan sebagai aktivitas untuk mengidentifikasi umpan balik secara terus-menerus pada setiap program dari program atau kegiatan yang direncanakan baik untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan kegiatan, keluaran maupun dampak positif maupun negatif dari pelaksanaan kegiatan. Adapun evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program dan kegiatan yang kemudian dipakai untuk perbaikan di masa depan.

6.1. Alur Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dibagi menjadi beberapa tahapan: (i) persiapan, (ii) pelaksanaan, dan (iii) pelaporan, serta (iv) tindak lanjut. Dalam tahapan persiapan, penyiapan instrumen monitoring disesuaikan dengan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan capaian indikator per periode (dapat dilakukan per triwulan) bersamaan dengan monitoring terhadap capaian program dan kegiatan prioritas perangkat daerah. Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan mengecek capaian kinerja masing-masing indikator pada setiap program dan kegiatan dalam kurun waktu tertentu (triwulan). Pada tahap pelaporan akan muncul kesesuaian dan ketercapaian program dengan target dan diikuti dengan analisis mengenai faktor pendukung maupun penghambatnya, untuk kemudian dilakukan tindak lanjut dari keberhasilan maupun ketidakberhasilan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Evaluasi dilakukan per tahun dengan membandingkan target dengan realisasi setiap indikator kinerja program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Tingkat ketercapaian dianalisis untuk masing-masing program dan kegiatan, apakah tinggi, sedang, atau rendah. Kemudian, ditelaah lebih jauh faktor-faktor penghambat dan pendukung pencapaian target tersebut.

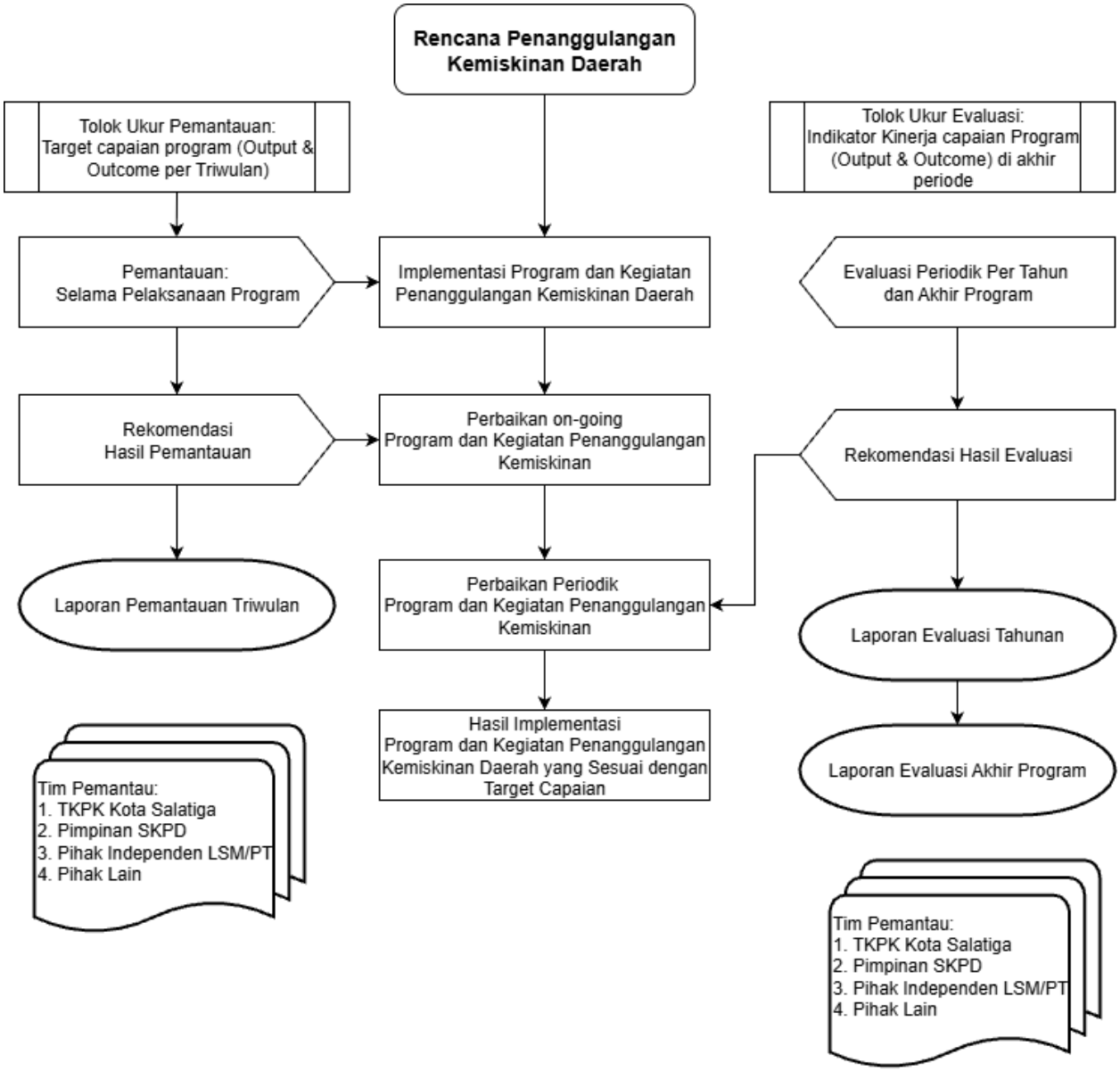
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 6. 1 Alur Monitoring Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Sumber: RPKD Kota Salatiga Tahun 2023-2027 (Dimodifikasi)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 6. 2 Alur Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Sumber: RPKD Kota Salatiga Tahun 2023-2027 (Dimodifikasi)

Secara umum, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan pada semua kebijakan dan program terkait upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga. Adapun sarana monitoring dan evaluasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan.

6.2. Instrumen Monitoring dan Evaluasi

Secara sederhana, instrumen monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah sebagaimana tertera pada tabel berikut

Tabel 6. 1 Instrumen Monitoring Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Masalah	Program / Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Target Akhir Tahun	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tindak lanjut
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10*	*(11)*

Keterangan:
Kolom (1) : berisi nomor
Kolom (2) : berisi uraian masalah determinan per bidang
Kolom (3) : berisi nomenklatur program dan kegiatan OPD yang mendukung program penanggulangan kemiskinan
Kolom (4) : berisi indikator kinerja program dan kegiatan OPD yang sesuai dengan RPKD dan APBD
Kolom (5) : berisi satuan indikator kinerja program dan kegiatan OPD
Kolom (6) : berisi target kinerja triwulan yang telah direncanakan di awal tahun anggaran (sesuai dengan pelaksanaan triwulan)
Kolom (7) : berisi realisasi kinerja triwulan
Kolom (8) : berisi target kinerja sampai akhir tahun perencanaan
Kolom (9) : berisi faktor penghambat pelaksanaan kegiatan
Kolom (10) : berisi faktor pendorong pelaksanaan kegiatan
Kolom (11) : berisi saran untuk tindak lanjut kegiatan

Adapun instrumen evaluasi seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 6. 2 Instrumen Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

No	Masalah	Program / Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun	Realisasi Program / Kegiatan pada Tahun n	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Ketercapaian Program/ Kegiatan	Faktor Penghambat / Pendorong	Tindak lanjut
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10*	*(11)*	*(12°*

Keterangan:
Kolom (1): berisi nomor
Kolom (2): berisi uraian masalah determinan per bidang
Kolom (3): berisi nomenklatur program dan kegiatan OPD yang mendukung program penanggulangan kemiskinan
Kolom (4): berisi indikator kinerja program dan kegiatan OPD yang sesuai dengan RPKD dan APBD
Kolom (5): berisi satuan indikator kinerja program dan kegiatan OPD
Kolom (6): berisi target kinerja triwulan yang direncanakan di awal tahun anggaran (sesuai dengan pelaksanaan triwulan)
Kolom (7): berisi realisasi program/kegiatan pada tahun n
Kolom (8): berisi target anggaran sampai akhir tahun perencanaan
Kolom (9): berisi realisasi anggaran sampai akhir tahun perencanaan
Kolom (10: berisi tingkat ketercapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dibagi menjadi tiga kelas:
(i) tinggi, jika ketercapaian lebih atau sama dengan 100 persen
(ii) sedang, jika ketercapaian antara 80-99 persen
(iii) rendah, jika ketercapaian kurang dari 80 persen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kolom (11): berisi identifikasi faktor penghambat dan/atau faktor pendorong
Kolom (12): berisi saran untuk tindak lanjut kegiatan

6.3. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh TKPK Kota Salatiga bersama dengan instansi terkait dari setiap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan cakupan:

1. Monitoring terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di masing-masing bidang organisasi perangkat daerah,
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di masing-masing bidang organisasi perangkat daerah,
3. Evaluasi terhadap capaian indikator-indikator kemiskinan.

TKPK Kota Salatiga berkoordinasi dengan TKPK Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan prinsip objektif, transparan, partisipatif, akuntabel, efisien, efektif, ketepatan waktu, ketersinambungan, dan bertumpu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

6.4. Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tentunya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sebagai sasaran penerima program. Untuk itu, aspirasi, masukan dan timbal balik dari masyarakat sangat dibutuhkan sebagai salah satu umpan dalam upaya perbaikan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Masyarakat dapat menyampaikan saran, aspirasi maupun masukan melalui mekanisme pengaduan masyarakat. Dalam hal ini, proses menampung, mencatat, menelaah, menyalurkan, mengkonfirmasi dan mengklarifikasi maupun memberikan solusi kepada masyarakat, mendokumentasikan secara tersistem dan mensosialisasikan hasil penanganan pengaduan agar permasalahan yang dialami dapat segera dicarikan alternatif solusi terbaik bagi seluruh pihak. Mekanisme ini tentunya akan berfungsi sebagai alat monitoring program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara eksternal. Adapun mekanismenya meliputi:

1) Masyarakat baik secara individu, rumah tangga, kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat program maupun bukan penerima manfaat program dapat menyampaikan pengaduan kepada TKPK Kota Salatiga apabila menjumpai permasalahan dan ketidaksesuaian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
2) Setelah adanya aduan dari masyarakat, pelaksana program melakukan analisis terhadap informasi dan melakukan kajian solusi secara berjenjang.
3) Hasil penanganan pengaduan disampaikan secara berkala kepada Walikota sebagai penanggung jawab TKPK.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB VII
PENUTUP

Upaya pengentasan kemiskinan merupakan kewajiban semua pihak, pemerintah, pemerintah daerah, pihak swasta, masyarakat maupun akademisi. Melalui Review Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Salatiga tahun 2023-2027 maka diharapkan muatannya dapat menjadi cikal bakal penyusunan RPKD tahun 2025-2029. Dokumen ini menjadi penting karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan komplementari dari RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan kebijakan, strategi, dan program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan terarah dengan semangat kolaborasi antar *stakeholder*s untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah. Dengan demikian, Kota Salatiga dapat melaksanakan penanganan atas permasalahan kemiskinan daerah yang sesuai dengan visi jangka menengah Pemerintah Kota Salatiga untuk menjadi Kota BEDA: Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia.

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN